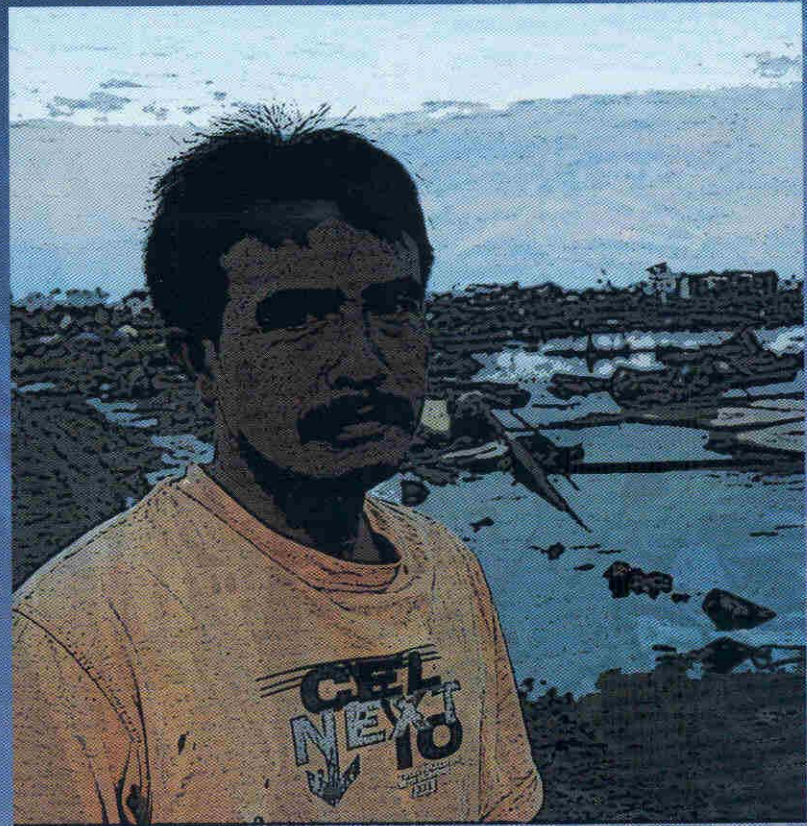




KAIDAH-KAIDAH PANDUAN



Perlucutan, Demobilisasi
dan Reintegrasi di Aceh

Reintegrasi Ekonomi Berkelanjutan



**Perlucutan,
Demobilisasi dan
Reintegrasi di Aceh
Reintegrasi Ekonomi
Berkelanjutan**

**Kaidah-Kaidah
Panduan**

Daftar Isi

Pengantar	5
Daftar Istilah	6
Daftar Singkatan	8
1. Pendahuluan	9
2. Konteks Reintegrasi	13
3. Tantangan-tantangan Reintegrasi Ekonomi	17
♦ Mengatasi tantangan-tantangan ketenagakerjaan	17
♦ Reintegrasi kelompok-kelompok Khusus	20
4. Penilaian Kunci untuk Reintegrasi Ekonomi	23
5. Strategi-strategi Reintegrasi Ekonomi	33
6. Komponen-komponen Program Reintegrasi	41
♦ Meningkatkan kapasitas penyerapan	41
♦ Bantuan langsung	48
7. Keberlanjutan	59
♦ Membangun kapasitas yang bertahan lama	59
♦ Menguatkan pemerintah pusat, provinsi dan daerah	60
8. Praktik Internasional yang Dipelajari	63
♦ IDDRS	63
♦ Hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam reintegrasi ekonomi	66

Prakata

Menyusul Tsunami bulan Desember 2004 yang meluluhlantakan Provinsi Aceh dan menimbulkan kerugian dan penderitaan luar biasa, tantangan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi sangat berat. Dalam waktu yang bersamaan, bencana tsunami paling tidak telah memicu tercapainya perjanjian damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), bagi pemecahan yang kekal mengakhiri konflik yang berkepanjangan di Aceh.

Satu komponen yang penting dari proses perdamaian adalah program Perlucutan, Demobilisasi dan Reintegrasi (DDR) bagi GAM dan anggotanya. Program DDR harus bertujuan menjaga keseimbangan antara pemenuhan komitmen yang disusun dalam Nota Kesepahaman di Helsinki dengan, di saat yang sama, peletakan dasar-dasar bagi keberlanjutan pemulihan ekonomi jangka panjang dan reintegrasi, yang sejalan dengan program rehabilitasi berskala besar akibat bencana Tsunami.

Pemerintah Republik Indonesia telah meminta ILO untuk membantu warga sipil korban konflik, dan anggota GAM yang diberi amnesti, untuk dapat memiliki kesempatan dan kapasitas kembali ke kehidupan normal. Mereka membutuhkan bantuan dalam memperoleh pekerjaan dan keterampilan hidup yang memadai. Pemerintah Republik Indonesia sangat menyadari pengalaman panjang ILO dalam bidang yang khusus ini—menyiapkan warga sipil korban konflik dan eks-GAM ke dalam pasar kerja. Penyusunan panduan kerja untuk hal ini diperlukan.

Pemerintah Republik Indonesia menghargai kontribusi ILO dalam menyusun panduan ini, yang sebagian besar diadaptasi dari panduan ILO tentang reintegrasi yang akan dipublikasikan pada awal 2006.

Pemerintah Republik Indonesia

Jakarta, Desember 2005

Daftar Istilah

Layanan Pengembangan Usaha	Berbagai macam layanan non-keuangan yang digunakan untuk membantu para pengusaha dalam menjalankan dan mengembangkan usaha mereka.
Pembangunan kapasitas	Meningkatkan keterampilan, pengalaman, serta kemampuan teknis dan manajerial organisasi dan kelembagaan.
Tentara anak-anak	Siapapun yang berusia kurang dari 18 tahun yang menjadi bagian dari kekuatan bersenjata baik yang reguler maupun non reguler dalam berbagai kapasitas. ¹
Komunitas	Entitas sosial-budaya yang pada akhirnya menjadi entitas politik, seperti sebuah desa atau pemukiman.
Koperasi	Asosiasi otonomi yang terdiri dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi dan budaya mereka melalui sebuah perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. ²
Desentralisasi	Pemindahan kekuasaan politik, fiskal dan pemerintahan kepada pemerintah sub-nasional. ³
Pekerjaan yang Layak	Pekerjaan yang memenuhi aspirasi-aspirasi dasar orang-orang, bukan hanya untuk memperoleh pendapatan, tetapi juga untuk rasa aman untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka, tanpa diskriminasi atau pelecehan. ⁴
Cacat	Berbagai bentuk cacat fisik, cacat yang berkaitan dengan pancaindera, intelektual, atau mental. ⁵
Perlucutan senjata	Mengumpulkan senjata dari para gerilyawan dan/atau komunitas. Senjata tersebut kemudian diserahkan kepada pihak yang berwenang, yang bertanggung jawab untuk menyimpannya dengan aman, mendistribusikannya kembali atau bahkan menghancurkannya.
Demobilisasi	Kebalikan dari rekrutmen (mobilisasi) gerilyawan sebuah kelompok bersenjata; membubarkan sebuah unit bersenjata, mengurangi jumlah gerilyawan dalam sebuah kelompok bersenjata, atau tahap sementara sebelum membubarkan seluruh kekuatan bersenjata, baik yang reguler maupun yang non reguler. ⁶
Gerilyawan	Semua orang yang mendukung kekuatan bersenjata secara langsung dalam pertempuran-pertempuran, dan bukan hanya individu-individu yang membawa senjata. ⁷
Mantan Gerilyawan	Para gerilyawan yang didemobilisasi secara resmi melalui program-program DDR, dan yang "terdemobilisasi secara otomatis" atau "mendemobilisasi diri sendiri". Definisi ini berbeda antara satu negara dengan negara yang lain.
Jender	Peran-peran yang terbentuk secara sosial dan berdasarkan sejarah yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki, bertentangan dengan karakteristik-karakteristik fisik dan biologis. Dalam hal ini, seseorang dapat dibedakan berdasarkan maskulinitas dan feminitasnya.
Keamanan Manusia	Lebih dari sekedar fokus eksklusif tradisional pada soal keamanan negara, konsep ini menjadikan pengalaman keamanan manusia secara individual sebagai rujukan yang penting. Apabila dilaksanakan secara berkelanjutan, program-program DDR dapat memberikan kontribusi dalam mengurangi rasa ketidakamanan manusia bagi mantan gerilyawan dan masyarakat secara keseluruhan. ⁸

1 Cape Town Principles, 30 April 1997.

2 Rekomendasi ILO 193 (2002) tentang promosi koperasi (lihat: http://www.ilo.org/dyn/empent/empent.portal?p_prog=C&p_subprog=&p_docid=TRANSLATIONS&p_prog=C)

3 Lihat: <http://www1.worldbank.org/wbiep/decentralization/>

4 ILO: *Decent Work, Report of the Director-General* (Geneva 1999).

5 ILO/UNESCO/WHO: *CBR. A Strategy for Rehabilitation, Equalization of Opportunities, Poverty Reduction and Social Inclusion of People with Disability, Joint Position Paper 2004* (Geneva, WHO, 2004).

6 *Disarmament Demobilisation and Reintegration. A Practical Field and Classroom Guide*, op. cit., p. 15.

7 Specht, Irma: "Jobs for Rebels and Soldiers", in: Eugenia Date-Bah (ed.): *Jobs after war. A critical challenge in the peace and reconstruction puzzle* (Geneva, ILO, 2003), pp. 73-110.

8 UNDP: *Human Development Report* (New York/Oxford, Oxford University Press, 1994); Specht: *Jobs for Rebels and Soldiers*, op. cit.

Ekonomi Informal	Kegiatan-kegiatan usaha yang tidak diakui atau dilindungi oleh hukum dan peraturan.
Lokal	Wilayah sub-nasional yang lebih tinggi dari sekadar komunitas.
Pembangunan Ekonomi Lokal	Proses partisipatif yang mendorong pengaturan kemitraan antara pemangku-pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) utama perusahaan swasta dan publik di sebuah wilayah tertentu, yang memungkinkan dirancangnya dan dilaksanakannya strategi pembangunan bersama, dengan menggunakan sumber-sumber daya lokal dan keunggulan kompetitif (<i>competitive advantages</i>) dalam konteks global. Tujuan akhirnya adalah menciptakan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi.
Perusahaan Mikro	Sebuah usaha yang mempekerjakan kurang dari 5 orang dan dapat berbasis di dalam atau di luar rumah. ⁹
Keuangan Mikro	Penyediaan layanan keuangan untuk orang-orang yang memiliki pendapatan rendah, meliputi layanan-layanan seperti tabungan mikro, asuransi mikro, sewa-beli mikro, layanan pembayaran dan pemindahan/pengiriman uang. ¹⁰
Kemitraan Publik-Swasta	Hubungan yang erat antara perwakilan sektor publik (pemerintah) dan swasta dan pada akhirnya masyarakat sipil, untuk mencapai dan bersama-sama melaksanakan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan bersama.
Komunitas penerima	Komunitas di mana mantan gerilyawan akan hidup dan bekerja; tidak selalu dalam komunitas di mana mereka berasal.
Rekonsiliasi	Dalam kerangka kerja DDR, hal ini mengacu pada proses penerimaan antara komunitas dan gerilyawan dan antarkelompok yang bertentangan (misalnya, kelompok etnis, politik, agama, militer, usia, jender).
Rekonstruksi	Membangun kembali dasar-dasar sosial dan struktur-struktur dan lembaga-lembaga perekonomian, fisik, dan politik setelah konflik. Hal ini tidak harus berarti kembalinya situasi sebelum konflik karena situasi tersebut bisa jadi merupakan pemicu konflik.
Reintegrasi Ekonomi	Proses di mana mantan gerilyawan mengubah identitas dan sumber pendapatannya dari militer ke sipil.
Asosiasi Usaha Kecil	Organisasi pengusaha kecil atau pekerja-pekerja yang berbasis anggota, demokratis, representatif, dan bertujuan memperoleh keuntungan bersama atau mencapai suatu tujuan bersama. ¹¹
Perusahaan Kecil	Sebuah usaha yang mempekerjakan 11 sampai 50 orang. ¹²
Pentargetan	Program dan kebijakan yang memperlakukan —sebuah kelompok seperti mantan gerilyawan—secara berbeda dari kelompok-kelompok lain (yang terkena dampak perang), seperti keluarga-keluarga yang terkena dampak konflik, rumah tangga dan komunitas-komunitas yang dikepalai oleh perempuan. Hal ini mungkin termasuk memberikan mereka akses terhadap layanan-layanan yang diinginkan atau memberikan bantuan terpisah dalam proses reintegrasi sosial dan ekonomi mereka. ¹³
Teritori	Wilayah di mana dapat ditemukan penduduk, sumber daya dan organisasi-organisasi yang mewakili sektor publik dan swasta serta masyarakat sipil dalam jumlah yang besar. Teritori tersebut dapat berupa sebuah kecamatan, distrik, provinsi atau kawasan, tergantung pada definisi yang ada pada tiap-tiap negara.
Kelompok "rentan" atau "khusus"	Sebuah kelompok yang tidak memperoleh manfaat secara otomatis dari kesempatan-kesempatan yang ada di sekelilingnya, dan memiliki risiko dikucilkan secara sosial-ekonomi.

9 ILO/UNHCR: *Introduction to microfinance in conflict-affected communities* (Geneva, 2002).

10 ILO/UNHCR: *Introduction to microfinance*, op. cit.

11 ILO: *Guide to managing small business associations*, IFP/SEED draft (Geneva, 2003).

12 ILO/UNHCR: *Introduction to microfinance*, op. cit.

13 Specht, Irma and Carlien van Empel: *Enlargement. Targeting ex-combatants or all war-affected people? A challenge for social and economic reintegration, the Liberian experience, Paper* (Geneva, ILO, 1998).

Daftar Singkatan

BDS	<i>Business Development Services</i> (Layanan Pengembangan Bisnis)
CAFF	<i>Children Associated with Fighting Forces</i> (Anak-Anak yang Dikaitkan dengan Kekuatan Tempur)
CBO	<i>Community Based Organisation</i> (Organisasi Berbasis Komunitas)
DDR	<i>Disarmament Demobilization Reintegration</i> (Perlucutan Senjata Demobilisasi Reintegrasi)
IDP	<i>Internally Displaced Persons</i> (Pengungsi Lokal)
IDDRS	<i>Integrated DDR standards</i> (Standar-standar DDR terpadu)
IAWG/DDR	<i>Interagency Working Group on DDR</i> (Kelompok Kerja Antar Lembaga mengenai DDR)
ICC	<i>Interim Care Centre (for demobilised children)</i> (Pusat Penampungan Sementara (untuk anak-anak yang terdemobilisasi)
ILC	<i>International Labour Conference</i> (Konferensi Perburuhan Internasional)
ILO	<i>International Labour Office</i> (Kantor Perburuhan Internasional)
ILS	<i>International Labour Standards</i> (Standar Perburuhan Internasional)
LED	<i>Local Economic Development</i> (Pembangunan Ekonomi Lokal)
LEDA	<i>Local Economic Development Agency</i> (Lembaga Pembangunan Ekonomi Lokal)
NCDDR	<i>National Commission (or Committee) on DDR</i> (Komisi (atau Komite) Nasional mengenai DDR)
NGO	<i>Non-Governmental Organization</i> (Organisasi Non-Pemerintah)
MSME	<i>Micro, Small and Medium-sized Enterprises</i> (Perusahaan Mikro, Kecil dan Menengah)
PPP	<i>Public-Private Partnership</i> (Kemitraan Publik – Swasta)
SBA	<i>Small Business Association</i> (Asosiasi Usaha Kecil)
SHO	<i>Self-Help Organization</i> (Organisasi Swadaya)
SME	<i>Small and Medium-sized Enterprises</i> (Perusahaan Kecil dan Menengah)
SSR	<i>Security Sector Reform</i> (Reformasi Sektor Keamanan)
SALW	<i>Small and Light Weapons</i> (Senjata Kecil dan Ringan)
SME	<i>Small and Medium Enterprises</i> (Perusahaan Kecil dan Menengah)
VET	<i>Vocational Education and Training</i> (Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan)
WAFF	<i>Women Associated with Fighting Forces</i> (Perempuan yang Dikaitkan dengan Kekuatan Tempur)

1. Pengantar

Tujuan dan Definisi

Pada umumnya, menciptakan perdamaian pasca konflik merupakan pekerjaan yang rumit mencakup pencapaian kondisi lingkungan yang aman, penguatan pemerintahan yang memiliki legitimasi, mendorong revitalisasi ekonomi dan sosial, dan peningkatan rekonsiliasi masyarakat. Tantangan tambahannya adalah bahwa lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, dan program-program seringkali harus bekerja di sebuah lingkungan yang memiliki struktur politik dan sosial yang lemah, adanya persaingan kekuasaan, ketidakpastian dan rasa tidak aman. Program-program perlucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi (*Disarmament, Demobilization, Reintegration/DDR*) di Aceh harus dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki situasi keamanan dalam masyarakat yang pada akhirnya mengarah pada terciptanya perdamaian dan pembangunan. Kegagalan dalam menyelesaikan demobilisasi dan reintegrasi, dan kegagalan menciptakan reintegrasi berkelanjutan, dapat menghancurkan perdamaian karena mantan gerilyawan mungkin akan kembali menggunakan kekerasan sebagai cara yang mereka kenal untuk bertahan hidup.

Perlucutan senjata dan demobilisasi merupakan proses jangka pendek untuk memisahkan para gerilyawan dari senjata-senjata mereka dan struktur-struktur militer, sementara reintegrasi merupakan proses yang lebih rumit dan berjangka panjang. Proses tersebut membantu para bekas gerilyawan agar bisa kembali masuk ke dalam struktur sosial ekonomi komunitas di mana mereka berasal, atau komunitas-komunitas baru. Kunci keberhasilan DDR terletak pada integrasi tujuan-tujuan jangka pendek dan panjang ini sebagai bagian dari transisi konflik menuju perdamaian secara menyeluruh. Perlucutan senjata dan demobilisasi harus dapat menciptakan lingkungan yang aman dan stabil pada awalnya, namun keberlanjutan proses DDR tergantung pada prospek pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang bagi para mantan gerilyawan, warga sipil yang terkena dampak konflik, dan provinsi tersebut secara keseluruhan.

Tujuan spesifik sebuah proses DDR berbeda antara satu negara dengan negara yang lain dan harus dinyatakan secara eksplisit karena tujuan-tujuan itu akan menentukan bagaimana bentuk proses reintegrasi tersebut dan seberapa besar dana yang tersedia untuk reintegrasi. Beberapa tokoh mengajukan gagasan bahwa DDR hanya sebuah program yang berkaitan dengan faktor keamanan semata-mata dan mestinya dibatasi hanya pada soal tersebut. Meskipun demikian, apabila tujuan satu-satunya adalah keamanan, maka DDR hanya akan terbatas pada “mengeluarkan elemen-elemen yang memiliki potensi berbahaya dari masyarakat”. Dalam pendekatan tersebut, tentara anak-anak, ibu-ibu remaja, mantan gerilyawan yang cacat dan kelompok-kelompok lain yang secara potensial hanya sedikit mendapatkan ancaman kekerasan tidak akan mendapatkan perhatian dan dana yang diperlukan untuk mendukung proses reintegrasi mereka. Adalah sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara tujuan-tujuan keamanan dan sosial-ekonomi, yang harus dikaitkan dengan konteks sosial, politik dan ekonomi Aceh yang spesifik. Penting juga untuk mempertegas apa yang menjadi tujuan utama program DDR di Aceh dan memastikan bahwa militer, berbagai lembaga kemanusiaan, dan lembaga pembangunan, serta para donor akan memberikan kontribusinya untuk tujuan yang sama.

Mempromosikan Pekerjaan yang Layak

Secara umum dipahami bahwa reintegrasi ekonomi, dan mencari pekerjaan, adalah salah satu tantangan utama, dan juga faktor penentu keberhasilan DDR. Kondisi Aceh pasca konflik dan pasca tsunami ditandai oleh tingginya tingkat pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung, serta merosotnya kondisi ketenagakerjaan dan pendapatan yang tajam. Di sisi lain, Nota Kesepahaman menjanjikan kesempatan kerja untuk 3.000 mantan gerilyawan, 2.000 tahanan politik yang dibebaskan dan 25.000 warga sipil yang terkena dampak konflik bersenjata. Menciptakan lingkungan yang memungkinkan tersedianya lebih banyak pekerjaan yang lebih baik merupakan tantangan utama di Aceh. Hal ini memerlukan upaya yang luas dan terkoordinasi dari Pemerintah Indonesia, mitra-mitranya dan komunitas donor. Sesungguhnya, penciptaan kesempatan kerja harus menjadi inti dari sebuah strategi yang komprehensif untuk mencapai perdamaian yang abadi, termasuk strategi DDR untuk Aceh.

ILO mendefinisikan Pekerjaan yang Layak sebagai pekerjaan yang memenuhi aspirasi dasar orang-orang, bukan hanya untuk memperoleh pendapatan, tapi juga untuk menciptakan keamanan bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka, tanpa diskriminasi atau pelecehan.

Pekerjaan yang layak merupakan hak asasi manusia yang mendasar. Tetapi menjamin pekerjaan yang layak dan produktif bagi kaum laki-laki dan perempuan, dalam kondisi yang memungkinkan berlangsungnya kebebasan, keadilan sosial, keamanan dan martabat manusia, juga merupakan obat yang sangat manjur untuk meredakan ketegangan, perpecahan, dan keresahan sosial, ketidakstabilan dan konflik. Hal itu mengintegrasikan hak-hak penting yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menjadi produktif, keluar dari kemiskinan, dan membantu banyak keluarga dan komunitas mereka melakukan hal serupa. Dengan demikian, hal itu bisa menjadi landasan yang kuat untuk membangun perdamaian.¹⁴ Oleh karena itu, strategi reintegrasi untuk Aceh seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada upaya untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga pada penciptaan pekerjaan yang layak bagi mantan-mantan gerilyawan, warga sipil yang terkena dampak konflik dan seluruh pencari kerja di Aceh.

Mempromosikan kesetaraan dan standar-standar lain yang relevan

Hak asasi manusia dan standar-standar hukum sosial-ekonomi internasional merupakan soal penting, lebih dari sekedar sebuah “kemewahan” atau sebaliknya menjadi “pembatasan”. Upaya-upaya khusus dibutuhkan dalam kondisi pasca konflik, di mana berbagai soal seperti itu biasanya cenderung dikesampingkan oleh perhatian-perhatian dan prioritas-prioritas lain, padahal proses dan perlakuan yang adil merupakan kunci untuk mengurangi ketegangan dan mendorong pemulihan sosial-ekonomi dan politik. Standar-standar internasional harus diperkenalkan dan dimulai sejak tahap awal, ketika upaya penyelesaian konflik sedang dinegosiasikan, sebelum DDR itu sendiri dilaksanakan.

Meskipun terdapat banyak standar yang relevan untuk membangun kembali Aceh, Standar-standar Perburuhan Internasional dan beberapa instrumen hukum lain di bawah ini sangat berguna khususnya bagi proses reintegrasi ekonomi. Dalam intisari Pekerjaan yang Layak terdapat Deklarasi ILO mengenai Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja, yang diadopsi dengan mulus pada 1998 oleh negara-negara, organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja yang menjadi anggota ILO. Deklarasi tersebut merupakan inti dari Pekerjaan yang Layak. Keempat bidang inti dan konvensi-konvensi yang terkait erat dengan keempat bidang tersebut adalah:

- ♦ Kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk melakukan perundingan (Konvensi 87 dan Konvensi 98)
- ♦ Penghapusan berbagai bentuk kerja paksa dan kerja wajib (Konvensi 29 dan Konvensi 105)
- ♦ Penghapusan buruh anak yang efektif (Konvensi 138) dan Konvensi mengenai Bentuk-Bentuk Buruh Anak yang Terburuk¹⁵ (Konvensi 182)
- ♦ Penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan (Konvensi 100 dan Konvensi 111¹⁶).

Seluruh pemangku kepentingan dalam proses-proses DDR harus memiliki komitmen untuk melaksanakan dan menyokong prinsip-prinsip dan hak-hak dasar ini dalam kegiatan-kegiatan individual mereka dan di dalam organisasi mereka.

Standar Perburuhan Internasional lain yang relevan untuk DDR:

- ♦ Konvensi 107 Konvensi Penduduk Asli dan Masyarakat Adat, 1957 dan Konvensi 169 Konvensi Kaum Penduduk Asli dan Masyarakat Adat, 1989
Konvensi-konvensi ini khususnya relevan bagi mantan-mantan gerilyawan yang berasal dari penduduk asli dan masyarakat adat selain juga komunitas-komunitas asli dan masyarakat adat yang telah terkena dampak perang akibat pertempuran dan kehancuran di wilayah-wilayah mereka.
- ♦ Konvensi 117 Konvensi Kebijakan Sosial (Tujuan-tujuan dan Standar-standar Dasar), 1962
Konvensi yang punya cakupan luas ini dapat diterapkan baik bagi mantan gerilyawan maupun komunitas penerima. Konvensi ini meliputi “seluruh langkah yang harus diambil dalam upaya internasional, regional, dan nasional untuk mempromosikan perbaikan di bidang-bidang seperti kesehatan umum, perumahan, nutrisi, pendidikan, kesejahteraan anak, status perempuan, kondisi ketenagakerjaan, remunerasi orang-orang yang memperoleh upah dan produsen-produsen independen, perlindungan terhadap para pekerja migran, jaminan sosial, standar pelayanan publik dan produksi umum”.

14 Loretta de Luca: *Business and Decent Work in Conflict Zones. A “Why” and “How” Guide* (Geneva, ILO, 2003).

15 Konvensi 182 secara khusus menegaskan pelarangan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata.

16 Menerapkan Konvensi 111 dalam program DDR artinya menghindari “pembedaan, pengucilan ataupun penunjukkan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik, asal-usul bangsa atau sosial yang menghambat atau mencegah kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan atau jabatan”.

Reintegrasi sosial-ekonomi

Reintegrasi adalah proses di mana mantan gerilyawan (dan orang-orang yang bergantung pada mereka) memasuki kehidupan sipil dan bergabung kembali dengan masyarakat sipil melalui komunitas (baru atau lama) mereka. Karena itu, program-program reintegrasi harus menitikberatkan perhatian baik pada mantan gerilyawan maupun komunitas penerima. Penciptaan kesempatan kerja telah terbukti menjadi alat utama untuk mencapai keberhasilan, meskipun tetap menjadi suatu tantangan karena kapasitas penyerapan perekonomian lokal —yang hancur akibat perang— sangat terbatas. Hal itu harus dibarengi dengan berbagai upaya meningkatkan kemampuan kerja para bekas gerilyawan, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dari pekerjaan-pekerjaan yang diciptakan untuk mereka.

Penting juga dikemukakan bahwa semua mantan gerilyawan memiliki kesempatan mengembangkan identitas yang baru, yang tidak terkait dengan perang. Identitas sipil yang sehat dapat didorong melalui pelatihan kejuruan dan pekerjaan yang konstruktif, yang memberikan sumbangan bagi kesejahteraan individu dan komunitas. Kegiatan-kegiatan pelatihan dan kerja juga dapat memberikan kontribusi pada pembangunan kembali nilai, perilaku dan norma-norma yang mengatur dan memberi makna pada kehidupan keluarga dan masyarakat. Rehabilitasi psiko-sosial yang komprehensif tersebut bukan merupakan hal yang sederhana, tapi proses reintegrasi sosial-ekonomi yang terencana dan didanai dengan baik akan meningkatkan rasa percaya diri mantan tentara dan oleh karenanya bisa memberikan kontribusi terhadap kapasitas komunitas untuk meningkatkan pemulihan dan pembangunan sosial-ekonomi.

Sebagai tambahan, reintegrasi ekonomi memerlukan suatu komponen “komunitas penerima”, termasuk pemulihan perekonomian lokal, penciptaan lapangan pekerjaan dan pembangunan. Reintegrasi ekonomi merupakan fokus buku panduan ini, tetapi langkah-langkah tersebut perlu dilengkapi dengan komponen-komponen yang sifatnya lebih psiko-sosial seperti peningkatan kesadaran, rekonsiliasi, bantuan psikologis, dan lain-lain. Lebih jauh, program-program reintegrasi menawarkan kesempatan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan sosial tanpa mengabaikan suku, jender, kelompok kesehatan, atau kelompok usia apa pun. Berbagai program DDR memiliki potensi untuk membantu mengurangi rasa tidak aman manusia bagi para mantan gerilyawan dan masyarakat secara keseluruhan.

DDR Terpadu

Kerja sama dan koordinasi antar seluruh pemangku kepentingan nasional dan internasional sangat penting. Sebagai contoh, begitu cetak biru untuk proses DDR telah dinyatakan dalam Nota Kesempahaman, penting bahwa para aktor nasional, provinsi dan internasional yang bertanggung jawab untuk reintegrasi juga dilibatkan pada tahap yang sangat dini.

Berbagai keadaan darurat yang rumit membutuhkan respons yang lebih rumit lagi seperti misi pasukan perdamaian PBB atau Uni Eropa. Pengoperasian pasukan perdamaian kontemporer memiliki banyak sisi di mana DDR merupakan salah satu komponen dari mandat yang lebih luas untuk menjaga perdamaian, menciptakan perdamaian dan rekonstruksi. Dalam kondisi di Aceh dengan sebuah operasi misi perdamaian Uni Eropa, manfaatnya adalah bahwa dimungkinkan terciptanya koordinasi dan integrasi. Meskipun demikian, risikonya adalah bahwa proses DDR biasanya memerlukan proses lanjutan di luar dari kerangka waktu yang diberikan untuk misi tersebut. Tapi, risikonya adalah terjadinya sebuah periode reintegrasi yang terlalu singkat untuk dapat menjadi berkelanjutan. Inilah alasan lain mengapa Pemerintah Indonesia seharusnya memimpin proses tersebut.

Di tingkat internasional, perkembangan penting menuju kerja sama antar lembaga yang efektif adalah terbentuknya Kelompok Kerja Antar Lembaga untuk DDR (*Interagency Working Group on DDR /IAWG DDR*) pada tahun 2005 di mana ILO merupakan anggotanya. Kelompok ini telah mengembangkan Standar-Standar DDR Terpadu (*Integrated DDR Standards /IDDRS*)¹⁷ yang akan membantu menciptakan visi bersama, pendekatan, dan program-program DDR PBB yang terpadu.

Salah satu tantangan yang paling kompleks adalah bahwa komponen reintegrasi dalam program-program DDR harus dikaitkan dengan proses-proses pemulihan dan rekonstruksi sosial-ekonomi yang lebih luas. Memadukan DDR dengan rencana yang lebih luas untuk pemulihan dan rekonstruksi sosial-ekonomi Aceh memungkinkan pencapaian efek berganda (*multiplier effects*) ekonomi yang penting dan kapasitas-kapasitas yang dihasilkan untuk tujuan pembangunan yang lebih luas.¹⁸

Hal ini memerlukan keterpaduan antaraktor DDR dan seluruh organisasi pemulihan dan pembangunan yang ada di lapangan untuk memastikan bukan hanya diperlukan keberlanjutan skema-skema reintegrasi untuk mantan GAM, tetapi juga adanya dampak ekonomi dari prakarsa-prakarsa tersebut (misalnya, penciptaan lapangan kerja, pelatihan kejuruan, kredit mikro, dan lain-lain) yang dapat memberikan kontribusi pada proses revitalisasi dan pemulihan ekonomi

17 Panduan ini sejalan dengan standar-standar DDR terpadu

18 *Integrated DDR Standards*, op. cit.

yang lebih luas. Hal ini memberikan implikasi bahwa Pemerintah Indonesia akan menyusun sebuah mekanisme koordinasi yang efektif yang melibatkan seluruh kementerian yang terkait dengan reintegrasi, seperti ketenagakerjaan, pendidikan, pelatihan, perdagangan, infrastruktur, dan lain sebagainya.

Akhirnya, koordinasi dengan dan di kalangan donor telah terbukti penting. Jumlah anggaran untuk DDR harus ditentukan sejak awal. Proses DDR umumnya didanai dengan baik. Meskipun demikian, aspek-aspek reintegrasi yang berkelanjutan kerap kali dilupakan dalam kerangka finansial dan menerima bagian yang cukup kecil dari keseluruhan anggaran. Hal ini mengejutkan karena perlucutan senjata, demobilisasi dan “pembayaran kompensasi” hanya memperhatikan isu-isu logistik sementara reintegrasi yang berkelanjutan merupakan upaya yang lebih rumit, mahal, dan berjangka panjang, yang biasanya memakan waktu 2-5 tahun.

Selain itu, pengucuran dana DDR sering terlambat, menyebabkan pelaksanaannya tertunda. Berbagai penundaan ini bisa mengakibatkan beberapa program DDR dan seluruh proses perdamaian terancam hancur berantakan! Oleh karena itu, pertanyaan penting yang lain adalah bagaimana cara memastikan pengiriman dana yang tepat waktu untuk hal-hal yang bersifat mendesak, dan juga untuk upaya-upaya reintegrasi jangka panjang.

Waktu pelaksanaan aktivitas DDR

Faktanya adalah program-program DDR sering dipersiapkan secara terburu-buru dan tanpa koordinasi. Ada kecenderungan untuk duduk dan menunggu sampai proses perlucutan senjata dan demobilisasi selesai sebelum mulai bersiap menghadapi tantangan reintegrasi yang jauh lebih besar. Hal ini ternyata sangat tidak baik. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk dapat mulai membantu pemerintah, lembaga-lembaga di lapangan dan sektor swasta dalam proses persiapannya. Salah satu kegagalan dari banyak upaya DDR adalah bahwa proses perlucutan senjata dan demobilisasi telah diselesaikan terlebih dulu tanpa ada pilihan-pilihan reintegrasi riil yang dipersiapkan.

Mengembangkan kemampuan bekerja para mantan gerilyawan dan menciptakan lapangan kerja tidak dapat dilakukan dalam semalam. Mengadaptasi kembali pusat-pusat pelatihan kejuruan, yang meliputi memperbaharui tempat, melatih kembali para pelatih, dan lain sebagainya memakan waktu setidaknya 6 bulan, dan berbagai hal itu hanya dapat dimulai setelah dilakukan analisis pasar kerja secara serius, yang akan memakan waktu 3-6 bulan lagi. Mendorong sektor swasta, meningkatkan kapasitas penyerapan ekonomi komunitas dan seluruh isu yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Sebagian besar pekerjaan ini dapat dan harus dimulai sesegera mungkin. Terkait dengan masalah tersebut adalah kebutuhan untuk mendapatkan sumber daya guna memulai tahap persiapan ini.

Oleh karena itu, perencanaan dan juga persiapan untuk reintegrasi harus dimulai sedini mungkin. Penundaan dalam reintegrasi tidak akan menghasilkan apa-apa selain dari menghadapi para mantan gerilyawan —yang mungkin berbahaya tetapi juga rentan— dengan rasa frustrasi mereka yang semakin memuncak. Rasa frustrasi tersebut dapat dengan mudah mengarah pada perilaku kekerasan dalam komunitas-komunitas yang terkena dampak konflik di mana struktur sosialnya telah terganggu dan mereka mungkin menolak keberadaan para gerilyawan karena perilakunya, atau karena orang-orang itu menganggap para gerilyawan sebagai pesaing untuk mendapatkan pekerjaan, sumber daya, lahan, pelayanan, yang semakin sulit diperoleh. Sebuah periode penantian dalam proses reintegrasi harus dihindari dengan cara apapun, untuk mengurangi risiko pecahnya kekerasan yang baru.

2. Konteks Reintegrasi

Konflik bersenjata mengikis aset-aset produktif baik di pedesaan maupun perkotaan, dan pelaku ekonomi formal maupun informal. Konflik bersenjata menghancurkan tempat kerja dan memperlemah pasar kerja, pelatihan dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan ketenagakerjaan. Konflik bersenjata menghancurkan tanaman dan mungkin mengurangi produktivitas lahan melalui ranjau darat anti-personil. Konflik bersenjata juga mengakibatkan kerusakan yang cukup berarti terhadap infrastruktur fisik, sosial dan ekonomi, menghambat kesempatan kerja yang produktif, dan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Jaringan perdagangan terhambat dan investasi di sektor publik dan swasta menurun. Secara logis, kesempatan kerja pun berkurang. Selain itu, kondisi kerja cenderung menurun dan pelanggaran terhadap hak-hak pekerja dan potensi terjadinya praktik-praktik ketenagakerjaan yang tidak berkeadilan sosial mulai tumbuh. Ketidakstabilan ekonomi makro yang menjadi karakter konteks konflik dan pasca konflik terus membatasi kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Di Aceh, berbagai dampak ini kian berlipat ganda karena bencana tsunami.

Konflik juga mengganggu perekonomian lokal dan komunitas dalam banyak cara. Berbagai usaha lokal menderita karena terganggunya rantai pasokan, rusaknya infrastruktur ekonomi dan infrastruktur produktif (fasilitas pasar, gudang, air, komunikasi dan energi), perubahan dalam kepemilikan tanah, hilangnya pasar dan aset-aset produktif (peralatan, bahan baku, ternak, bengkel-bengkel yang hancur, dan lain-lain). Kurangnya investasi teknologi selama konflik menyebabkan mesin-mesin, perlengkapan dan peralatan produksi tidak dapat digunakan.

Selain itu, sesuatu yang biasanya terjadi di hampir setiap konflik adalah kurangnya kohesi sosial dalam komunitas. Dalam keadaan damai, kohesi sosial mendorong ekonomi. Kepercayaan, keterbukaan, pertukaran, kerjasama, dan koordinasi memungkinkan kegiatan ekonomi, mendorong kewirausahaan, dan menarik investor. Dalam situasi setelah konflik, kohesi sosial sering kali nyaris tidak dapat ditemukan. Konflik mengubah pola sosial dalam komunitas. Para pendatang baru (pengungsi, pengungsi lokal, gerilyawan), orang-orang yang kembali (termasuk mantan gerilyawan) dan korban-korban kejahatan seksual dan kejahatan-kejahatan perang lainnya memiliki kesulitan untuk mencari (kembali) tempat mereka dalam masyarakat. Selain itu, komunitas juga dapat terpengaruh oleh perginya kaum muda yang telah bergabung dengan kelompok bersenjata. Selain mengubah komposisi angkatan kerja lokal, disintegrasi juga menghambat pertukaran dan hubungan ekonomi. Orang-orang tidak akan melakukan kegiatan yang melebihi kegiatan untuk bertahan hidup tanpa kepercayaan akan masa depan yang lebih baik. Konsekuensinya, para wirausahawan memerlukan modal investasi yang penting, keterampilan-keterampilan teknologi baru, dan perlu mengadopsi metode-metode produksi baru untuk memperoleh daya saing kembali, apabila secara alamiah sektor perekonomian di mana mereka beroperasi masih merupakan pilihan yang memungkinkan.

Banyak masyarakat pasca konflik yang harus menghadapi sejumlah besar mantan gerilyawan yang cukup potensial, tapi juga memiliki kerentanan ekonomi dan sosial yang tinggi. Rasa keterasingan dan keterpinggiran orang-orang yang frustrasi yang tidak memiliki pekerjaan ini akan menghasilkan —dalam banyak kondisi pasca konflik— perilaku kekerasan, kenakalan remaja dan rekrutmen (kembali) untuk masuk ke *gang*, kelompok bersenjata, dan pasukan bersenjata. Jika tidak ditangani dengan baik, perilaku-perilaku ini dapat menghancurkan keadaan damai yang masih cukup rapuh.

Karena itu, program-program Perlucutan Senjata, Demobilisasi dan Reintegrasi (DDR) acap kali merupakan program pertama yang dilaksanakan di negara-negara yang baru keluar dari konflik bersenjata dalam rangka untuk menciptakan tingkat keamanan dan stabilitas yang dibutuhkan bagi proses pemulihan dan pembangunan. Tantangan-tantangannya antara lain adalah: menemukan dan menciptakan lapangan kerja bagi mantan gerilyawan dalam perekonomian yang telah terkena dampak konflik yang parah, melayani kelompok sasaran tersebut sambil menyeimbangkannya dengan bantuan kepada kelompok-kelompok lain yang terkena dampak perang, dan menerapkan program-program tersebut kepada masyarakat yang memiliki ketegangan sosial yang tinggi, penduduk yang mengalami trauma dan sering kali kebencian atau rasa tidak percaya kepada para gerilyawan.

Saat ini, program-program pemulihan pasca konflik tidak cukup menekankan pada soal-soal ketenagakerjaan dan peningkatan kemampuan kerja. Sementara itu, pada saat yang bersamaan, proses rekonstruksi dan pemulihan Aceh memerlukan banyak orang yang terampil. Perencanaan, rancangan dan penyampaian bantuan reintegrasi, yang merespon

kondisi mantan gerilyawan dan permintaan pasar kerja telah terbukti rumit. Lingkungan yang tidak stabil, kurangnya informasi pasar kerja yang sistematis dan dapat diandalkan, serta jumlah dan kapasitas penyedia pelatihan dan lembaga-lembaga pasar kerja yang lain merupakan sebagian dari tantangan-tantangan utama yang ada bagi program (re)integrasi sosial-ekonomi.

Meskipun demikian, kegagalan dalam menangani berbagai tantangan ketenagakerjaan DDR yang sangat besar kemungkinan akan memperlemah keberlanjutan perdamaian. Kapasitas penyerapan tenaga kerja yang rendah dalam sebuah perekonomian pasca konflik dan terbatasnya kesempatan yang tersedia bagi mantan gerilyawan merupakan tantangan bagi program reintegrasi. Komplikasi tambahan lainnya adalah kurangnya keterampilan dan pengalaman para mantan gerilyawan tersebut, yang menempatkan mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam bersaing untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan baru yang tersedia. Umumnya, tidak terdapat solusi yang mudah, dan tidak ada satu sektor besar pun yang dapat menyerap seluruh pencari kerja para mantan gerilyawan ini.

Yang diperlukan adalah pendekatan yang koheren dan tepat waktu, dengan seperangkat kebijakan dan langkah-langkah yang akan menempatkan ekonomi dan masyarakat menuju pertumbuhan, pembangunan dan perdamaian yang menyeluruh. Penekanan lebih besar dibutuhkan untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal dan meningkatkan kemampuan kerja orang-orang. Terutama para bekas gerilyawan yang harus dibekali untuk dapat menjadi bagian dari proses rekonstruksi dan pembangunan perdamaian. Sementara para gerilyawan yang didemobilisasi itu membutuhkan pendapatan alternatif yang bersifat segera, reintegrasi sosial-ekonomi yang berkelanjutan bagi para mantan gerilyawan tersebut adalah sebuah proses jangka panjang, serta banyak waktu dan sumber daya yang harus diinvestasikan untuk hal tersebut.

Meskipun dampak konflik-konflik bersenjata yang menghancurkan telah diketahui, transisi dari situasi konflik menuju perdamaian juga menawarkan peluang untuk memutus mata rantai ketidaksetaraan sosial dan membawa perubahan baru dan positif. Salah satu tujuan bantuan internasional seperti DDR adalah harus dapat membantu terciptanya masyarakat yang lebih setara, di mana seluruh kelompok politik, etnis, usia dan jender dapat menemukan tempat mereka masing-masing dan mereka juga merasa terwakili.

Selain itu, kebutuhan dapat mendorong orang untuk menghasilkan strategi bertahan yang inovatif. Misalnya, kaum perempuan dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan kewirausahaan atau mengambil pekerjaan yang sebelumnya secara tradisional hanya untuk kaum laki-laki; para pengungsi yang kembali ke negara asal mereka dengan membawa keterampilan-keterampilan baru, pengalaman profesional dan jejaring yang mereka bangun di negara tuan rumah. Investasi pasca konflik dapat memungkinkan "lompatan" di jalur inovasi teknologi; yaitu pada saat setelah sebuah periode di mana investasi tidak masuk, para wirausahawan dapat melompati beberapa teknologi menengah tertentu dan langsung memperoleh teknologi terbaru yang paling baik. Hal ini juga berlaku bagi investasi swasta dan publik yang besar.

Akhir dari sebuah konflik juga merupakan suatu periode yang subur untuk membawa lebih banyak reformasi ekonomi dan sosial yang radikal yang menangani beberapa sumber penyebab konflik seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, atau pengangguran. Proporsi penduduk yang besar juga akan bisa mendukung pelaksanaan tindakan yang kuat jika diterapkan secara transparan dan akuntabel. Berbagai kebijakan untuk membangun (kembali) pasar kerja dapat, misalnya, memainkan peran penyembuh berbagai penyakit sosial dengan melibatkan peraturan perundang-undangan perburuhan yang menjamin perlakuan yang berkeadilan sosial bagi para pekerja.¹⁹ Berbagai peluang untuk membangun masyarakat yang lebih stabil, damai dan adil terlalu sayang untuk dilewatkan.

DDR dalam konteks pembangunan perdamaian dan rekonstruksi

Proses reintegrasi di Aceh harus menghadapi berbagai isu darurat serta isu-isu pembangunan karena proses tersebut meliputi kedua bidang tersebut. Selain itu, proses tersebut harus menjembatani kesenjangan antara program tanggap darurat yang bersifat jangka pendek dan pembangunan jangka panjang, suatu tantangan yang telah diketahui dengan baik dalam proses-proses rekonstruksi pasca konflik. Tujuan-tujuan pembangunan jangka panjang oleh karenanya harus telah tercermin dalam pendekatan darurat yang berjangka pendek.

Pembangunan kapasitas struktur-struktur nasional, provinsi, dan di tingkat lokal merupakan kunci untuk menjamin keberlanjutan. Akhirnya, layanan-layanan yang dibutuhkan untuk merespon kebutuhan-kebutuhan langsung para mantan gerilyawan, harus diorganisasikan sedemikian rupa sehingga layanan-layanan itu akan tersedia bagi kelompok-kelompok lain di masa depan. Misalnya, apabila kementerian dan departemen yang bertanggungjawab atas ketenagakerjaan dan pelatihan diperkuat di bawah program DDR, mereka akan dapat menyediakan layanan untuk semua pencari kerja muda di masa depan.

19 *Date-Bah: Crises and Decent Work, op. cit*

Program reintegrasi harus mempromosikan dialog sipil yang luas antara pemerintah, para aktor di sektor keamanan, GAM, masyarakat sipil, sektor swasta dan aktor-aktor kemanusiaan dan pembangunan internasional. Berdasarkan analisis yang menyeluruh, dana untuk DDR juga harus digunakan untuk menanggapi beberapa sumber penyebab konflik melalui dialog sosial, yang menjamin semua pihak bisa menyuarakan kepentingannya dan mereka merasa terwakili. Tantangan utamanya adalah untuk menyediakan bantuan reintegrasi sesegera mungkin kepada para mantan gerilyawan dan untuk menjamin bahwa bantuan tersebut akan memiliki dampak positif yang permanen terhadap komunitas.

Mantan gerilyawan versus kelompok lain yang terkena dampak perang²⁰

Sebelum menentukan mantan gerilyawan sebagai penerima manfaat program, Pemerintah Indonesia harus mempertanyakan apakah langkah itu akan meningkatkan reintegrasi jangka panjang mereka dan memberikan kontribusi pada pembangunan perdamaian. Karena dananya terbatas, muncul perdebatan di setiap program DDR seputar pertanyaan apakah harus ada program yang khusus untuk para mantan gerilyawan saja atau tidak, padahal kelompok-kelompok yang lain dalam masyarakat mungkin sama, atau bahkan lebih, membutuhkan bantuan.

Mantan gerilyawan dapat memainkan peran kritis, baik positif maupun negatif, dalam pembangunan perdamaian pasca konflik. Mereka biasanya mudah frustrasi ketika menghadapi penundaan dalam mendapatkan manfaat demobilisasi atau akibat kurangnya pelatihan dan kesempatan kerja, terutama dalam periode yang rapuh segera setelah konflik berakhir, dan mereka biasanya dapat dengan mudah memutuskan mengangkut senjata mereka kembali. Oleh karena itu, banyak yang setuju bahwa mantan gerilyawan harus menjadi target terpisah, terutama pada masa pascakonflik.

Meskipun demikian, seperti diperlihatkan oleh pengalaman-pengalaman DDR sebelumnya, fokus yang semata-mata eksklusif pada mantan gerilyawan dapat menimbulkan rasa frustrasi di kalangan orang lain yang sama-sama terkena dampak konflik tersebut. Selain itu, opini publik sering kali tidak bisa menerima pemberian prioritas absolut bagi mantan gerilyawan seperti itu. Akhirnya, hal itu malah dapat memberikan dampak negatif terhadap reintegrasi dalam jangka panjang, karena tidak mendorong terjadinya perubahan identitas. Dengan demikian, strategi reintegrasi untuk Aceh harus mempertimbangkan pengalaman-pengalaman ini dan berusaha memperluas cakupan program dengan merespon kebutuhan mantan gerilyawan bersamaan dengan kebutuhan-kebutuhan kelompok-kelompok lain yang terkena dampak konflik dan tsunami. Menjadikan mantan gerilyawan dan penduduk lain yang terkena dampak perang sebagai target bersama-sama dalam satu proyek/program telah berhasil mengurangi rasa tidak percaya dan meningkatkan toleransi antara kelompok-kelompok yang terkena dampak konflik, dan oleh karenanya mendukung proses rekonsiliasi dan reintegrasi.

Masalah dari pendekatan yang terbuka ini adalah, dengan keterbatasan dana yang ada, terdapat risiko bahwa hanya sebagian kecil mantan gerilyawan yang akan menerima bantuan, menyisakan sejumlah besar gerilyawan yang ada di masyarakat tidak terlayani. Sementara bagi donor, pilihan mereka sering kali ditujukan untuk program-program yang ditargetkan secara sempit, yang lebih langsung, tidak terlalu mahal, tidak terlalu rumit dan dengan hasil yang lebih mudah diukur.

Solusi untuk dilema ini dapat diperoleh dengan merancang program-program sasaran yang pasti akan bermanfaat bagi kelompok sasaran yang lebih luas. Hal ini dapat dicapai dengan lebih menitikberatkan pada pembangunan kapasitas lokal yang bertahan lama. Memberikan bantuan reintegrasi kepada mantan gerilyawan melibatkan banyak aktor lokal seperti pusat-pusat pelatihan kejuruan, kantor-kantor ketenagakerjaan, penyedia layanan kesehatan mental, lembaga-lembaga kredit, kementerian-kementerian kunci seperti kementerian perburuhan, kementerian kepemudaan, serta aktor-aktor nasional besar lain. Program DDR harus memperkuat kapasitas aktor-aktor lokal ini dalam menyesuaikan dirinya dengan tantangan-tantangan pasca konflik. Jika bantuan bagi mantan gerilyawan dalam program sasaran digunakan untuk mengembangkan kapasitas reintegrasi nasional, penyedia layanan kemudian harus dapat menyampaikan bantuan ini kepada kelompok-kelompok lain yang terkena dampak perang dan akhirnya kepada para pencari kerja pada umumnya. Tidak ada kerugian yang akan timbul dengan melayani para mantan gerilyawan terlebih dahulu.

Pada umumnya, penting untuk diingat bahwa pendefinisian kelompok sasaran selama fase perlucutan senjata dan demobilisasi memiliki dampak langsung pada cara fase reintegrasi tersebut akan dilaksanakan dan cara program diterima oleh para mantan gerilyawan dan penduduk pada umumnya. Proses pendefinisian dan penargetan ini merupakan proses yang rumit dan memiliki dimensi politik yang kuat. Sulit untuk memberikan panduan generik mengenai apakah Aceh harus mengadopsi target yang sempit atau pendekatan yang terbuka. Hal ini harus ditentukan sesuai kondisi lokal, termasuk pertimbangan-pertimbangan politik, ekonomi dan sosial budaya, dan juga janji-janji yang terdapat dalam Nota Kesepahaman.

²⁰ Specht: *Jobs for Rebels and Soldiers*, op. cit, pp. 95-97; Specht /Empel: *Enlargement*, op. cit.

Integrasi ekonomi dan perhatian pada soal keamanan

Program-program DDR biasanya dijalankan dalam konteks keamanan yang sangat menegangkan, karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan serta menjaga ketertiban dan stabilitas di negara-negara yang terkena dampak konflik biasanya lemah. Karena itu, program-program DDR pada umumnya kekurangan alat-alat untuk menegakkan aturan karena tidak adanya angkatan kepolisian lokal pada saat DDR dilaksanakan. Hal ini jelas memiliki konsekuensi-konsekuensi yang sangat serius dalam pemberian bantuan reintegrasi. Salah satu contohnya adalah mengenai usaha kecil yang merupakan salah satu target pertama bagi kelompok-kelompok dan *gang-gang* bersenjata. Tanpa adanya beberapa tingkat keamanan lokal, tidak masuk akal jika para mantan gerilyawan dibantu untuk memulai bisnis mereka sendiri. Mungkin lebih baik menyelesaikan Reformasi Sektor Keamanan (*Security Sector Reform /SSR*) terlebih dahulu sebelum memulai DDR, meskipun hal ini jarang terjadi.

Menetapkan tingkat minimal penegakan hukum dan keamanan merupakan hal yang penting untuk menghidupkan kembali perekonomian lokal. Apabila dibiarkan begitu saja, hal itu akan menimbulkan kekerasan dan pencurian, serta perlu ditangani melalui penegakan hukum. Para pekerja harus dapat pergi ke tempat kerja mereka tanpa rasa takut atas keselamatan mereka, dan bekerja dengan rasa aman. Para petani dan komunitas usaha memerlukan pengangkutan barang yang aman dan tepat waktu, tanpa ada pemblokiran jalan yang tidak terduga dan "pajak" yang dikenakan oleh kelompok-kelompok bersenjata. Penghargaan terhadap hukum juga memberikan kontribusi dalam membangun rasa percaya di antara para penanam modal dan usaha-usaha lokal, nasional dan internasional. Keamanan dapat meningkatkan rasa percaya di masa kini dan di masa depan, dan karena itulah diharapkan bisa muncul kesediaan untuk menanamkan modal secara lokal.

Meskipun berdasarkan sifat-sifat alami yang ada pada dirinya, program-program DDR cenderung, memberikan kontribusi pada sejumlah masalah keamanan, program-program itu tidak secara otomatis mencakup seluruh spektrum permasalahan keamanan manusia. *United Nations Development Program* (UNDP) memperkenalkan konsep keamanan manusia dalam Laporan Pembangunan Manusia - Human Development Report 1994,²¹ sebagai sebuah alternatif yang lebih menyeluruh terhadap konsep militer mengenai keamanan fisik. Keamanan manusia meliputi tujuh kebutuhan dasar manusia: keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan komunitas, dan keamanan politik. Penting untuk memastikan bahwa pemberian bantuan reintegrasi kepada mantan gerilyawan dan komunitas mereka, akan bisa merespon keseluruhan spektrum dimensi keamanan manusia. Mantan gerilyawan membutuhkan alternatif-alternatif yang menjanjikan dibandingkan dengan kehidupan militer mereka sebelumnya, termasuk pekerjaan yang layak, badan dan pikiran yang sehat dan rasa kebanggaan terhadap apa yang telah mereka lakukan.²² Selain itu, mereka perlu memiliki hak suara dan merasa terwakili di masyarakat yang baru.

21 UNDP: *Human Development Report*, 1994.

22 Specht: *Jobs for Rebels and Soldiers*, op. cit.

3. Tantangan-Tantangan Reintegrasi Ekonomi

Mengatasi tantangan-tantangan ketenagakerjaan

Kapasitas penyerapan pasar tenaga kerja

Sebuah tantangan besar adalah untuk mendapatkan dan menciptakan lebih banyak pekerjaan yang lebih baik; pekerjaan yang layak bagi para mantan gerilyawan dalam perekonomian yang terkena dampak konflik secara serius dan sebagian juga terkena dampak bencana tsunami.

Karena biasanya proporsi kaum muda merupakan bagian terbesar di negara-negara yang dilanda konflik, dibutuhkan *lebih banyak* lapangan kerja untuk mengakomodasi sejumlah besar kaum muda yang baru memasuki pasar kerja di atas jumlah pengangguran dan pengangguran terselubung yang ada. Sementara banyaknya angkatan kerja mungkin merupakan aset dalam perekonomian di mana terdapat pula investasi modal yang besar, tidak demikian halnya dengan sebagian besar perekonomian yang terkena dampak konflik.

Periode konflik yang berkepanjangan menyebabkan kerusakan infrastruktur ekonomi dan sosial yang tersebar luas. Karena kelangkaan lapangan kerja di sektor ekonomi formal, banyak orang yang hanya bisa menemukan pekerjaan di sektor informal dan menghadapi kondisi kerja yang kurang ideal. Kendati begitu, kini kemampuan sektor ekonomi informal—yang biasanya mampu menyerap dan menyediakan kesempatan kerja bagi sejumlah orang yang terus bertambah, terutama kaum muda—telah menurun tajam. Situasi awal biasanya memiliki ciri-ciri adanya kelebihan pasokan tenaga kerja dalam kaitannya dengan lapangan kerja yang tersedia.

Kualitas pekerjaan pun ikut menurun. Lemahnya tata pemerintahan menyebabkan kurangnya aturan-aturan mengenai pasar kerja, yang pada gilirannya menciptakan potensi terjadinya praktik-praktik ketenagakerjaan yang tidak berkeadilan sosial. Kondisi kerja memburuk, mengancam kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja, benar-benar merendahkan hak-hak mereka sebagai pekerja dan kapasitas mereka untuk mendapatkan upah yang layak, dan pelanggaran buruh anak meningkat.

Saat ini memang tidak realistis mengharapkan masuknya investasi modal dan kesempatan kerja baru dengan cepat di Aceh, tapi beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mempromosikan kesempatan kerja dapat dan harus diambil secepat mungkin setelah konflik berakhir sekarang. Penduduk harus dibantu mengadakan atau menciptakan kegiatan-kegiatan baru yang menghasilkan pendapatan. Mantan gerilyawan, mantan tawanan dan warga sipil yang terkena dampak konflik segera membutuhkan pekerjaan. Meskipun keajaiban tidak dapat diharapkan dari sebuah perekonomian yang hancur akibat perang, upaya-upaya yang besar untuk menciptakan lapangan kerja harus dimasukkan ke dalam program DDR.

Penciptaan kesempatan kerja dalam perekonomian yang hancur akibat perang

Penciptaan kesempatan kerja merupakan cara utama untuk memfasilitasi reintegrasi sosial ekonomi mantan gerilyawan. Namun, pentingnya upaya penciptaan kesempatan kerja dalam situasi pasca konflik melalui seluruh prakarsa ekonomi mikro dan makro yang tersedia sering kali tidak diindahkan. Reformasi politik, pemilihan umum yang demokratis dan/atau perlucutan senjata para gerilyawan dengan cepat terkadang menjadi prioritas, sementara berbagai pertimbangan agar penduduk yang terkena dampak perang dapat bertahan hidup secara ekonomi sering dilupakan.

Meskipun demikian, ada beberapa peluang tercapainya stabilitas politik dan keamanan walaupun penciptaan kesempatan kerja belum menjadi prioritas, yaitu melalui proyek-proyek pekerjaan umum berbasis tenaga kerja (*labour-intensive*), pelatihan keterampilan dan pengembangan perusahaan kecil. Selain menyediakan pendapatan, kesempatan kerja yang sangat bermakna adalah, sampai pada suatu titik, menjadi jaminan pembangunan sosial, rehabilitasi pasca konflik dan kehidupan komunitas yang sehat, serta stabilitas politik dan keamanan nasional. Jika kesempatan-kesempatan kerja tidak diciptakan, program-program DDR akan gagal.

Kapasitas para pelaku pasar kerja

Para pelaku pasar kerja, baik publik maupun swasta, biasanya cukup menderita akibat konflik. Lembaga-lembaga pemerintah yang tersisa sedikit yang mampu memberikan dukungan yang komprehensif kepada komunitas usaha publik dan swasta yang ada di lingkungan mereka. Dalam banyak kasus, Departemen Tenaga Kerja, Keuangan, Industri, Perdagangan, Komunikasi, Transportasi, dan lain sebagainya harus dibangun kembali dan didukung oleh personil yang baru dan kurang berpengalaman. Kurangnya dana untuk pelayanan pemerintah, terutama di bidang pendidikan, merupakan hambatan yang sangat besar bagi DDR dan rekonstruksi pasca konflik.

Pengusaha-pengusaha swasta berjuang dalam kondisi ketidakpastian politik dan risiko tinggi yang timbul dalam lingkungan pasca konflik yang meruntuhkan pengembangan sektor swasta dengan mengacaukan sistem produksi dan perdagangan, serta menciptakan ketidakamanan dan menyebabkan penduduk mengungsi. Sebagai contoh, di wilayah di mana intensitas konflik tinggi, kebanyakan perusahaan kecil dan mikro tidak beroperasi.

Penyedia pelatihan kejuruan yang ada biasanya kekurangan sumber daya, pelatih, fasilitas dan kapasitas organisasional untuk menyerap puluhan ribu peserta didik yang potensial. Dalam rangka untuk memuaskan permintaan yang bersifat segera, lembaga-lembaga pelatihan dalam berbagai kualitas bermunculan. Khususnya, kurangnya pelatih-pelatih yang berkualitas —yang dapat meningkatkan kemampuan kerja murid-murid mereka secara efektif dan membuat mereka mampu menghadapi dunia kerja— membatasi peluang para siswa untuk mendapatkan pekerjaan yang menguntungkan. Hal ini terbukti telah menjadi hambatan yang besar dalam proses DDR. Dalam banyak kasus, seperti Aceh, penting untuk meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas penyedia pelatihan kejuruan.

Arus informasi pasar kerja (*labour market information/LMI*) yang baik menjadi kebutuhan yang kuat bagi seluruh aktor pasar kerja, termasuk pemerintah, dunia usaha, organisasi pekerja dan organisasi pengusaha, serta penyedia pelatihan kejuruan. Dalam banyak konteks DDR, arus informasi pasar kerja sangat tidak memadai pada masa pra-konflik. Lebih lanjut lagi, karena kehancuran dan hilangnya sumber daya manusia, LMI pasca konflik sangat sulit diperoleh dan sangat sulit disebarkan kepada para aktor pasar kerja. Pasar kerja telah berubah secara dramatis karena perang dan akan tetap dinamis untuk jangka waktu yang panjang karena pergerakan penduduk. Walaupun demikian, LMI merupakan kunci untuk memandu mantan gerilyawan dan mereka yang terkena dampak perang untuk memperoleh pekerjaan atau kesempatan memulai usaha. Dengan perubahan permintaan atas tenaga kerja terampil, seperti melalui kesempatan kerja yang muncul akibat adanya rekonstruksi fisik dan dimulainya kembali kegiatan-kegiatan ekonomi, LMI juga penting dalam upaya mengadaptasi tawaran pelatihan yang ada. Oleh karenanya, pengembangan atau pengembangan kembali struktur struktur nasional dan provinsi untuk pengumpulan LMI merupakan titik awal yang penting untuk merancang program reintegrasi sosial ekonomi.

Sebagai tambahan dari pengumpulan informasi, kapasitas untuk menyelaraskan mantan gerilyawan dan warga sipil yang terkena dampak perang pada pekerjaan-pekerjaan yang tersedia telah terbukti rumit. Mantan gerilyawan sudah sering berada di luar masyarakat selama bertahun-tahun dan memiliki kesulitan untuk mencari jalan mereka dalam ruang-ruang pelayanan dan organisasi sipil. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas untuk penyebaran informasi memiliki prioritas yang tinggi dalam program-program reintegrasi. Penyedia layanan ketenagakerjaan, apabila terdapat di dalam masyarakat pra-konflik, kebanyakan tidak beroperasi setelah konflik. Itu sebabnya, program-program DDR harus berinvestasi dalam memulai (kembali) kapasitas ini yang dapat membangun jembatan yang penting antara para pencari kerja dan kesempatan-kesempatan kerja yang ada. Layanan-layanan atau pendekatan-pendekatan baru mungkin harus ditetapkan apabila sebelumnya tidak terdapat pelayanan atau apabila layanan yang ada kurang memadai. Mengakui bahwa Layanan Ketenagakerjaan Masyarakat merupakan elemen yang penting dalam ekonomi yang sedang tumbuh, tantangan untuk program-program DDR adalah **membangun kembali layanan-layanan ini secara berkelanjutan**, membuatnya tersedia bagi para mantan gerilyawan, dan juga pencari kerja yang lain. Layanan-layanan ini, publik dan swasta, penting untuk menjamin arus informasi dan dapat menjadi pijakan awal bagi mantan gerilyawan untuk memperoleh informasi mengenai kesempatan kerja, kesempatan berusaha, dan juga kesempatan belajar yang akan meningkatkan kemampuan kerja mereka.

Kemampuan kerja mantan gerilyawan

Dalam suatu pasar kerja yang sangat ketat, mantan gerilyawan biasanya berada dalam posisi yang kurang diuntungkan dalam persaingan untuk memperebutkan sedikit kesempatan kerja yang tersisa. Selain dari kurangnya pendidikan dan keterampilan kejuruan dan keterampilan kerja yang relevan, banyak di antara mereka yang belum terbiasa dengan gaya hidup sipil mereka yang baru. Kebiasaan untuk memperoleh uang tunai secara cepat dan mudah, perkelahian, pengakuan, status sebagai gerilyawan dan mungkin juga mereka telah menjadi pecandu obat-obatan, membuat mereka mungkin tergodanya untuk kembali ke rutinitas yang lama.

Banyak komunitas yang juga menolak menerima para mantan gerilyawan karena citra kekerasan yang mereka tampilkan selama konflik. Tergantung pada kebiasaan-kebiasaan dan tradisi-tradisi pra-peperangan, dan mungkin karena pengalaman-pengalaman di masa perang (mengenakan pajak, merampas barang, memperkosa, menculik, dan lain-lain), mantan gerilyawan terkadang ditolak oleh penduduk sipil. Sama halnya dengan para pengusaha yang mungkin enggan mempekerjakan mantan gerilyawan, takut akan publisitas yang buruk terhadap usaha mereka. Terkadang, mantan

gerilyawan yang menyandang cacat karena pertempuran juga didiskriminasi atau diabaikan oleh keluarga mereka karena dianggap sebagai beban bagi komunitas, yang sering kali memang sudah miskin.

Maka, jika program-program reintegrasi hendak meningkatkan kemampuan kerja para mantan gerilyawan ini, berbagai program itu harus mampu membawa perubahan dalam hal perilaku dan sikap, baik di kalangan mantan gerilyawan dan komunitas-komunitas mereka. Memang benar bahwa kelompok sasaran ini biasanya membutuhkan peningkatan keterampilan dan bantuan psikologis untuk berubah dari anggota militer menjadi anggota masyarakat sipil, tetapi para pengusaha dan masyarakat secara keseluruhan sering kali menganggap enteng potensi mantan gerilyawan dan peran perilaku positif yang bisa menjadikan mereka dapat memainkan peran dalam mencapai perubahan.

Profil pendidikan dan keterampilan mantan gerilyawan

Mantan gerilyawan cenderung kurang diuntungkan dalam kompetisi yang keras untuk mendapatkan pekerjaan yang semakin langka. Kelompok ini pada umumnya terdiri dari kaum muda dengan potensi fisik yang sedang berada pada puncaknya. Karena waktu yang mereka habiskan di GAM, banyak di antara mereka yang belum memiliki keterampilan-keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan sipil dan di dunia kerja. Di sisi lain, mereka terbukti sangat efektif dalam membangun jalan, jembatan, rumah sakit, dan dalam pekerjaan-pekerjaan untuk mengubah tempat-tempat militer untuk digunakan oleh masyarakat sipil. Mereka sering memperlihatkan disiplin yang tinggi, semangat dalam kelompok/tim, dan kesetiaan, membuat mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas yang sulit sebagai suatu kelompok.

Kehidupan mantan gerilyawan yang sebelumnya dalam pasukan tempur tidak boleh dikesampingkan. Ketika hendak membantu mereka mengidentifikasi pelatihan dan kesempatan-kesempatan kerja, penting untuk memiliki pemikiran yang terbuka, mempertimbangkan ambisi-ambisi mereka, rasa frustrasi dan potensi mereka, dan mengenali keterampilan-keterampilan yang mereka pelajari selama dan sebelum masa ketika mereka masih terlibat dalam peperangan.

Mempertimbangkan kebutuhan mendesak untuk memperoleh pelatihan keterampilan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, sering kali kapasitas untuk memberikan pelatihan dalam jangka pendek terhadap ribuan mantan gerilyawan, serta para pengungsi dan pengungsi lokal yang kembali pulang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sangat kurang. Penyedia pelatihan biasanya bergantung pada sumber daya yang langka dan bergantung pada dana dari donor. Dalam konteks ini, penting untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan, antara lain melalui kursus-kursus pelatihan untuk pelatih (*training of trainers*) dan pasokan materi-materi pelatihan (peralatan, perlengkapan, buku petunjuk). Peluang untuk mencoba bekerja di tempat yang nyata bisa dilakukan melalui sistem tradisional tetapi informal, antara lain melalui sistem magang. Jenis-jenis kursus yang disediakan harus merespon pasar lokal dan mesti mempertimbangkan faktor-faktor lokal seperti ketersediaan bahan baku, akses pasar, daya beli komunitas, dan teknologi yang memadai.

Secara keseluruhan, profil pendidikan dan keterampilan harus didasarkan pada situasi khusus dan konteks individual. Para penyedia pelatihan harus kreatif dalam menawarkan keterampilan-keterampilan baru yang belum ada di pasar, karena bagi para pencari kerja muda dan belum berpengalaman ini persaingan akan sangat keras.

Ambisi, rasa frustrasi dan potensi gerilyawan

Profil pendidikan dan keterampilan para mantan gerilyawan hanya menggambarkan sebagian kecil citra identitas mereka, mengabaikan faktor-faktor seperti ambisi, rasa frustrasi dan potensi mereka. Bahkan jika pun kebutuhan dasarnya terpenuhi, persepsi dan pengalaman individual mantan gerilyawan akhirnya akan menentukan apakah ia “memilih” untuk bertempur atau tidak. Oleh karena itu, penting untuk memahami apa yang ingin dicapai para mantan gerilyawan dalam kehidupan mereka di luar dari keinginan untuk segera memperoleh penghidupan.

Dengan demikian, program-program reintegrasi harus familiar dengan berbagai jenis situasi yang dapat menyebabkan para mantan gerilyawan frustrasi dan akhirnya marah. Karena mereka terbiasa mengekspresikan perasaan ketidakpuasan mereka dengan cara-cara kekerasan. Rasa frustrasi yang muncul akibat penundaan bantuan reintegrasi yang terlalu lama, misalnya, harus dihindari.

Selain itu, program penyadaran akan perlunya perlucutan senjata dan demobilisasi tidak boleh memunculkan harapan-harapan atas bantuan reintegrasi yang tidak dapat dipenuhi. Beberapa program ini telah begitu terobsesinya dengan target untuk menarik senjata sebanyak-banyaknya, sehingga mereka membuat janji-janji yang tidak masuk akal kepada mantan gerilyawan, termasuk pelatihan kejuruan segera mungkin untuk semuanya. Karena terdapat banyak kemungkinan, terutama dalam jangka pendek, mantan gerilyawan segera menjadi frustrasi dan memiliki kemungkinan yang besar untuk kembali terlibat dalam kekerasan. Bagian dari proses reintegrasi sosial ini dapat terdiri dari pengajaran kepada mantan gerilyawan mengenai bagaimana cara mereka menghadapi rasa frustrasi dan konflik secara konstruktif, berbagai pemicu rasa frustrasi yang potensial harus dihindari.

Akhirnya, potensi negatif dan positif mantan gerilyawan tidak dapat hanya disimpulkan dari indikator pendidikan dan keterampilan biasa. Mereka mungkin telah memperoleh keterampilan dalam soal-soal seperti kepemimpinan, manajemen, mengemudi, bangunan, logistik, sumber daya manusia, manajemen risiko, yang tidak tergambar dalam catatan mereka. Sebaliknya, mereka juga mungkin memiliki potensi negatif, seperti pola pikir balas dendam, kecanduan obat-obatan, atau kurangnya keterampilan-keterampilan sosial, yang juga tidak tampak dalam profil pendidikan dan keterampilan mereka. Program-program reintegrasi harus mengenali keseluruhan dimensi profil kemanusiaan mantan gerilyawan ini, termasuk seluruh atribut negatif dan positif, lebih dari sekadar penyusunan profil keterampilan tradisional yang lazim.

Penting juga mendorong mantan gerilyawan mendapati bahwa waktu pasca konflik sama dengan peran yang mereka mainkan selama konflik. Jika mereka bisa memiliki posisi yang memberikan mereka suatu bagian dalam tertib sosial pasca konflik, mereka akan membantu mendukung tertib tersebut dan sebaliknya mereka tidak akan bertindak melawannya. Karena itu, memandang mantan gerilyawan sebagai seorang individu dengan berbagai ambisi, rasa frustrasi dan potensi mereka akan meningkatkan peluang untuk merancang program reintegrasi yang lebih tepat.

Reintegrasi Kelompok-Kelompok Khusus

Keterbukaan sosial ekonomi bagi seluruh kelompok mantan gerilyawan

Mantan gerilyawan bukan suatu kelompok homogen. Sejumlah kelompok spesifik di antara para mantan gerilyawan secara berbeda berada pada risiko sosial-ekonomi. Sejumlah program harus memastikan secara eksplisit bahwa paket-paket bantuan akan menjangkau kelompok-kelompok tersebut dan merespon berbagai kebutuhan khusus mereka. Namun, pada saat yang bersamaan, harus ada kehati-hatian agar tidak muncul stigma tambahan bagi kelompok-kelompok ini dengan mengisolasi mereka lebih jauh. Perhatian khusus bagi kelompok-kelompok ini harus menjadi perhatian utama seluruh program, untuk memfasilitasi integrasi mereka menjadi anggota penuh masyarakat.

Kelompok-kelompok dengan berbagai kebutuhan khusus ini berbeda antara satu negara dengan negara yang lain dan risiko mengesampingkan mereka secara sosial-ekonomi harus dikaji dengan baik. Kelompok-kelompok khusus ini meliputi gerilyawan perempuan, gerilyawan tua dan sakit, gerilyawan penyandang cacat, gerilyawan dengan ketergantungan pada obat-obat terlarang, gerilyawan dari sisi yang "kalah", gerilyawan dari kelompok minoritas dan penduduk asli, anak-anak dan kaum muda, dan sebagainya.

Tentara anak dan keluarga mereka

Korban terbesar kekerasan di negara-negara yang hancur karena peperangan adalah anak-anak. Mereka sering kali tidak dapat bersekolah dan tidak memiliki masa kanak-kanak yang normal, diberi senjata dan obat-obatan, digunakan sebagai pion dan budak seksual, dan dieksploitasi dalam berbagai cara. Di sejumlah negara, jumlah anak-anak yang menjadi anggota pasukan dari berbagai faksi mencapai sekitar 40%. Banyak juga yang tumbuh selama berlangsungnya peperangan dan tidak memiliki pengalaman lingkungan yang damai. Generasi anak-anak ini telah terinfiltrasi oleh ideologi kebencian, kehilangan perlindungan keluarga atau komunitas mereka, dan sering kali memiliki hanya sedikit cara untuk bertahan hidup.

Upaya-upaya khusus diperlukan untuk memastikan cakupan program akan menjangkau tentara anak-anak ini. Tentara anak itu sendiri dapat dibagi ke dalam beberapa sub kelompok. Sering kali kelompok yang paling rentan adalah mereka yang menghadapi kesulitan untuk diterima oleh komunitas mereka, dan dalam beradaptasi kembali dengan kehidupan desa dan otoritas orang tua. Ketegangan ini diperparah apabila orang tua tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk menghidupi anak-anak mereka yang kembali, terutama, karena secara ekonomi mereka terbebani untuk mengurus anak-anak yang lebih kecil.

Hukum internasional telah cukup diperkuat dalam beberapa tahun terakhir untuk mencegah dan menghentikan rekrutmen anak-anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata. Pada khususnya, Konvensi ILO No. 182 dan Rekomendasi No. 190 mengenai bentuk-bentuk terburuk buruh anak, yang diadopsi pada tahun 1999, mewajibkan pemerintah untuk melarang dan menghapus bentuk-bentuk terburuk buruh anak, termasuk "rekrutmen secara paksa atau wajib" bagi anak-anak berusia di bawah 18 tahun dalam konflik-konflik bersenjata. Konvensi tersebut juga meminta untuk dilakukannya langkah-langkah yang efektif untuk penegakan, termasuk sanksi pidana atau sanksi-sanksi lain; mekanisme monitoring; program-program aksi; dan langkah-langkah untuk mencegah anak-anak terlibat dalam bentuk-bentuk terburuk buruh anak, untuk memindahkan mereka dari situasi tersebut dan menawarkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang memadai. Selain itu, pemerintahan yang menjadi anggota ILO juga harus membantu satu sama lain untuk membawa dampak terhadap ketentuan-ketentuan tersebut melalui kerja sama atau bantuan internasional.

Bagi anak-anak dan kaum muda yang telah didemobilisasi, penting untuk memetakan alasan-alasan mengapa mereka masuk ke dalam kekuatan bersenjata. Sementara sebagian dari mereka mungkin telah dipaksa secara fisik untuk bergabung dengan pasukan bersenjata (misalnya, melalui penculikan), yang lain mungkin bergabung atas alasan “sukarela”. Mengumpulkan informasi yang terperinci mengenai motif-motif mereka akan membantu merancang program-program yang memadai untuk mereintegrasikan tentara anak ke dalam komunitas mereka dan mencegah kembalinya mereka ke konflik bersenjata. Sebuah studi baru-baru ini mengenai persepsi tentara muda terhadap alasan-alasan mereka sendiri untuk bergabung dengan kelompok-kelompok bersenjata memperlihatkan sejumlah faktor-faktor risiko utama, yang sangat kuat apabila beberapa di antaranya digabungkan.²³ Kesimpulan besarnya juga adalah bahwa motif anak-anak laki-laki dan perempuan untuk bergabung dengan pasukan bersenjata cukup beragam, sehingga diperlukan fleksibilitas dan adaptasi dalam menyusun program tanggapan.

Mengatasi faktor-faktor yang mendorong atau menarik anak-anak ke dalam pasukan bersenjata mewakili suatu kontribusi yang besar terhadap pencegahan kekerasan bersenjata dan kajian ini harus dilakukan di masyarakat atau di wilayah yang memiliki potensi pecahnya perang atau kekerasan bersenjata. Oleh karena itu, mempelajari alasan-alasan perekrutan mereka memungkinkan program-program DDR menanggapi faktor-faktor lingkungan dan mengurangi kemungkinan rekrutmen anak-anak dan juga partisipasi anak-anak dalam konflik bersenjata dalam jangka panjang.

Diskusi mengenai penargetan mantan tentara anak secara eksklusif merupakan hal yang penting. Namun, menurut UNICEF dan ILO di Aceh, diperlukan pendekatan yang tidak semata-mata menargetkan pada anak-anak ini.

Gerilyawan penyandang cacat

Kebanyakan negara yang keluar dari konflik bersenjata memiliki persentase angkatan kerja penyandang cacat yang lebih tinggi dari persentase rata-rata karena perang atau karena kurangnya akses perawatan medis selama masa peperangan tersebut. Individu-individu ini, perempuan dan laki-laki, umumnya mengalami kesulitan untuk dapat mandiri secara ekonomi. Kesulitan ini menjadi lebih parah apabila mereka tidak bisa mengakses rumah mereka, bangunan umum dan tempat-tempat kerja yang dimaksudkan untuk mereka. Tetapi, pekerjaan yang layak dan produktif merupakan hal yang penting untuk integrasi sosial dan ekonomi individu-individu perempuan dan laki-laki penyandang cacat.

Kebutuhan sosial dan ekonomi mantan gerilyawan penyandang cacat tidak terlalu berbeda dari mantan gerilyawan yang tidak menyandang cacat. Tetapi, mereka terlalu sering dipisahkan dalam kelompok tersendiri. Selain banyak penyandang cacat yang membutuhkan rehabilitasi medis dan psiko-sosial, mereka juga menginginkan dan membutuhkan manfaat dari program-program reintegrasi seperti rekan-rekan mantan gerilyawan mereka yang lain. Dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program rehabilitasi dan reintegrasi bagi mantan gerilyawan penyandang cacat, tujuannya harus merupakan penyebaran informasi mengenai bantuan, skema tunjangan dan pensiun secara merata yang disediakan oleh lembaga-lembaga resmi maupun tidak resmi; dan memastikan akses yang setara bagi mereka untuk memperoleh kesempatan pendidikan, pelatihan kejuruan, bantuan ketenagakerjaan dan bantuan kewirausahaan, sama seperti rekan-rekan mereka.

Sebuah reintegrasi yang inklusif atau terbuka dan berbasis komunitas disarankan untuk kelompok sasaran ini. Banyak mantan gerilyawan penyandang cacat yang dapat dan harus memperoleh manfaat dari program dan layanan yang sama yang disediakan bagi mantan gerilyawan yang tidak menyandang cacat. Penyedia layanan harus dibantu untuk mengadaptasi tempat mereka dan mantan gerilyawan mungkin membutuhkan bantuan untuk mengakses pusat-pusat pelatihan kejuruan, lembaga-lembaga keuangan mikro dan pelayanan-pelayanan yang lain. Singkat kata, mereka harus memiliki akses terhadap kesempatan kerja formal secara adil.

Tempat kerja dapat diadaptasi (kerap kali dengan perubahan yang sangat minor) untuk pekerja penyandang cacat. ILO telah mengembangkan sebuah buku panduan mengenai alat-alat adaptasi²⁴ untuk keperluan ini, dan secara aktif membantu mempekerjakan para penyandang cacat. Pendekatannya mempromosikan integrasi ekonomi penuh bagi bekas gerilyawan dan warga sipil penyandang cacat, dan menyediakan pusat-pusat rehabilitasi khusus yang terbatas bagi orang-orang yang cacat untuk bergabung dalam program-program utama.

Untuk dapat memperoleh manfaat dari kesempatan utama, para mantan gerilyawan penyandang cacat mungkin memerlukan “alat-alat bantu teknis” seperti kruk, kursi roda, kaca mata, tongkat untuk orang buta, alat bantu dengar, serta alat-alat komunikasi yang diadaptasi, termasuk mesin ketik Braille dan interpretasi bahasa isyarat. Beberapa mantan gerilyawan penyandang cacat akan memerlukan perawatan medis dan dukungan keluarga dalam jangka waktu yang panjang.

Memahami bahwa cacat tubuh tersebut juga merupakan hasil dari hambatan-hambatan lingkungan, komunitas dapat memainkan peran penting dalam menjamin agar mantan gerilyawan penyandang cacat dapat menjadi kontributor dalam komunitas dan masyarakat luas. Mereka harus mengadaptasi struktur-struktur dan prosedur-prosedur mereka untuk memfasilitasi sifat keterbukaan mereka, dan lebih dari sekadar mengharap mereka berubah agar sesuai dengan

23 Brett/Specht: *Young Soldiers, why they choose to fight*, New York, 2004.

24 ILO: *ILO Handbook - Accessibility and Tool Adaptations for Disabled Workers in Post-Conflict and Developing Countries* (Geneva, ILO, 1997).

pengaturan yang ada. Misalnya, kebijakan-kebijakan atau hukum dapat berisi ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan para penyandang cacat. Selain itu, mungkin juga terdapat prasangka mengenai kemampuan mereka untuk bekerja dalam profesi-profesi tertentu. Mereka harus bertanggungjawab mengatasi hambatan-hambatan terhadap partisipasi anak-anak laki-laki dan perempuan, perempuan dan laki-laki dewasa penyandang cacat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial. Ketika komunitas mengadakan perubahan untuk meningkatkan akses bagi penyandang cacat, hidup juga akan menjadi lebih mudah bagi semua orang di dalam komunitas tersebut.²⁵

Perempuan yang dikaitkan dengan kekuatan tempur

Aktivitas perempuan yang terlibat dalam konflik bersenjata semakin meningkat. Pada tahun 2005, sekitar sepersepuluh sampai sepertiga perempuan terlibat dalam pasukan bersenjata, pasukan gerilya atau pergerakan pembebasan bersenjata di 55 negara, termasuk di Aceh. Hal ini mencakup sejumlah besar perempuan yang memiliki peran-peran pendukung (juru masak, pengangkut, pengirim pesan, dan lain-lain) atau perempuan-perempuan yang bergantung kepada gerilyawan (istri, janda, anak perempuan, dan lain sebagainya). Ketika mempertimbangkan perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi sosial ekonomi terhadap mereka, penting untuk menghindari program-program yang membatasi hanya kepada mereka yang dapat menyerahkan senjata, dan oleh karenanya mengecualikan mereka yang telah menjalani pengalaman yang sama dalam peran pendukung tersebut, telah mendemobilisasi diri sendiri, atau dilucuti oleh atasan-atasan mereka. Harus dipahami bahwa dalam banyak konteks, sangat sedikit gerilyawan perempuan yang disebutkan dalam daftar komandan mereka.

Gerilyawan perempuan sering kali tidak ikut pergi ke tempat-tempat pertemuan dan tidak memperoleh manfaat demobilisasi. Penting untuk dipahami mengapa perempuan dan remaja perempuan tidak mengambil hak mereka atas demobilisasi dan mendapatkan bantuan yang diasosiasikan dengan proses itu. Beberapa gerilyawan perempuan enggan mengkonfrontasi masa lalu mereka sebagai gerilyawan, atau takut akan dikucilkan secara sosial sebagai hasil dari sejarah mereka sebagai gerilyawan, atau dilarang oleh tentara dan komandan laki-laki.

Perempuan yang dikaitkan dengan kekuatan tempur - *Woman Associated with Fighting Forces* (WAFF) yang aktif berpartisipasi dalam pertempuran mungkin harus menghadapi berbagai kesulitan tambahan dalam proses reintegrasi mereka karena adanya anggapan tentang femininitas. Pada khususnya, mereka menentang citra perempuan cinta damai, pasif dan berorientasi pada keluarga yang terdapat dalam banyak masyarakat tradisional. Meskipun peran mereka sebagai gerilyawan mungkin ditoleransi dalam pasukan bersenjata dan selama konflik, masyarakat mungkin menganggap kegiatan-kegiatan militer perempuan "tidak pantas", terutama ketika konflik telah berakhir. Sebagai hasilnya, banyak perempuan yang menghadapi penolakan oleh keluarga dan keluarga mertua mereka setelah mereka kembali dari pertempuran, dan mereka memiliki risiko dikucilkan dari sistem pendukung sosial yang berbasis komunitas.

Peran jender yang lebih terbatas ini juga menempatkan WAFF, yang sejajar dengan laki-laki di pasukan bersenjata, dalam industri-industri dan jabatan-jabatan yang sangat sempit kisarannya, yang umumnya membutuhkan keterampilan yang lebih rendah dan dibayar lebih rendah. Selain itu, WAFF juga harus mengurus anak mereka selain mencari penghidupan, sering kali tanpa suami yang dapat membantu mereka, sehingga tidak tersisa waktu untuk berpartisipasi dalam bantuan reintegrasi seperti pendidikan dan pelatihan untuk mengejar ketertinggalan mereka.

Sama seperti rekan-rekan laki-laki mereka, WAFF bukanlah suatu entitas yang homogen, tapi mereka dapat dibagi menjadi sub-sub kategori berbeda. Perempuan dapat menjadi gerilyawan penyandang cacat, tua dan sakit, berasal dari kelompok minoritas, tentara anak, kaum muda, berpendidikan/tidak berpendidikan, memiliki keterampilan/tidak memiliki keterampilan, dan lain sebagainya. Gerilyawan perempuan remaja, misalnya, merupakan salah satu kelompok yang paling rentan dalam proses DDR tetapi jarang ditampilkan sebagai kelompok sasaran meskipun mereka berhak untuk itu. Umumnya mereka berpendidikan rendah dibandingkan dengan rekan-rekan laki-laki mereka. Hal ini menempatkan mereka pada posisi yang tidak diuntungkan dalam berjuang untuk memperoleh kesempatan pelatihan dan kesempatan kerja yang hanya sedikit tersedia dalam periode pasca konflik. Perempuan muda juga menghadapi diskriminasi yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan dewasa di pasar kerja, karena diyakini bahwa mereka akan segera menikah dan meninggalkan pekerjaan mereka atau menjadi kurang produktif.

Pada kenyataannya, program DDR yang telah secara eksplisit menekankan sensitifitas jender melakukan hal tersebut dengan cara mengelompokkan perempuan sebagai kelompok rentan homogen yang membutuhkan perlindungan. Perbedaan yang besar antara peran yang telah dimainkan oleh perempuan dalam pasukan bersenjata, sebagai istri, budak seksual, juru masak, atau gerilyawan dan bahkan komandan perempuan, harus dipahami. Umumnya, merupakan hal yang kritis untuk bersikap sensitif terhadap perihal perubahan jender dan hubungan jender dalam masyarakat pasca konflik, dan itu akan tercermin dalam program-program dan kebijakan-kebijakan DDR. Program-program DDR harus membangun kekuatan dan keteguhan hati perempuan dan memobilisasi mereka untuk menjadi aktor kunci dalam proses pembangunan perdamaian dan pemulihan ekonomi. Upaya-upaya harus diarahkan untuk memahami, mengenali, mengembangkan dan membangun potensi kelompok- WAFF yang berbeda-beda. Harus ditekankan bahwa dengan kesempatan dan bantuan yang memadai, perempuan dapat menjadi mesin rekonstruksi sosial-ekonomi.

25 CBR Joint Position Paper, op. cit.

4. Penilaian Kunci atas Reintegrasi Ekonomi

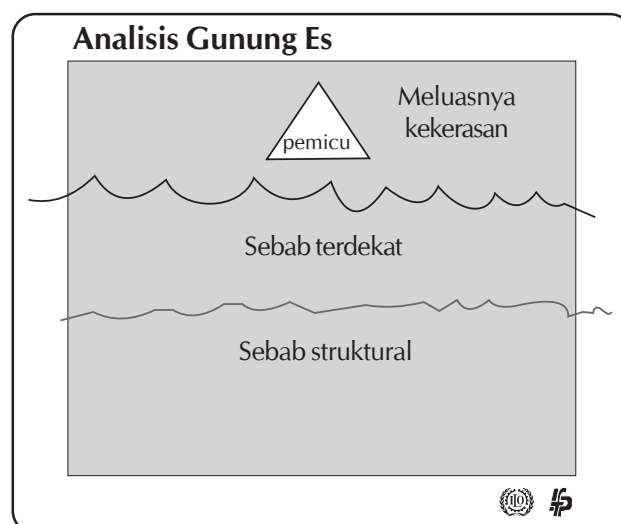
Menilai konflik dan perdamaian

Perbedaan antara penyebab struktural dan penyebab terdekat merupakan hal yang penting untuk memahami suatu konflik karena hal-hal tersebut membutuhkan penanganan yang berbeda dalam hal waktu dan sumber daya. Program-program DDR cenderung menitikberatkan solusi-solusi cepat dan sejauh ini jarang berusaha menangani penyebab-penyebab konflik dan munculnya gerilyawan. Tindakan-tindakan jangka pendek dan tindakan-tindakan yang cukup memakan biaya, seperti bantuan pangan, pemilihan umum, Perlucutan senjata dan paket-paket penunjang hidup, dapat menangani penyebab-penyebab terdekat. Meskipun demikian, proses-proses reintegrasi yang berkelanjutan, perlu mempertimbangkan, dan sampai pada suatu tingkatan, menangani penyebab-penyebab struktural dan memerlukan solusi-solusi berorientasi pembangunan jangka panjang seperti pembangunan ekonomi, tata pemerintahan yang lebih baik, dan distribusi yang berkeadilan sosial.

Salah satu bidang fokus khusus analisis konflik dan damai untuk DDR adalah untuk memahami sebab-sebab bergabungnya para gerilyawan ke dalam pasukan bersenjata. Khususnya bagi anak-anak dan kaum muda yang telah didemobilisasi, DDR harus mencoba menemukan apa yang menjadi motivasi mereka sebelumnya untuk terlibat dalam kekerasan bersenjata. Kemudian akan dimungkinkan penanganan faktor-faktor struktural dan faktor-faktor terdekat dan mengurangi kemungkinan mereka kembali berpartisipasi dalam konflik bersenjata di masa depan. Sementara program-program sosial-ekonomi bagi para mantan gerilyawan dan kelompok-kelompok lain yang terkena dampaknya harus segera dilaksanakan, program-program tersebut juga harus merespon sebab-sebab konflik yang lebih mendalam dalam rangka mencegah timbulnya kembali kekerasan dan rekrutmen (kembali) para (mantan) gerilyawan.

Ketika sebab-sebab struktural menciptakan kondisi untuk konflik kekerasan, sebab-sebab yang lebih dekatnya hanya merupakan gejala atau manifestasi dari permasalahan yang lebih mendalam yang memicu atau memperparah ketegangan dan kekerasan. Misalnya, kemiskinan dan ketidaksetaraan merupakan sebab-sebab struktural yang dapat menyebabkan kurangnya pendidikan dan kesempatan kerja di (bagian-bagian) suatu negara. Krisis dan kemunduran ekonomi, sebab terdekat, akan semakin mengurangi kesempatan kerja dan menyebabkan frustrasi. Pemicunya adalah suatu kejadian khusus di mana konflik timbul dan/atau orang-orang memutuskan untuk bergabung dengan pasukan bersenjata. Pemicu tersebut dapat berupa kekosongan politik tiba-tiba, represi kekerasan terhadap suatu demonstrasi, dan lain-lain. Pemicu tersebut bersifat insidental dan dapat dikesampingkan dalam analisis.

Grafik berikut ini menggambarkan penyebab-penyebab struktural, penyebab-penyebab terdekat, dan pemicu. Hanya puncak dari gunung esnya saja yang tampak di atas air, tetapi dasarnya yang jauh lebih besar tenggelam (yaitu apabila konflik pecah) karena apa yang terdapat di bawah air.



Sudah barang tentu sebab-sebab struktural dan terdekat sangat spesifik pada konteks dan mungkin berbeda di berbagai wilayah dalam suatu negara. Analisis konflik harus cukup mendalam untuk memahami sebab-sebab struktural konflik dan program-program DDR harus merespon, dan tentunya tidak justru memperkuat kembali sebab-sebab konflik dan bergabungnya kembali mantan gerilyawan.

Tindakan

- ♦ Melaksanakan analisis yang menyeluruh untuk memahami sebab-sebab konflik bersenjata dengan memanfaatkan semua sumber pengetahuan yang tersedia, termasuk universitas-universitas dan lembaga-lembaga penelitian nasional, regional dan internasional.
- ♦ Memilah sebab-sebab struktural dengan sebab-sebab terdekat untuk memperoleh pemahaman mengenai waktu dan aktor-aktor yang diperlukan untuk menanggapi isu-isu tersebut.
- ♦ Menentukan bagaimana program reintegrasi dapat menangani atau setidaknya menetralisasi sebab-sebab ini.
- ♦ Membuat daftar seluruh sebab-sebab yang membuat mantan gerilyawan bergabung dengan pasukan bersenjata dengan mengkaji ulang literatur yang ada, berkonsultasi dengan lembaga-lembaga penelitian, mewawancarai mantan gerilyawan, dan lain sebagainya serta kemudian membaginya ke dalam kelompok-kelompok sebab struktural dan sebab terdekat. Data ini penting untuk pengembangan strategi DDR yang berkelanjutan.
- ♦ Menyoroti sebab-sebab yang dapat direspon oleh program reintegrasi.

Mekanisme pengucilan sosial pada masa sebelum dan pasca konflik

Peminggiran kelompok dan lapisan masyarakat atau wilayah tertentu dapat menjadi salah satu akar penyebab konflik bersenjata. Para pemimpin politik atau raja-raja perang dapat mengeksploitasi perasaan ketidakadilan yang ada dalam upaya mereka memobilisasi anggota. Program-program DDR harus memahami dan sensitif terhadap mekanisme pengucilan ini. Hal ini khususnya penting karena pada situasi pasca konflik, di mana barang-barang, pekerjaan dan pelayanan merupakan hal-hal yang langka dan terdapat risiko yang tinggi untuk mengucilkan kelompok-kelompok tertentu.

Karena itu

- ♦ Perlu dilakukan identifikasi mekanisme pengucilan sosial pra-konflik yang menciptakan atau menguatkan diskriminasi agama, etnis, usia dan kelompok-kelompok lain yang dapat menghambat reintegrasi sosial-ekonomi mantan gerilyawan. Masukkanlah fokus gender. Di Sri Lanka, misalnya, sejumlah besar kaum muda pengangguran dan pengangguran terselubung pada tahun 1980-an dan 1990-an mencegah kaum muda menjadi anggota penuh dalam masyarakat mereka. Banyak di antara mereka yang merasa bahwa hanya dengan bergabung dengan pasukanlah mereka dapat memperoleh pendidikan dan kesempatan kerja yang lebih baik.
- ♦ Mengidentifikasi mekanisme pasca konflik yang menciptakan atau menguatkan diskriminasi agama, etnis, usia dan kelompok-kelompok lain yang dapat menghambat reintegrasi sosial-ekonomi mantan gerilyawan. Masukkanlah fokus gender. Misalnya, komunitas mungkin akan menolak perempuan mantan gerilyawan karena peran mereka sebagai gerilyawan bertentangan dengan pendapat tradisional komunitas mengenai kewanitaan.

Peluang dan tantangan ekonomi pada saat ini dan di masa depan

Aktor-aktor reintegrasi harus memiliki gambaran yang jelas mengenai peluang dan tantangan-tantangan yang ada pada saat ini dan di masa depan sebelum mengancik menuju proses transisional. Analisis ini juga akan membantu mereka menjustifikasi sumber daya-sumber daya yang diperlukan.

Kesalahan yang sering dilakukan dalam DDR adalah ketika program dirancang, seperti pelatihan kejuruan, hanya mempertimbangkan sisi permintaan atau hanya sisi penawaran saja. Jelas-jelas, memberikan keterampilan yang sudah banyak tersedia di pasar kerja kepada mantan gerilyawan tidak akan meningkatkan kesempatan mereka untuk memperoleh pekerjaan. Karena itu, dibutuhkan pemahaman yang seksama dan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Misalnya, di banyak negara pasca-konflik terdapat permintaan yang besar atas pengrajin kayu dan pekerjaan-pekerjaan lain yang terkait dengan bangunan. Meskipun demikian, sering kali ribuan pengrajin kayu yang berpengalaman tidak memiliki pekerjaan dan tengah mencari pekerjaan. Mantan gerilyawan yang baru dilatih mungkin kemudian akan dilatih dalam sebuah keterampilan yang jelas-jelas sedang dalam permintaan, tetapi tetap tidak dapat menemukan pekerjaan karena kerasnya persaingan dan karena ia tidak atau kurang memiliki pengalaman.

Kebalikannya juga berlaku. Apabila fokus dibatasi pada sisi penawaran (rehabilitasi pusat-pusat pelatihan kejuruan, dimulainya kembali program-program pelatihan kejuruan standar, dan lain-lain), program-program dan kebijakan-kebijakan akan melupakan titik temunya dengan permintaan yang sebenarnya, atau realitas lokal lainnya seperti ketersediaan bahan baku lokal dan pasokan input untuk usaha di masa depan.

Karena itu

Kajilah pra-konflik di Aceh:

- ◆ situasi ekonomi makro
- ◆ permintaan pasar kerja
- ◆ penawaran pasar kerja
- ◆ upah atau pendapatan
- ◆ infrastruktur, seperti jalan, jembatan, sekolah
- ◆ perdagangan dan pergerakan barang di zona konflik
- ◆ ekonomi informal versus formal
- ◆ kesempatan kerja bagi kelompok penduduk yang berbeda-beda
- ◆ praktik-praktik buruh anak
- ◆ partisipasi pasar kerja perempuan

Tindakan

Lakukanlah kajian cepat mengenai pasar kerja lokal dan nasional pada saat ini, dengan berkonsentrasi pada bidang-bidang berikut ini:

- ◆ Permintaan atas pekerja terampil
- ◆ Sektor yang potensial untuk penciptaan lapangan kerja
- ◆ Kesempatan kerja untuk mantan gerilyawan di ekonomi formal, informal, pedesaan dan perkotaan
- ◆ Permintaan barang dan jasa di komunitas penerima
- ◆ Kebutuhan-kebutuhan pasar kerja dan komunitas
- ◆ Analisis pasokan tenaga kerja dan keterampilan

Identifikasi secara khusus pasar kerja untuk DDR:

- ◆ Sektor-sektor yang menjanjikan bagi pekerjaan-pekerjaan yang cocok untuk mantan gerilyawan dan/atau warga sipil yang terkena dampaknya
- ◆ Perkiraan atas pekerjaan yang akan tercipta melalui program DDR itu sendiri dan program-program bantuan lainnya yang terkait untuk rekonstruksi dan pemulihan.
- ◆ Praktik-praktik buruh anak dan pemetaan sekolah, pelatihan dan kesempatan kerja yang cocok bagi anak-anak.
- ◆ Situasi pada saat ini dan kebutuhan-kebutuhan bisnis, termasuk keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan.
- ◆ Pengucilan sosial-ekonomi terhadap kelompok-kelompok tertentu seperti kelompok-kelompok minoritas, penyandang cacat, perempuan, dan lain sebagainya.

Analisis jender

Mantan gerilyawan laki-laki dan perempuan mengalami perang dengan cara yang berbeda, yang berdampak pada peran kemasyarakatan dan hubungan mereka setelah perang. Dengan bertempur dalam peperangan, laki-laki ditekan kembali akan peran mereka sebagai gerilyawan atau pelindung masyarakat mereka. Hal ini dapat mengacu pada peningkatan kekerasan dalam rumah tangga dan kejahatan ketika laki-laki kembali ke kehidupan sipil dan berusaha membangun kembali status laki-laki mereka. Di sisi lain, komunitas mungkin memberikan stigma kepada perempuan karena mereka telah mengabdikan pada pasukan bersenjata, suatu keistimewaan yang secara tradisional merupakan hak laki-laki. Ada kecenderungan untuk melanjutkan peran jender pra-konflik dalam situasi setelah konflik. Terutama bagi mantan gerilyawan perempuan yang tidak terbiasa dengan kebanyakan cara pandang masyarakat mengenai kewanitaian. Apa yang sebelumnya dapat diterima pada masa konflik dapat menjadi bahan penolakan sesudahnya.

Dengan mengesampingkan permasalahan jender, program-program reintegrasi mantan gerilyawan memiliki risiko dalam memperkuat stereotip dan ketidaksetaraan jender yang umumnya tidak menguntungkan perempuan dan membuat perempuan terpinggirkan. Misalnya, mantan gerilyawan perempuan harus mengurus rumah tangga dan anak-anak mereka. Banyak yang berjuang dengan gangguan fisik dan mental yang parah karena kekerasan seksual, fisik dan verbal. Beban ini dapat mencegah mereka berpartisipasi dalam program-program reintegrasi.

Di sisi lain, pendekatan yang sensitif jender juga dapat menggunakan perubahan dan fleksibilitas hubungan jender dalam pasukan bersenjata. Sekali melewati pemisahan jender, gerilyawan perempuan mungkin menemukan bahwa akan lebih mudah bagi mereka untuk memasuki profesi yang sebelumnya ditempati oleh laki-laki, dan dengan demikian membuka lebih banyak kesempatan kerja yang lebih baik. Secara keseluruhan, analisis jender dapat mempromosikan kesetaraan jender yang lebih besar dalam reintegrasi sosial ekonomi karena analisis tersebut memahami kerentanan dan kapasitas laki-laki dan perempuan yang berbeda.²⁶

26 Resolusi 1325 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perempuan dan Perdamaian dan Keamanan serta Resolusi PBB 1366 tentang Peran Dewan Keamanan dalam Mencegah Konflik Bersenjata menyerukan Pengarusutamaan Jender dalam semua upaya pencegahan dan resolusi konflik, pembangunan perdamaian, penciptaan perdamaian, rehabilitasi dan rekonstruksi di bawah PBB.

Karena itu

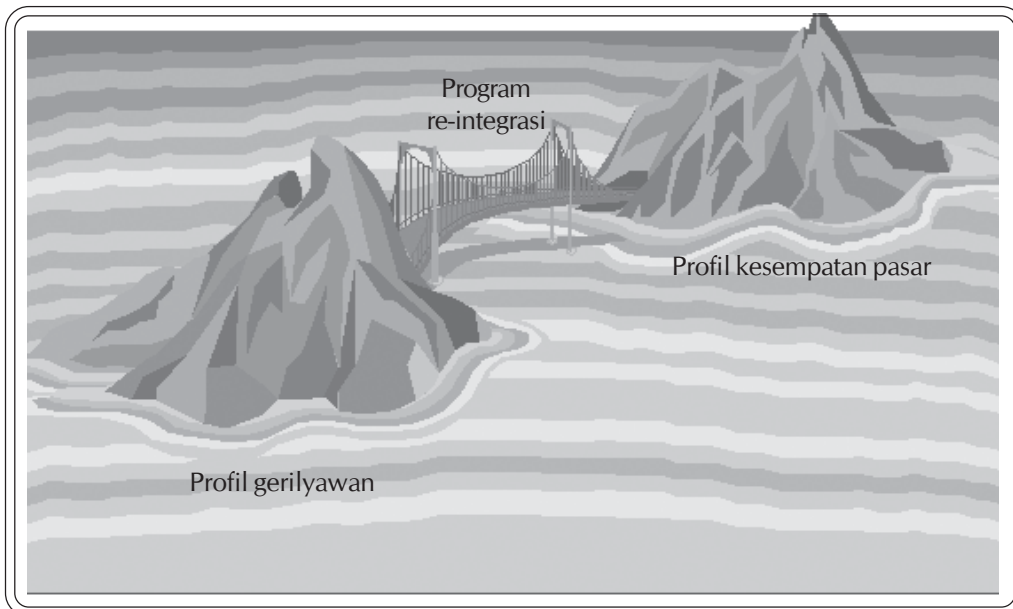
- ♦ Lakukan perbandingan peran tradisional perempuan dengan peran mereka sebagai mantan gerilyawan.
- ♦ Identifikasi dampak partisipasi mantan gerilyawan dalam hal cara pandang terhadap kewanitaan dan maskulinitas dan hubungan antara perempuan dan laki-laki.
- ♦ Periksa apakah dan bagaimana perubahan peran gender berdampak pada kesempatan pendidikan dan karir bagi mantan gerilyawan.

Tindakan

- ♦ Bangkitkan kesadaran mengenai permasalahan gender di kalangan aktor yang terlibat dalam DDR.
- ♦ Ciptakan dan analisis data yang dipisahkan berdasarkan gender untuk memahami situasi mantan gerilyawan perempuan dibandingkan dengan mantan gerilyawan laki-laki.
- ♦ Lengkapilah data kuantitatif tersebut dengan survei partisipatif berbasis komunitas untuk mempelajari cara pandang mereka mengenai kewanitaan dan maskulinitas. Peran seorang perempuan dan seorang laki-laki biasanya ditentukan di tingkat lokal dan di dalam komunitas.
 - Apakah perempuan dapat bekerja selain dari pekerjaan rumah tangga?
 - Apakah perempuan yang bertempur dapat diterima?
 - Jabatan apa yang dapat diterima untuk kaum perempuan?
 - Pendidikan seperti apa yang didapatkan oleh perempuan dan laki-laki?
 - Apakah kepemilikan senjata merupakan simbol maskulinitas? Apakah simbol lain yang dapat menggantikannya?

Kajian profil mantan gerilyawan

Mantan gerilyawan jarang yang dapat memenuhi profil pencari kerja yang normal. Mereka telah dilatih untuk bertempur dalam konflik bersenjata dan memperoleh pendapatan dengan membunuh. Di sisi lain, pasar tidak memiliki permintaan untuk pelatihan atau pekerjaan tersebut. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah, sebuah program reintegrasi harus membangun jembatan antara profil gerilyawan pada saat ini dan kesempatan-kesempatan pasar yang teridentifikasi. Oleh karena itu, perancangan program-program bantuan yang efektif terlebih dahulu memerlukan pengetahuan yang menyeluruh mengenai profil-profil mantan gerilyawan.



Tindakan

Kajilah profil-profil mantan gerilyawan, termasuk elemen-elemen berikut ini:

- ♦ Usia
- ♦ Latar belakang: pendidikan, pekerjaan dan pengalaman
- ♦ Kemampuan, keterampilan dan kompetensi²⁷
- ♦ Kebutuhan-kebutuhan khusus para penyandang cacat

²⁷ Keterampilan merupakan kemampuan (yang umumnya dapat dipelajari) untuk melakukan suatu tindakan/kegiatan. Kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan kerja dengan baik.

- ♦ Akses terhadap lahan dan aset
- ♦ Status kesehatan, termasuk kecanduan obat
- ♦ Struktur keluarga dan jumlah orang yang bergantung kepada mereka
- ♦ Harapan-harapan dan ambisi-ambisi

Kebutuhan-kebutuhan pendidikan dan pelatihan mantan gerilyawan

Mengkaji keterampilan dan kompetensi bekas gerilyawan memungkinkan penawaran program-program pendidikan dan pelatihan yang cocok dengan permintaan pasar kerja.

Banyak program-program DDR yang cenderung hanya menitikberatkan pemberian pelatihan keterampilan untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan dengan segera. Tetapi, harus ditentukan lebih dulu bagaimana meningkatkan kemampuan kerja mantan gerilyawan baik dalam jangka waktu yang panjang maupun pendek, atau jenis-jenis kebutuhan-kebutuhan pendidikan maupun pelatihannya. Hal ini khususnya penting karena Aceh telah mengalami konflik yang berkepanjangan, dan banyak kaum muda yang telah melewati masa pendidikan (menengah). Setelah bergabung dengan pasukan atau kelompok bersenjata, mantan gerilyawan kemungkinan telah diabaikan.

Suatu kajian yang menyeluruh juga harus mengidentifikasi keterampilan dan kompetensi yang telah diperoleh melalui pembelajaran informal dan dengan demikian mungkin tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan.

Tindakan

- ♦ Tentukan tingkat pendidikan formal mantan gerilyawan, termasuk periode pendidikan ketika mereka menjadi pengungsi dan tingkat motivasi mereka untuk “mengejar” ketertinggalan pendidikan mereka.
- ♦ Kaji kompetensi-kompetensi mantan gerilyawan, yang mungkin mencakup sertifikat pelatihan formal, keterampilan-keterampilan yang diperoleh melalui magang, pasukan bersenjata dan/atau pelatihan informal.
- ♦ Masukkanlah suatu kajian mengenai keterampilan hidup, termasuk kapasitas pribadi mereka untuk menyesuaikan diri secara sosial dan merekonsiliasi ketegangan.

Kajian kapasitas para pelaku pasar kerja

Biasanya, program-program DDR menempatkan harapan-harapan yang tidak realistis terhadap para aktor pasar kerja yang ada. Ribuan mantan gerilyawan yang memiliki keterampilan yang rendah merupakan bagian terbesar dari pencari kerja, di sebuah perekonomian yang hancur karena peperangan di mana aktor-aktor pasar kerja mungkin memiliki kapasitas yang telah terganggu secara serius, sangat baru, dan mungkin kurang koordinasi di antara mereka.

Aktor-aktor pasar kerja mencakup layanan dan lembaga ketenagakerjaan, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga statistik, Departemen Tenaga Kerja, organisasi pekerja dan pengusaha, lembaga kredit, dan aktor-aktor lain yang mempengaruhi pasar kerja.

Penilaian terhadap institusi-institusi pasar kerja mengidentifikasi kapasitas kualitatif dan kuantitatif mereka pada saat ini untuk dapat memenuhi permintaan khusus program reintegrasi. Kajian ini harus membantu mengidentifikasi apa yang dibutuhkan untuk membuat materi dan apakah organisasi layanan cocok dengan permintaan yang ada pada saat ini dalam program DDR, termasuk permintaan pasar kerja.

Tindakan

- ♦ Melaksanakan penilaian atas kapasitas kelembagaan di kalangan aktor yang relevan untuk menjalankan layanan reintegrasi. Hal ini harus dilakukan sedini mungkin, karena kajian ini akan menentukan apa yang dibutuhkan dalam soal sumber daya dan waktu untuk membangun kapasitas yang memadai bagi para penyedia layanan dalam rangka untuk mensukseskan reintegrasi, dan karena pembangunan kapasitas dapat memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun.
- ♦ Penilaian kapasitas harus meliputi:
 - jangkauan dan sifat lembaga-lembaga pasar kerja yang ada dan jenis-jenis pelayanan yang mereka berikan
 - jumlah dan kualitas layanan-layanan pra-peperangan
 - tingkat kehancuran bangunan-bangunan
 - penurunan sumber daya manusia
 - hilangnya peralatan
 - kecukupan layanan yang ada
 - arus informasi antara aktor-aktor pasar kerja

Penilaian atas kebutuhan dan kapasitas pelatihan

Program-program reintegrasi memerlukan sebuah sistem pelatihan yang menawarkan berbagai layanan kepada sejumlah besar orang, termasuk mantan gerilyawan, dalam suatu periode waktu yang singkat. Karena konflik memiliki dampak kehancuran terhadap sistem pelatihan, permintaan atas pelatihan yang diciptakan oleh program DDR biasanya melebihi pasokan pelatihan kualitatif. Karena itu, sebelum merancang rencana pelatihan, kapasitas dan kebutuhan penyedia pelatihan yang ada harus dikaji, untuk mengidentifikasi kesenjangan yang harus ditutupi.

Sebuah indikasi yang jelas mengenai jumlah orang yang dapat dilatih secara realistis pada tahun pertama setelah demobilisasi harus menjadi dasar bagi kampanye sensitif untuk menginformasikan kepada para gerilyawan mengenai bantuan yang akan mereka terima. Waktu menunggu antara demobilisasi dan reintegrasi sering kali mengakibatkan frustrasi dan timbulnya kembali kekerasan, sebagian besar disebabkan oleh janji-janji yang diberikan kepada gerilyawan, sementara para penyedia pelatihan belum memiliki kapasitas untuk menjalankannya.

Tindakan

Analisis lembaga-lembaga pelatihan yang relevan secara potensial bagi para mantan gerilyawan dan warga sipil yang terkena dampak konflik, seperti lembaga-lembaga pelatihan kejuruan dan usaha, dengan menitikberatkan:

- ♦ Keterkaitan antara kurikulum pelatihan dengan permintaan pasar
- ♦ Persyaratan masuk, seperti ijazah sekolah, kemampuan baca-tulis dan biaya
- ♦ Kapasitas penyedia pelatihan (kualitas dan kuantitas pelatihan yang ditawarkan)
- ♦ Mekanisme komunikasi dan koordinasi di dalam sistem pelatihan
- ♦ Standar kualitas dan sertifikasi kursus
- ♦ Komunikasi dan koordinasi dengan aktor-aktor pasar kerja yang lain

Hasil penilaian harus sudah disiapkan sebelum merencanakan komponen pelatihan program reintegrasi. Di antara berbagai soal yang lain, penilaian dini memungkinkan diambilnya langkah-langkah yang memadai untuk menguatkan kapasitas penyedia pelatihan dan pusat-pusat pelatihan. Karena itulah, ini menjadi salah satu kegiatan awal untuk dikembangkan untuk menyiapkan reintegrasi di Aceh.

Ketersediaan tempat-tempat magang

Meskipun kadang-kadang program-program reintegrasi menawarkan program praktik kerja (magang) bagi kaum muda setelah mereka menyelesaikan pelatihan kejuruan mereka, magang juga merupakan salah satu bentuk pelatihan kejuruan yang dapat mengkompensasi kurangnya tempat-tempat pelatihan formal yang tersedia. Di banyak negara yang terkena dampak konflik, praktik kerja tradisional merupakan penyedia keterampilan yang terbesar untuk pasar kerja – kebanyakan informal - jauh melebihi jumlah tempat-tempat pelatihan formal.

Karena itu

Kajilah:

- ♦ praktik-praktik dan peraturan-peraturan magang
- ♦ kualitas/hasil magang di masa lalu
- ♦ jumlah tempat yang tersedia
- ♦ kesediaan pengusaha untuk menerima mantan gerilyawan
- ♦ adaptasi yang dibutuhkan untuk disesuaikan dengan profil/kebutuhan mantan gerilyawan
- ♦ modalitas pengalihan keterampilan
- ♦ kompetensi majikan
- ♦ langkah-langkah protektif yang dibutuhkan untuk menghindari penyalahgunaan praktik-praktik kerja oleh majikan

Tindakan

- ♦ Konsultasikan dengan para pengusaha mengenai pengalaman mereka dalam soal magang dan kesediaan mereka untuk memberikan kesempatan magang/praktik kerja kepada mantan gerilyawan.
- ♦ Organisasikan kelompok-kelompok diskusi dengan aktor-aktor kunci seperti kamar dagang, asosiasi bisnis, departemen yang terkait, dan lain-lain. Diskusikanlah dengan mereka modalitas dan hasil dari sistem praktik kerja yang ada dan bagaimana mengadaptasikannya untuk mantan gerilyawan.
- ♦ Konsultasikan dengan organisasi-organisasi pekerja untuk mengetahui pendapat mereka.

Kajian Ekonomi Lokal

Diagnosis teritorial dan pemetaan kelembagaan

Pemahaman yang baik mengenai lingkungan sosial ekonomi merupakan landasan bagi pelaksanaan (re)integrasi yang relevan dan dikendalikan oleh permintaan. (Re) integrasi pekerja maupun komunitas lokal memerlukan kasadaran akan sumber-sumber daya sosial ekonomi dan potensi pembangunan teritorial tersebut. Jumlah dan skala organisasi pembangunan dan organisasi kemanusiaan dapat dengan mudah membanjiri komunitas yang terkena dampak konflik. Organisasi-organisasi eksternal memiliki risiko mengabaikan sumber daya manusia, fisik dan sumber daya alam, terutama ketika tekanan untuk menghasilkan dampak yang cepat sangat tinggi. Sering kali, prakarsa (re)integrasi tumpang tindih dan peluang untuk terjadinya sinergi tidak dimanfaatkan. Sebuah gambaran yang jelas mengenai apa yang tersedia secara lokal dan siapa yang akan mengerjakannya, akan membantu mencegah terjadinya hal itu. Diagnosis teritorial dan pemetaan kelembagaan memungkinkan aktor-aktor lokal dan eksternal “untuk memperoleh gambaran yang benar”.²⁸

Karena itu

Gunakanlah diagnosis teritorial untuk memperoleh gambaran mengenai sumber daya dan dinamika yang terdapat di wilayah tersebut. Diagnosis teritorial terdiri dari informasi pra-konflik dan situasi pada saat ini di bidang-bidang berikut ini:

- ♦ Statistik ekonomi makro (termasuk pendapatan per kapita, upah minimum, inflasi dan devaluasi)
- ♦ Penduduk (termasuk mantan gerilyawan, komposisi perkotaan, pedesaan, etnis, keterampilan)
- ♦ Ketenagakerjaan dan kewirausahaan (orang-orang yang memperoleh upah, pengangguran terselubung, kegiatan-kegiatan untuk bertahan hidup, pekerjaan berdasarkan sektor-sektor perekonomian, dan lain-lain)
- ♦ Dinamika sosial-ekonomi (pengelompokan dan rantai pasokan, interaksi antara aktor-aktor publik dan swasta, status jabatan mantan gerilyawan, dan lain-lain)
- ♦ Infrastruktur (jalan, pasar, komunikasi, listrik, dan lain-lain)
- ♦ Sumber daya alam dan lingkungan (air, iklim, penggunaan lahan untuk pertanian, taman-taman alam, dan lain-lain)
- ♦ Kerangka hukum dan peraturan (desentralisasi, promosi sektor swasta, peraturan perbankan, ketentuan-ketentuan khusus untuk mantan gerilyawan, dan lain-lain)

Gunakanlah pemetaan kelembagaan untuk memperoleh gambaran mengenai “siapa yang melakukan apa” di wilayah tersebut. Pemetaan kelembagaan terdiri dari informasi mengenai lembaga-lembaga pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah daerah, asosiasi pemerintah daerah, organisasi-organisasi nasional dan internasional dan badan-badan PBB yang berada di wilayah tersebut.

Informasi mengenai pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang luas ini harus mencakup:

- ♦ Profil (misi, tujuan, bidang aksi, kelompok sasaran, cakupan geografis, dan lain-lain)
- ♦ Organisasi teritorial (struktur pemerintah daerah, komposisi lembaga-lembaga pemerintah yang didesentralisasi)
- ♦ Prakarsa-prakarsa (re) integrasi dan prakarsa-prakarsa pembangunan lain yang sedang berjalan dan yang direncanakan
- ♦ Koordinasi, jejaring dan kemitraan antarlembaga

Tindakan

- ♦ Identifikasi ahli-ahli dan pemangku kepentingan lokal yang akan melaksanakan diagnosis teritorial dan pemetaan kelembagaan.
- ♦ Tentukan “teritori”. Berdasarkan nama-nama kota dan komunitas penerima, seseorang harus menentukan skala teritorial untuk pengumpulan data dengan mempertimbangkan jarak geografis, batas-batas administratif (provinsi, kabupaten/kota) dan hubungan ekonomi, sosial dan budaya antar komunitas.
- ♦ Adaptasi, apabila dibutuhkan, daftar untuk pengumpulan data (lihat alat 4a dan 4b) terhadap kondisi lokal.
- ♦ Kumpulkan data melalui studi kepustakaan dan wawancara.
- ♦ Analisis data dalam forum-forum partisipatif.
- ♦ Sebarluaskan data.
- ♦ Perbaharui data secara berkala.

Diagnosis teritorial dan pemetaan kelembagaan mengambil tempat dalam persiapan rancangan strategi-strategi (re)integrasi bagi mantan gerilyawan dalam komunitas penerima. Setelah komunitas penerima diketahui, pengumpulan data dan analisis harus dimulai.

28 Bagian ini dikutip dari Panduan ILO tentang Pengembangan Ekonomi Lokal dalam Situasi Pasca Krisis, Jakarta 2005

Kapasitas penyerapan komunitas pada saat ini

Menilai kapasitas penyerapan komunitas pada saat ini merupakan hal yang penting dalam rangka merespon keputus-putus (atau penempatan) mantan gerilyawan dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat secara efektif. Kajian mengenai peluang-peluang integrasi ekonomi pada saat ini menginformasikan program (re)integrasi dalam menyiapkan layanan-layanan untuk pengembangan keterampilan dan bantuan usaha. Kesempatan-kesempatan yang teridentifikasi dapat bersifat sementara tetapi dapat dipertahankan dalam jangka panjang dengan pengembangan lebih lanjut perekonomian lokal.

Karena itu

- ♦ Fokus terhadap kebutuhan-kebutuhan langsung akan barang dan jasa dalam komunitas (yang merupakan entitas yang lebih kecil dibandingkan dengan teritori).
- ♦ Berdasarkan hal ini, susunlah profil integrasi untuk komunitas tersebut.

Catatan: hal ini merupakan kajian yang cepat dan umumnya bersifat kualitatif, melengkapi pengumpulan data yang lebih analitis yang dilaksanakan melalui diagnosis teritorial dan pemetaan kelembagaan.

Tindakan

- ♦ Selenggarakan diskusi-diskusi informal dan lakukan wawancara untuk mengumpulkan data mengenai kapasitas penyerapan komunitas pada saat ini. Organisasikan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion*) tergantung pada ukuran komunitas.
- ♦ Kumpulkan informasi mengenai:
- ♦ *Permintaan* akan jasa dan barang yang ada pada saat ini dari pelanggan individual serta lembaga-lembaga seperti sekolah-sekolah atau pusat-pusat kesehatan:
 - Dimana orang-orang berbelanja, dengan harga berapa, apakah mereka puas dengan kualitas jasa dan produk?
- ♦ *Persediaan* jasa dan barang pada saat ini
 - Apakah terdapat kekurangan produk atau jasa tertentu?
 - Apakah yang akan dibutuhkan untuk memperbaiki persediaan barang atau jasa tersebut? Apakah terdapat potensi pertumbuhan untuk bisnis-bisnis yang ada atau apakah bisnis dapat dimulai?
 - Apa yang akan diperlukan untuk perluasan atau untuk memulai usaha? (keterampilan, pasokan, modal kerja, investasi produktif dan infrastruktur)
- ♦ Perhatikan isu-isu berikut ini ketika menganalisis data:
 - Kemungkinan adanya kekurangan dalam soal infrastruktur produktif, jalan, dukungan usaha (layanan kredit dan non-keuangan), dan pasokan bahan baku akan menghambat kegiatan yang terkait dengan peluang integrasi yang bersifat segera.
 - Tingkat organisasi di antara produsen dan pengusaha. Koperasi, asosiasi usaha kecil atau perusahaan-perusahaan berbasis komunitas dan/atau organisasi yang dapat menjadi pijakan awal bagi integrasi sosial-ekonomi mantan gerilyawan. Bantuan teknis dapat diberikan pada organisasi-organisasi yang menyerap mantan gerilyawan dari pada membantu mantan gerilyawan secara individual.
 - Daya beli dalam komunitas (transisi dari komunitas yang memenuhi kebutuhannya sendiri menuju masyarakat yang sudah menggunakan uang sebagai alat pembelian biasanya membutuhkan waktu)
 - Sensitivitas sosial yang berkaitan dengan mantan gerilyawan. Apakah orang-orang akan membeli dari mantan gerilyawan? Apakah pengusaha-pengusaha yang ada akan mempekerjakan mantan gerilyawan, apakah mereka akan bersedia menerima mantan gerilyawan sebagai pekerja praktik (magang)?

Prospek penciptaan lapangan kerja dalam perekonomian lokal

Peluang integrasi di tingkat lokal kemungkinan berubah seiring dengan berjalannya waktu. Upaya-upaya rekonstruksi dan pembangunan negara mengubah pola investasi dan berdampak pada kesempatan pertumbuhan ekonomi lokal. Banyak dari perubahan-perubahan tersebut yang dapat diantisipasi karena program-program rekonstruksi dan pembangunan direncanakan di muka dan biasanya membutuhkan waktu sebelum implementasi yang sebenarnya dapat dimulai. Oleh karena itu, menilai prospek penciptaan lapangan kerja dalam perekonomian lokal, juga dalam jangka panjang, harus menjadi bagian dari analisis situasional. Analisis tersebut akan meningkatkan kesiapan aktor-aktor perekonomian lokal dan memfasilitasi tercapainya kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Karena itu

- ◆ Identifikasi sektor-sektor pertumbuhan yang potensial.
- ◆ Identifikasi potensi-potensi untuk bisnis baru
- ◆ Kaji kelayakan peluang-peluang yang potensial ini untuk mantan gerilyawan
- ◆ Kaji apakah berbagai kesempatan ini tidak berbahaya bagi mantan tentara anak

Tindakan

- ◆ Gunakan data dari diagnosis teritorial, pemetaan kelembagaan serta profil integrasi dari beberapa komunitas yang menjadi bagian dari perekonomian lokal tersebut
- ◆ Pelajari kebijakan-kebijakan dan prakarsa-prakarsa pembangunan nasional dan internasional yang akan berdampak pada perekonomian lokal, seperti program-program pembangunan, program-program pengembangan sektor swasta dan strategi pemberantasan kemiskinan nasional
- ◆ Tentukan prakarsa-prakarsa pembangunan nasional dan internasional yang akan datang
- ◆ Berdasarkan hal itu, identifikasi sektor-sektor perekonomian yang mungkin akan tumbuh dalam jangka pendek.

Contoh penciptaan lapangan pekerjaan di tingkat lokal

Sebuah program rehabilitasi sekolah dan pusat-pusat pelatihan akan memerlukan tenaga terampil dalam sektor konstruksi (membangun tembok, per kayu, dan lain-lain). Program Integrasi akan membutuhkan sensitifitas di kalangan aktor nasional dan maupun organisasi internasional untuk menggunakan metode berbasis tenaga kerja (labour intensive) dan banyak melibatkan perusahaan lokal, pekerja lokal dan bahan-bahan bangunan lokal. Bersama dengan hal itu, Program akan mendukung pembangunan kapasitas dalam mengadaptasi prosedur tender kepada perusahaan-perusahaan kecil, dalam menyiapkan para pengusaha untuk berpartisipasi dalam tender, dalam mengorganisasi pekerjaan dan dalam mengembangkan keterampilan di sektor konstruksi. Jika dimungkinkan, para penyedia pelatihan lokal, produsen dan pengusaha harus dibantu dalam mengembangkan dan memberikan jasa dan barang. Harus diantisipasi pula kebutuhan-kebutuhan yang akan muncul dari kegiatan-kegiatan tersebut, seperti penyediaan makan, transportasi dan akomodasi.

Prospek penciptaan lapangan kerja lokal dapat diidentifikasi ketika informasi dasar yang relevan telah dikumpulkan melalui diagnosis teritorial, pemetaan kelembagaan, dan mengetahui profil kapasitas penyerapan komunitas.

Penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah pedesaan dan perkotaan

Kendati di Aceh pertanian dan perikanan merupakan sektor yang paling menjanjikan bagi reintegrasi, mungkin tidak semua mantan gerilyawan bersedia “kembali” ke daerah pedesaan. Masalah ini juga memiliki akar budaya, tetapi jika kondisi kerja dan potensi pertumbuhan ditingkatkan, mungkin akan banyak mantan gerilyawan muda yang bersedia kembali ke daerah-daerah pedesaan.

Dalam rangka untuk mendapatkan kesempatan reintegrasi yang menarik bagi para mantan gerilyawan di daerah pedesaan, penting untuk mengidentifikasi beberapa sub-sektor besar yang memiliki potensi untuk menyerap mereka. Kajian awal mengenai prospek ketenagakerjaan di daerah-daerah pedesaan merupakan hal yang penting karena salah satu tujuan program DDR adalah untuk menghindari tinggalnya mantan gerilyawan di kota di mana kesempatan kerja memang sudah sangat terbatas.

Tindakan

Kajilah di daerah-daerah pedesaan

- ◆ Jumlah kesempatan kerja di sektor pertanian dan perikanan, serta kesediaan mantan gerilyawan menjadi petani
- ◆ Hubungan dengan pasar
- ◆ Pendapatan rata-rata dari bertani
- ◆ Kesempatan kerja, yang timbul dari rantai pekerjaan di sektor pertanian untuk pengolahan, pemasaran, transportasi, penjualan, dan lain-lain.
- ◆ Akses pendidikan, pelatihan, sistem kredit, dan layanan kesehatan di daerah pedesaan
- ◆ Peraturan dan perundang-undangan dalam soal kepemilikan tanah, termasuk analisis gender mengenai akses atas tanah yang subur

Kajilah di daerah-daerah perkotaan

- ◆ Peluang bagi proyek-proyek rekonstruksi yang berbasis tenaga kerja untuk membangun kembali rumah, jalan, sekolah, pusat kesehatan, gelanggang remaja, dan lain-lain.
- ◆ Identifikasi proyek-proyek rekonstruksi di kota yang tidak hanya menciptakan kesempatan kerja tapi juga meningkatkan standar hidup, seperti pembangunan daerah kumuh di kota.

- ♦ Bagaimana kebijakan-kebijakan dan hukum perkotaan nasional dapat mengurangi dampak negatif urbanisasi.
- ♦ Keberadaan dan kapasitas organisasi-organisasi kepemudaan.

Pemetaan kesempatan kerja darurat

Telah terbukti sangat sulit untuk memastikan bahwa bantuan reintegrasi segera tersedia setelah mantan gerilyawan didemobilisasi. Membuat mereka tidak melakukan apa-apa dan tanpa sumber pendapatan mungkin akan menimbulkan masalah-masalah sosial di dalam komunitas. Periode antara demobilisasi dan reintegrasi ini sering kali disebut sebagai “*reinsertion*”, “reintegrasi dalam transisi” atau “kesenjangan”. Sebagaimana telah jelas diekspresikan melalui istilah-istilah tersebut, periode ini harus dibuat sesingkat mungkin.

Pada saat ini, penting untuk memetakan sejumlah kesempatan kerja darurat yang mungkin akan bermanfaat bagi mantan gerilyawan dan juga komunitas. Program kesempatan kerja darurat ini harus memiliki dampak langsung, tetapi juga menyiapkan kondisi untuk proses reintegrasi.

Apa yang dibutuhkan adalah pekerjaan sementara, misalnya, pekerjaan konstruksi yang berbasis tenaga kerja di mana mantan gerilyawan (dan warga sipil) dapat memperoleh pendapatan untuk hidup dan di mana mantan gerilyawan dan komunitas untuk pertama kalinya dapat bertemu. Selain dari manfaat ekonomi tersebut, pekerjaan-pekerjaan ini akan meningkatkan status sosial mantan gerilyawan, yang sering kali dianggap sebagai perusak, dan juga akan membuat mantan gerilyawan terbiasa dengan kehidupan sipil.

Tindakan

- ♦ Identifikasi kebutuhan-kebutuhan infrastruktur dengan manfaat ekonomi langsung (akses jalan ke pasar, pasar, pusat pelatihan, dan lain-lain)
- ♦ Identifikasi kebutuhan-kebutuhan infrastruktur dengan manfaat sosial langsung bagi komunitas penerima (sekolah, pusat kesehatan, jalan, jembatan, dan lain-lain)
- ♦ Identifikasi proyek-proyek dengan manfaat lingkungan langsung (pengumpulan sampah, penghijauan, persediaan air, dan lain-lain)
- ♦ Tentukan apakah pendekatan berbasis tenaga kerja cocok di negara, wilayah, komunitas tertentu.
- ♦ Gabungkan manfaat bersama bagi mantan gerilyawan, infrastruktur komunitas, dan juga pembangunan perdamaian.

5. Strategi-strategi Reintegrasi Ekonomi

Mengidentifikasi kesenjangan, kesempatan, risiko dan respon

Proses-proses reintegrasi merupakan upaya-upaya yang ambisius dan rumit. Kesempatan mungkin terbatas, ketegangan sosial tinggi dan iklim politik yang sensitif. Selain itu, bantuan reintegrasi memerlukan keterlibatan, koordinasi dan kerja sama berbagai aktor, termasuk organisasi-organisasi nasional dan internasional, organisasi non pemerintah, sektor swasta dan penyedia layanan yang lain. Strategi yang baik memungkinkan aktor-aktor ini untuk menghindari duplikasi upaya yang sama, memperoleh keuntungan dari keunggulan komparatif (*comparative advantage*), meraih kesempatan untuk menciptakan sinergi, memperoleh koherensi dalam menyusun program dan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin akan timbul.

Karena itu

Identifikasi:

- ♦ *kesenjangan* yang perlu diselesaikan oleh program, misalnya kurangnya kesempatan pelatihan dan kesempatan kerja, kurangnya program-program untuk penyandang cacat, kurangnya arus informasi pasar kerja.
- ♦ *kesempatan*, misalnya, potensi untuk penciptaan lapangan kerja, keterampilan dan kapasitas mantan gerilyawan, perdagangan lintas batas.
- ♦ *risiko* pelaksanaan program, misalnya meningkatnya ketegangan antara komunitas dan mantan gerilyawan sebagai akibat dari bantuan yang ditargetkan, ketergantungan aktor-aktor nasional terhadap bantuan eksternal, frustrasi yang dikaitkan dengan penundaan bantuan.
- ♦ *Respon* terhadap kesenjangan, kesempatan, risiko, misalnya bantuan fasilitas penitipan anak yang memungkinkan mantan gerilyawan perempuan berpartisipasi dalam program-program pelatihan; membuka program-program kredit mikro bagi mantan gerilyawan dan anggota komunitas yang lain untuk menghindari ketegangan; promosi standar-standar perburuhan internasional untuk mencegah rekrutmen tentara anak yang sebelumnya ke dalam pekerjaan yang eksploitatif dan prostitusi.

Penciptaan lapangan kerja di sektor-sektor yang potensial

Menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dalam skala yang luas dan dengan biaya modal yang cukup rendah merupakan salah satu tantangan terbesar program-program DDR. Kesempatan kerja biasanya langka pada perekonomian pasca konflik yang baru di mana DDR berada. Berdasarkan kajian (lihat di atas), promosi kesempatan kerja harus menjadi bagian dari skema DDR dan skema rekonstruksi ekonomi pasca konflik nasional secara eksplisit. Tantangannya adalah bukan hanya untuk merehabilitasi dan mengaktifkan kembali layanan-layanan ekonomi dan sosial yang kritis, tetapi juga untuk membangkitkan kembali pasar lokal. Tanpa upaya tersebut, seluruh upaya untuk membangkitkan perekonomian dan mendorong kesempatan kerja akan terhambat.

Karena itu

- ♦ Promosikan dan beri dukungan kepada sektor swasta, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Seperti dapat dilihat di banyak negara industri dan negara berkembang, usaha kecil dan menengah menghasilkan paling banyak lapangan pekerjaan.
- ♦ Luncurkan proyek-proyek yang banyak menyerap tenaga kerja di daerah-daerah di mana banyak mantan gerilyawan kembali dari daerah pertempuran. Proyek-proyek tersebut sebaiknya dipilih yang memiliki manfaat ganda, seperti penciptaan lapangan kerja, meningkatkan arus kas di komunitas lokal, manfaat sosial dan manfaat ekonomi langsung bagi komunitas.

- ♦ Meningkatkan kemampuan kerja mantan gerilyawan melalui pelatihan dan pendidikan dalam rangka meningkatkan profil mereka agar dapat merespon permintaan pasar kerja pada saat ini dan di masa depan.

Tindakan

- ♦ Gunakan pendekatan Pembangunan Ekonomi Lokal (*Local Economic Development /LED*). LED memungkinkan pemangku kepentingan lokal bersama-sama merancang dan melaksanakan strategi pembangunan dengan menggunakan potensi asli local dan keunggulan komparatif daerah tersebut.
- ♦ Berikan kontrak-kontrak dalam program DDR kepada sektor swasta.
- ♦ Bangunlah kapasitas dengan membuat pemerintah daerah, kontraktor kecil dan masyarakat melaksanakan proyek-proyek yang berbasis tenaga kerja.
- ♦ Adaptasi kebijakan dan peraturan nasional untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan usaha berkembang.

Menggabungkan target dengan pendekatan berbasis wilayah

Mantan gerilyawan di dalam komunitas

Mantan gerilyawan harus dapat diterima oleh komunitas mereka. Program-program DDR yang menitikberatkan pada mantan gerilyawan tanpa mempertimbangkan penduduk lain yang terkena dampak konflik dapat memicu dan memperparah ketegangan sosial. Bantuan DDR yang hanya menargetkan mantan gerilyawan akan dipandang sebagai pemberian penghargaan terhadap kekerasan dan tidak adil, jika menimbang orang-orang lain yang terkena dampak konflik dan tsunami yang jumlahnya sangat besar.

Tekanan sosial dan ekonomi yang dialami oleh seluruh masyarakat selama konflik tidak memungkinkan dikesampingkannya komunitas selama proses reintegrasi sosial-ekonomi mantan gerilyawan. Meskipun demikian, dengan tingginya kekhawatiran keamanan dan terbatasnya dana yang tersedia, mungkin diperlukan beberapa penargetan. Tingkat eksklusivitas atau, inklusivitas tergantung pada konteks sosial, politik dan ekonomi setempat. Pemeriksaan yang seksama diperlukan untuk menentukan tingkat penargetan yang baik dalam konteks DDR khusus Aceh.

Karena itu

- ♦ Cobalah untuk menyeimbangkan antara menanggapi kebutuhan-kebutuhan khusus mantan gerilyawan dan mengutamakan mereka dengan risiko menelantarkan kelompok-kelompok lain.
- ♦ Buatlah layanan tersedia bagi kelompok-kelompok lain dan anggota-anggota masyarakat yang terkena dampak peperangan apabila dimungkinkan.
- ♦ Tingkatkan kemampuan komunitas untuk menyerap mantan gerilyawan.
- ♦ Ciptakan manfaat langsung bagi komunitas melalui bantuan DDR.
- ♦ Ciptakan kapasitas yang bertahan selamanya selama proses DDR yang juga bermanfaat bagi orang-orang lain yang membutuhkan bantuan integrasi.
- ♦ Pastikan bahwa manfaat yang tersedia bagi mantan gerilyawan diseimbangkan dengan manfaat yang tersedia bagi kelompok-kelompok lain di bawah program yang berbeda seperti para pengungsi dan pengungsi lokal yang kembali.

Strategi Pembangunan Ekonomi Lokal

Pendekatan berbasis wilayah bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan sebuah strategi integrasi untuk mantan gerilyawan sepenuhnya mempertimbangkan karakteristik sosial dan lingkungan perekonomian lokal, potensi-potensinya serta batasan-batasannya. Karena itu, strategi integrasi nasional bagi mantan gerilyawan perlu mempertimbangkan realitas dan prioritas lokal. Hal ini berubah antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, dan aktor-aktor lokal berada pada posisi yang terbaik untuk menetapkan strategi-strategi LED bagi wilayah mereka. Kesuksesan dalam mengintegrasikan mantan gerilyawan akan sangat bergantung pada inklusivitas rancangan partisipatif, konsensus di belakang strategi LED serta ketergantungannya pada aset dan sumber daya lokal.

Pembangunan ekonomi lokal merupakan sebuah proses partisipatif yang mendorong pengaturan kemitraan antara pemangku kepentingan swasta dan publik di sebuah teritori tertentu, yang memungkinkan perancangan dan pelaksanaan bersama suatu strategi pembangunan bersama, dengan menggunakan sumber daya dan keunggulan komparatif lokal dalam suatu konteks global dengan tujuan akhir untuk menciptakan pekerjaan yang layak dan menstimulir kegiatan ekonomi. Strategi LED menitik beratkan pada terciptanya lingkungan yang kondusif. Oleh karena itu, pembangunan kapasitas para pemangku kepentingan dalam perencanaan, dialog dan pemberian layanan merupakan faktor-faktor

kunci. Meskipun demikian, setelah konflik, komunitas membutuhkan respon yang deras terhadap kebutuhan-kebutuhan yang paling mendesak dan hasil yang nyata. Kebangkitan kembali perekonomian lokal merupakan persyaratan untuk integrasi yang sukses bagi mantan gerilyawan. Maka, strategi jangka pendek yang menitikberatkan pada prakarsa-prakarsa yang berdampak cepat harus dikombinasikan dengan strategi-strategi jangka menengah dan jangka panjang.

Langkah-langkah untuk kelompok-kelompok khusus

Beberapa kelompok mantan gerilyawan akan secara otomatis memiliki akses layanan yang disediakan di bawah program DDR umum. Karena itu, kelompok-kelompok gerilyawan khusus berada pada risiko yang tinggi akan pengucilan sosial. Mereka mungkin memerlukan langkah-langkah terarah yang memungkinkan mereka mendapatkan manfaat dari program-program reintegrasi. Merancang sebuah strategi DDR harus dengan mempertimbangkan hasil dari kajian yang disebutkan di atas. Berdasarkan hal-hal tersebut:

Karena itu

- ♦ Hilangkan hambatan-hambatan kelompok-kelompok khusus sehingga mereka dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam program-program reintegrasi.
- ♦ Buatlah upaya-upaya untuk reintegrasi kelompok-kelompok mantan gerilyawan khusus yang lebih terfokus pada ketenagakerjaan sehingga memungkinkan mereka keluar dari kerentanan mereka.
- ♦ Susunlah program-program bantuan bagi kelompok-kelompok khusus sehingga mereka dapat membangun modal dan mampu membiayai hidup sendiri dan mandiri.
- ♦ Buatlah strategi DDR lebih sensitif jender dan program-program yang sama menarik dan memadainya bagi perempuan seperti bagi laki-laki. Gunakanlah analisis jender untuk mencari tahu kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan gerilyawan perempuan.
- ♦ Kenalilah situasi khusus dan kebutuhan-kebutuhan anak-anak:
 - Rancanglah langkah-langkah perlindungan selama dan setelah perlucutan senjata dan demobilisasi
 - Periksa kesempatan kerja yang mana yang cocok untuk anak-anak (yang lebih besar), dan lain-lain.
 - Hindarilah memberikan uang tunai kepada anak-anak dalam periode transisi karena hal itu akan membuat mereka lebih rentan terhadap manipulasi, kecemburuan, dan lain-lain.

Adakan layanan-layanan tambahan seperti transportasi bagi para penyandang cacat, fasilitas penitipan anak untuk gerilyawan yang menjadi orang tua, tetapi juga langkah-langkah yang memastikan bahwa mantan gerilyawan dari semua kelompok etnis dan minoritas akan memperoleh manfaat yang sama dari layanan tersebut. Sertakan indikator untuk memonitor kelompok-kelompok khusus dalam rangka untuk mengidentifikasi dan mengadaptasi program sejak dini.

Pendekatan berbasis kaum muda

Program-program DDR kian lama makin dihadapkan pada kenyataan bahwa mayoritas mantan gerilyawan merupakan kaum muda. PBB mendefinisikan kaum muda sebagai mereka yang berusia 15-24 tahun.

Perempuan dan laki-laki muda dapat memberikan kontribusi yang penting terhadap rekonstruksi dan pemulihan negara atau provinsi yang hancur karena peperangan. Mereka sering kali berada di garis depan pergerakan sosial, meminta dan mempromosikan perubahan dan masyarakat yang lebih berkeadilan sosial. Tenaga dan kapasitas inovasi mereka merupakan sumber daya yang tak ternilai sehingga tidak satu pun negara yang akan menyia-nyiakannya. Meskipun mereka cukup potensial, kaum muda juga mengalami kerentanan ekonomi dan sosial yang tinggi. Rasa pengasingan dan terpinggirkannya kaum muda yang frustrasi akibat tidak memiliki pekerjaan akan mengakibatkan —dalam banyak kondisi pra dan pasca konflik— perilaku kekerasan, kenakalan remaja, dan rekrutmen ke dalam *gang-gang*, kelompok-kelompok dan pasukan-pasukan bersenjata. Apabila tidak ditangani dengan baik, perilaku tersebut dapat menghancurkan kondisi damai yang masih rapuh.

Sejauh ini, kaum muda yang dipersenjatai telah dianggap sebagai kelompok gerilyawan yang paling bermasalah untuk dilucuti, didemobilisasi dan direintegrasikan dan diperlakukan sebagai kelompok yang memberikan risiko keamanan terbesar. Meskipun demikian, program-program DDR harus menangani kaum muda sebagai korban, sebagai potensi masalah, tetapi lebih penting lagi, sebagai aktor-aktor ekonomi dan sosial. Tenaga dan kemampuan mereka untuk memobilisasi diri sendiri dan bagian masyarakat yang lain dapat dan harus disalurkan menuju pemulihan dan pembangunan perdamaian. Kaum muda harus diintegrasikan ke dalam proses rekonstruksi, perdamaian dan pembangunan jangka panjang di Aceh. Penting untuk melibatkan mereka melalui proses DDR, karena salah satu frustrasi terbesar kaum muda adalah bahwa mereka jarang diminta atau didengar pendapatnya; tetapi mereka seringkali diharapkan menjadi “masa depan” masyarakat mereka. Program-program DDR harus dibangun berdasarkan pemahaman yang solid mengenai kebutuhan-kebutuhan khusus Aceh, ambisi dan potensi kaum muda.

Karena itu

- ♦ Buat DDR lebih terarah pada kaum muda, membangun potensi, kekuatan dan ambisi kelompok usia ini.
- ♦ Tanggapi kebutuhan-kebutuhan, pengalaman dan kondisi kurang beruntung mantan gerilyawan muda yang beragam, yang berbeda-beda tergantung pada usia, jender, etnisitas, kelas sosial, besar rumah tangga, tingkat pendidikan dan pelatihan, cacat, dan lain-lain.
- ♦ Siapkan dasar untuk kebijakan dan strategi pembangunan kaum muda nasional jangka panjang.

Tindakan

- ♦ Investasikan waktu dan sumber daya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi integrasi kaum muda.
- ♦ Prakarsai pembangunan kapasitas yang terarah pada kaum muda bagi para penyedia layanan.
- ♦ Doronglah sektor swasta dan lembaga pembangunan lokal untuk menciptakan kesempatan bagi kaum muda.
- ♦ Rangsanglah kegiatan-kegiatan/proses-proses untuk mensosialisasikan gerilyawan muda dalam komunitas penerima mereka.
- ♦ Pastikan bahwa DDR, sebagai suatu keseluruhan dan berbagai komponen-komponennya, mempertimbangkan dan membangun potensi dan ambisi kaum muda: Berikan mereka hak suara dan pastikan agar mereka merasa terwakili dalam proses DDR, proses rekonstruksi dan masyarakat yang baru yang merupakan kunci kesuksesan DDR.
- ♦ Latihlah dan berdayakan organisasi-organisasi pemuda untuk aktif dalam proses-proses DDR.
- ♦ Berikan bantuan yang akan memberikan manfaat langsung kepada kaum muda sembari memberikan respon bagi tujuan-tujuan jangka panjang mereka, seperti mempekerjakan kaum muda untuk membangun sekolah-sekolah, rumah sakit dan fasilitas olah raga dalam komunitas mereka.
- ♦ Bantulah mantan gerilyawan muda untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan dan pelatihan.
- ♦ Bantulah mantan gerilyawan muda untuk memulai usaha mereka sendiri.
- ♦ Sediakan seperangkat layanan-layanan kunci bagi mantan gerilyawan muda, seperti bantuan medis dan sosial.
- ♦ Identifikasi kesenjangan dalam kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pengembangan kaum muda dan carilah cara untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Kemitraan strategis untuk pengarusutamaan ketenagakerjaan

Ketimbang memperlakukan ketenagakerjaan sebagai suatu sektor yang terpisah, telah terbukti penting untuk membangun kemitraan dengan setiap kelompok aktor dan pemangku kepentingan sehingga mereka dapat sepenuhnya berpartisipasi untuk mengarusutamakan ketenagakerjaan ke dalam DDR. Pemerintah Indonesia harus memainkan peran koordinasi untuk memastikan bahwa jumlah pekerjaan sebanyak-banyaknya, baik yang sementara atau yang tetap, akan diciptakan.

Organisasi Internasional

Komunitas internasional menyadari fakta bahwa kesuksesan DDR sangat bergantung pada ditemukannya dan diciptakannya kesempatan-kesempatan kerja yang cukup. Ketenagakerjaan seharusnya tidak dipandang sebagai suatu sektor tersendiri, tetapi, pada faktanya, berada pada inti dari seluruh kegiatan rekonstruksi. Seluruh program-program reintegrasi rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk DDR, memiliki potensi yang sangat besar untuk menciptakan sejumlah besar pekerjaan, baik yang bersifat sementara maupun yang tetap. Misi perdamaian terpadu dan organisasi-organisasi internasional yang tidak memiliki fokus khusus pada kegiatan-kegiatan ketenagakerjaan jarang menyadari kontribusi potensial mereka terhadap penyediaan pekerjaan bagi mantan gerilyawan dan komunitas yang terkena konflik. Langkah-langkah khusus diperlukan untuk meningkatkan kesadaran ini dan untuk mengadakan tindakan, termasuk operasi pemulihan dari tsunami, agar terarah pada ketenagakerjaan semaksimal mungkin.

Karena itu

- ♦ Hubungi dan bentuklah kemitraan dengan aktor-aktor, organisasi non pemerintah dan sektor swasta nasional yang terkait dengan ketenagakerjaan untuk mengarusutamakan penciptaan lapangan kerja ke dalam DDR dan upaya-upaya rekonstruksi yang lebih luas.
- ♦ Tegaskan untuk menjadikan penciptaan lapangan kerja dalam situasi pasca konflik sebagai pusat perhatian, terutama untuk upaya-upaya reintegrasi.
- ♦ Advokasikan untuk membuat seluruh kegiatan-kegiatan DDR dan kegiatan-kegiatan DDR yang lain agar lebih terarah pada ketenagakerjaan.
- ♦ Hasilkan lebih banyak data sosial ekonomi pasca konflik mengenai isu-isu seperti kepemilikan tanah dan revitalisasi industri, untuk dapat merancang program-program reintegrasi dengan baik.
- ♦ Mengakui mereka sebagai pengusaha yang besar, terutama dalam konteks upaya-upaya pemulihan tsunami.
- ♦ Doronglah sektor swasta dan komunitas lokal dengan memberikan sub-kontrak kepada mereka.

Tindakan

- ♦ Uraikan strategi-strategi bersama yang terdapat di dalam mekanisme koordinasi PBB, Uni Eropa dan mekanisme-mekanisme koordinasi yang lain
- ♦ Gunakan kajian (lihat di atas) untuk meningkatkan sensitifitas organisasi-organisasi internasional yang relevan mengenai peran mereka dalam pengarusutamaan ketenagakerjaan.
- ♦ Belilah (hampir) semua bahan pangan dan barang non-pangan yang dibutuhkan oleh program dan misi DDR itu sendiri secara lokal.
- ♦ Utarakan peran dan tanggung jawab organisasi-organisasi internasional inti untuk menghindari terjadinya duplikasi upaya atau membuang-buang sumber daya.

Organisasi pengusaha dan pekerja

Organisasi pengusaha dan pekerja merupakan mitra yang penting untuk menciptakan dan mengarusutamakan ketenagakerjaan. Mereka juga memberikan pijakan awal yang unik pada saat struktur pemerintahan lemah atau tidak ada.

Dialog sosial harus ditingkatkan dalam program-program DDR, untuk menyalurkan kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan masyarakat secara damai dan konstruktif, mendeteksi bidang program yang terkait dengan program-program DDR dalam masyarakat dan membantu menanggapi secara cepat. Selain itu, mitra-mitra sosial harus dilibatkan untuk membawa tokoh-tokoh protagonis bersama di dunia kerja. Hal ini dapat membantu membangun kepercayaan dalam lembaga yang bertanggungjawab, sehingga masyarakat dapat memberikan pengorbanan dan upaya-upaya dengan keyakinan bahwa hal tersebut diperlukan dan disebarluaskan secara adil.

Karena itu

Kenalilah peran potensial organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja dalam meneruskan reintegrasi mantan gerilyawan di pasar kerja dan memobilisasi potensi mereka.

Tindakan

- ♦ Libatkanlah organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja dalam konsultasi berkala mereka mengenai kegiatan-kegiatan DDR yang terkait dengan ketenagakerjaan. Mereka dapat, antara lain:
 - Memberikan informasi mengenai sektor-sektor ekonomi yang potensial tumbuh, lembaga-lembaga pelatihan kejuruan, isu-isu di tempat kerja dan peraturan perundang-undangan yang tengah diajukan.
 - Membantu mengidentifikasi contoh-contoh praktik yang baik untuk mengorganisasi dan merekrut mantan gerilyawan.
 - Mediasi antara pemerintah, pekerja dan pengusaha.
 - Mempromosikan seperangkat kompetensi atau kurikulum inti nasional dan menciptakan sebuah sistem untuk pengakuan nasional
 - Memberikan tempat praktik kerja/magang
 - Mengorganisasikan layanan bantuan usaha untuk pengusaha-pengusaha yang baru memulai
- ♦ Melakukan upaya-upaya pembangunan kapasitas untuk meningkatkan kapasitas simetris organisasi pengusaha dan serikat pekerja, karena mereka sering kali sangat terpengaruh oleh konflik.
- ♦ Mengorganisasi kampanye peningkatan kesadaran kepada organisasi ini mengenai kepatuhan terhadap standar-standar perburuhan internasional dan konsep pekerjaan yang layak.
- ♦ Menyenggarakan pertemuan antara kalangan dunia usaha, Pengusaha, dan organisasi-organisasi pekerja untuk mendorong kalangan bisnis mempekerjakan mantan gerilyawan dan mendiskusikan kemungkinan hambatan dalam upaya mempekerjakan mantan gerilyawan.
- ♦ Mengundang mereka berpartisipasi dalam dan memberikan kontribusi pada lokakarya-lokakarya pelatihan untuk lembaga-lembaga pelatihan kejuruan.
- ♦ Meminta indikator monitoring dan evaluasi untuk program-program DDR kepada mereka, yang mempertimbangkan sudut pandang pengusaha dan pekerja.

Donor

Program-program DDR banyak menggunakan sumber daya (*resource intensive*). Kendati demikian, karena sering kali program-program tersebut dimulai pada saat kondisi damai masih rapuh, donor mungkin enggan untuk menanamkan modal. Selain itu, program-program reintegrasi yang berkelanjutan biasanya memperoleh lebih sedikit dana dibandingkan dengan program-program perlucutan senjata dan demobilisasi. Di antara alasan-alasan atas ketidakpedulian terhadap komponen reintegrasi ini adalah kebutuhan atas komitmen jangka panjang, sedikitnya hasil yang dapat dihitung dan nyata. Meskipun demikian, tidak memadainya dana untuk program-program reintegrasi dapat mengurangi kesuksesan seluruh proses DDR.

Agar program-program reintegrasi dapat efektif dan berkelanjutan, program-program tersebut memerlukan dana yang cukup untuk pembangunan kapasitas dan penciptaan lapangan kerja. Biasanya terdapat cukup dana untuk menyediakan layanan-layanan langsung, termasuk pembayaran tunai, pembangunan kembali infrastruktur dasar, memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan (untuk mengejar ketinggalan), membangun layanan rujukan, meningkatkan sensitivitas komunitas, dan lain-lain. Kebalikannya, dukungan keuangan yang cukup untuk bantuan yang menyeluruh dan berjangka panjang, seperti penciptaan lapangan kerja, telah terbukti lebih rumit.

Karena itu

- ♦ Doronglah donor untuk menggunakan pendekatan jangka panjang dan menyeluruh terhadap DDR, menempatkannya pada konteks yang lebih luas mengenai pembangunan jangka panjang. Penguatan kapasitas komunitas dan penciptaan lapangan kerja tidak dapat dicapai dalam periode pendanaan enam bulan sampai satu tahun, tetapi memerlukan komitmen sumber daya dan staf yang bersifat tahunan.
- ♦ Perjelas dengan para donor dan advokasikan kelompok-kelompok khusus secara dini bagaimana bantuan reintegrasi harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus kelompok-kelompok ini.
- ♦ Kembangkan mekanisme respon yang cepat seperti pengumpulan dana untuk digunakan segera guna menjembatani kesenjangan waktu yang mungkin terjadi.

Tindakan

- ♦ Konfirmasikan pengaturan antar para pihak dalam suatu Note Kesepahaman— urutan langkah-langkah, pembagian tanggung jawab, kerangka waktu dan output yang diharapkan.
- ♦ Susunlah mekanisme, seperti Manajemen Keuangan dan Unit Pengadaan untuk meningkatkan kepercayaan donor.
- ♦ Jajaki serangkaian kemungkinan bantuan keuangan yang luas untuk kegiatan-kegiatan DDR dan reintegrasi pada khususnya: penilaian kontribusi, dana sukarela melalui penggalangan dana yang terkonsolidasi, dana abadi khusus (*trust fund*), dana paralel yang berasal dari program-program bilateral atau organisasi-organisasi regional, tunai maupun kontribusi dalam bentuk lain dari lembaga-lembaga nasional. Bantuan bilateral yang kuat dapat menjadi alat yang penting untuk memastikan ketersediaan dana untuk program DDR.

Masyarakat sipil

Bank Dunia mendefinisikan organisasi non pemerintah sebagai “organisasi swasta yang melaksanakan kegiatan untuk mengurangi penderitaan, mempromosikan kepentingan kaum miskin, melindungi lingkungan, menyediakan layanan sosial dasar, atau menyelenggarakan pembangunan komunitas” (*Operational Directive 14.70*). Biasanya, terdapat sebuah pemisahan antara organisasi non pemerintah operasional yang merancang dan melaksanakan proyek-proyek yang terkait dengan pembangunan dan ornop advokasi yang membela atau mempromosikan tujuan tertentu. Keduanya dapat membantu reintegrasi mantan gerilyawan. Kedua jenis Ornop ini relevan untuk mengarusutamakan ketenagakerjaan. Karena mereka bekerja dalam kerja sama yang erat dengan orang-orang lokal, mereka dapat memberikan pengetahuan yang penting mengenai pelaksanaan kebijakan dan program-program yang terkait dengan ketenagakerjaan bagi mantan gerilyawan di lapangan dalam komunitas.

Kemandirian mereka dari pemerintah meningkatkan kredibilitas mereka di kalangan komunitas lokal sehingga Ornop advokasi dapat berguna dalam meningkatkan sensitivitas dan/atau proyek-proyek advokasi, ornop operasional dapat membantu menghindari ketergantungan pada bantuan eksternal (internasional) dan membantu dengan pelatihan kejuruan, keuangan mikro, proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan, dan lain-lain. Di banyak negara yang terkena dampak peperangan, keberadaan pemerintah di daerah-daerah pedesaan sangat terbatas. Ornop nasional dapat dimobilisasi sebagai penyedia layanan kepada mantan gerilyawan setelah mereka kembali tinggal dalam masyarakat..

Karena itu

- ♦ Kenalilah kapasitas potensial ornop-ornop dalam meneruskan reintegrasi mantan gerilyawan di pasar kerja dan memobilisasi potensi tersebut.
- ♦ Kenalilah kapasitas ornop untuk memberikan
- ♦ keahlian dan saran-saran yang dapat diberikan organisasi non-pemerintah mengenai masalah-masalah, kesempatan-kesempatan dan risiko-risiko dalam reintegrasi mantan gerilyawan, misalnya persepsi komunitas penerima.
- ♦ metode untuk memastikan partisipasi penuh kelompok-kelompok khusus dalam kehidupan sosial dan ekonomi komunitas.
- ♦ pelatihan kejuruan dan keterampilan hidup. Selain itu, organisasi-organisasi kepemudaan juga dapat menawarkan program-program bahasa, komputer dan pelatihan keterampilan.

- ♦ Kesempatan untuk mempekerjakan diri sendiri melalui proyek-proyek yang terkait dengan pembangunan komunitas, promosi usaha berskala kecil dan pekerjaan infrastruktur berbasis komunitas.
- ♦ Periksalah ornop yang mana yang memberikan pelatihan kualitas dan memiliki tanggung jawab pada donor.

Tindakan

- ♦ Doronglah partisipasi ornop dalam forum-forum dan pertemuan-pertemuan mengenai isu-isu yang terkait dengan ketenagakerjaan yang mempengaruhi mantan gerilyawan.
- ♦ Mobilisasi ornop untuk membantu penciptaan lapangan kerja.
- ♦ Dorong ornop-ornop internasional dan nasional untuk mempekerjakan mantan gerilyawan.
- ♦ Fasilitasi kerja sama dan koordinasi di antara berbagai aktor-aktor masyarakat sipil mengenai pelatihan dan kesempatan kerja bagi mantan gerilyawan dengan mempromosikan forum-forum ornop dan/atau konsorsium ornop.
- ♦ Kaji kualitas, netralitas dan kapasitas ornop nasional dengan mendorong pemeriksaan berkala melalui organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha.
- ♦ Kembangkan standar-standar dan panduan untuk pemberian layanan ornop dalam program-program pelatihan dan membuat ornop-ornop tersebut akubtabel kepada mereka.
- ♦ Libatkan ornop melalui proses DDR dan bertukar informasi dengan mereka.

6. Komponen-komponen Program Reintegrasi

Program reintegrasi ekonomi pada umumnya harus memiliki dua pijakan awal:

1. Meningkatkan kapasitas penyerapan pasar kerja, terutama dalam perekonomian lokal, dan
2. Memberikan bantuan kepada kelompok sasaran agar memiliki akses atas kesempatan kerja yang muncul.

Meningkatkan kapasitas penyerapan

Menciptakan kondisi sosial-ekonomi untuk integrasi (mantan gerilyawan) bertujuan menciptakan lingkungan yang mampu menyerap sejumlah besar gerilyawan setelah mereka didemobilisasi. Fase dalam proses ini merupakan persyaratan bagi fase operasional yang memberikan layanan langsung bagi para gerilyawan dan komunitas penerima. Hal ini mencakup bidang aksi yang luas dan khususnya berlangsung atas konsensus yang luas.

Ekonomi informal

Di banyak wilayah yang terkena dampak konflik, ekonomi informal tumbuh ketika ekonomi formal umumnya tidak bergerak, atau melemah. Mantan gerilyawan pada khususnya mungkin mendapatkan pekerjaan dalam ekonomi informal, sebagian sebagai akibat dari rendahnya pendidikan mereka. Oleh karena itu, bantuan terarah untuk meningkatkan potensi ekonomi informal guna menawarkan lebih banyak pekerjaan yang lebih baik untuk mantan gerilyawan menjadi penting.

Penciptaan lapangan kerja bagi mantan gerilyawan dalam ekonomi informal harus bergerak di sekitar tiga titik: meningkatkan produktifitas dan kapasitas penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kondisi kerja dan menciptakan insentif untuk “memformalkan” kegiatan-kegiatan informal.

Meningkatkan kapasitas penyerapan ekonomi informal dan mempromosikan pekerjaan yang layak memerlukan seperangkat langkah yang rumit di level kebijakan, program dan proyek. Proyek-proyek perkotaan yang banyak menyerap tenaga kerja dapat efektif, terutama apabila berbagai proyek itu menggabungkan upaya penciptaan kesempatan kerja dengan pelatihan dan terarah pada pembangunan kembali infrastruktur yang memiliki manfaat ekonomi.

Dalam upaya menciptakan kesempatan kerja bagi mantan gerilyawan di daerah pedesaan, insentif dapat ditawarkan bagi pertanian komersil, diperkenalkannya teknologi yang memadai, dikenalkannya dan diperbaikinya irigasi dan sumber-sumber air yang lain, ditingkatkannya akses jalan menuju pasar, pelatihan untuk para petani dan diperkenalkannya teknik-teknik pengolahan makanan di sektor pedesaan.

Selain itu, berbagai hambatan bagi aktor-aktor ekonomi informal untuk memasuki ekonomi formal harus dikurangi, dan standar-standar perburuhan internasional dalam ekonomi informal harus ditegakkan.

Tindakan

- ♦ Memindahkan teknologi yang memadai ke sektor perekonomian informal, mengorganisasikan pelatihan yang terkait, memberikan akses layanan bantuan dan kredit (mikro) kepada mereka.
- ♦ Menyederhanakan kerangka hukum bagi mereka yang hendak menjalankan usaha, menerapkan aturan-aturan dan prosedur-prosedur secara transparan dan konsisten serta mengurangi biaya transaksi dalam ekonomi formal.
- ♦ Memerangi eksploitasi perburuhan dan buruh anak dalam ekonomi informal, terutama bentuk-bentuk terburuknya.
- ♦ Memberikan bantuan khusus bagi perempuan yang bekerja di ekonomi informal; mereka biasanya diberi pekerjaan dengan penghasilan yang rendah dan menghadapi kondisi yang terburuk.

Ekonomi formal

Kesempatan kerja formal umumnya sangat terbatas dalam perekonomian pasca konflik. Selain itu, mantan gerilyawan jarang yang memiliki modal untuk bersaing dalam memperoleh lowongan yang terbatas. Meskipun demikian, sebagai bagian dari persiapan dasar untuk DDR dan keseluruhan rekonstruksi dan pemulihan, pemerintah dan dunia usaha harus menerima bantuan untuk memulai (kembali) kegiatan-kegiatan yang penting secepat mungkin. Di antara populasi mantan gerilyawan, sering kali terdapat manajer senior, spesialis IT, dokter, insinyur, dan lain-lain yang dapat mengisi sejumlah lowongan ini apabila dilatih (kembali) dengan baik.

Selain itu, biasanya dalam keadaan normal terdapat jumlah pekerjaan yang cukup besar dalam pasukan keamanan yang baru seperti polisi dan tentara.

Karena itu

- ♦ Cocokkan kesempatan kerja dan persyaratan pelatihan untuk mantan gerilyawan dengan permintaan yang terdapat di pasar kerja lokal.
- ♦ Organisir pelatihan terarah bagi mantan gerilyawan untuk mengajarkan mereka keterampilan-keterampilan yang relevan dan/atau memberikan mereka pendidikan yang relevan.
- ♦ Membantu pemerintahan nasional dan lokal serta perusahaan-perusahaan swasta untuk mengisi kembali kantor-kantor mereka dengan staf dengan merekrut mantan gerilyawan.
- ♦ Menciptakan insentif untuk mempekerjakan mantan gerilyawan (apabila dianggap memadai dalam konteks yang ada).
- ♦ Memberikan kontrak-kontrak dalam program-program DDR kepada perusahaan kelas menengah dan perusahaan-perusahaan besar nasional.
- ♦ Periksa apakah persyaratan/tingkat penerimaan untuk pekerjaan di sektor keamanan, seperti di kepolisian dan angkatan bersenjata yang baru, cocok dengan profil mantan gerilyawan.

Tindakan

- ♦ Mengorganisasikan pertemuan-pertemuan di mana pengusaha lokal (bisnis, pemerintah lokal, lembaga-lembaga bantuan publik), lembaga-lembaga pelatihan, kantor-kantor ketenagakerjaan lokal dan organisasi-organisasi yang mewakili kepentingan mantan gerilyawan yang menganggur dapat mendiskusikan bagaimana permintaan dan penawaran dalam pasar kerja dapat dicocokkan sebaik mungkin.
- ♦ Bekerja sama dengan pusat-pusat ketenagakerjaan untuk menciptakan pangkalan data berisi profil mantan gerilyawan yang mencari pekerjaan yang dapat diakses.
- ♦ Mengumumkan lowongan melalui stasiun radio lokal, papan pengumuman di tempat-tempat keramaian, seperti kantor pemerintah daerah, pasar, pusat-pusat komunitas dan tempat-tempat ibadah.
- ♦ Memungkinkan pengusaha dan mantan gerilyawan yang menganggur yang potensial untuk saling mengenal satu sama lain (mantan gerilyawan mengunjungi tempat pengusaha yang potensial, magang, dan lain-lain).
- ♦ Memberikan pelatihan terarah untuk memfasilitasi keterbukaan sejumlah mantan gerilyawan ke dalam pasukan keamanan yang baru.

Mendorong sektor swasta

Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah telah menarik diri dari kegiatan-kegiatan produktif sebagai bagian dari beragam program reformasi struktural. Peran sektor swasta dalam penciptaan lapangan kerja menjadi semakin meningkat, tetapi masih terlalu lemah untuk mengatasi masalah pengangguran yang besar, terutama pada masa-masa setelah konflik. Merancang dan melaksanakan kebijakan dan program untuk mendorong sektor swasta mungkin merupakan langkah yang paling mendesak dan efektif guna menyiapkan dasar bagi DDR dan keseluruhan pemulihan.

Karena itu

- ♦ Kaji ulang dan adaptasi perundang-undangan nasional dalam kaitannya dengan pengembangan usaha.
- ♦ Berikan bantuan kepada usaha-usaha pra-konflik untuk memulai kembali kegiatannya.
- ♦ Tingkatkan dan lakukan reorientasi keterampilan-keterampilan teknis dan kembangkan kapasitas manajemen usaha-usaha yang sudah ada untuk memperluas dan menstimulir daya serap tenaga kerja mereka.
- ♦ Bantulah sektor swasta dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mereintegrasi mantan gerilyawan muda dan anak-anak serta kaum muda lain yang terkena dampak peperangan. Mayoritas kaum muda perlu dilatih melalui praktik kerja dan dipekerjakan dalam bisnis yang sudah ada dan yang baru.
- ♦ Berikan penguatan kapasitas di kalangan bisnis yang sudah ada untuk memberikan pelatihan.
- ♦ Lakukan rehabilitasi atau bangunlah infrastruktur kunci yang akan memberikan manfaat ekonomi langsung seperti akses jalan menuju pasar, pasar, dan lain-lain. Selain itu, proyek-proyek tersebut akan meningkatkan

infrastruktur usaha, menyediakan pekerjaan sementara dan kesempatan pelatihan untuk mantan gerilyawan dan populasi lokal mereka, arus dana sementara ke dalam komunitas karena gaji akan memberikan dampak positif terhadap pasar lokal, serta pelatihan dan memperkuat kontraktor kecil dengan pengadaan kontrak yang digabungkan dengan pelatihan.

Tindakan

- ♦ Aturlah pertemuan dengan departemen-departemen terkait seperti ketenagakerjaan dan perdagangan, serta organisasi-organisasi pekerja untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan bagi mereka yang ingin memulai kembali usaha dan memperluas kegiatan-kegiatan mereka.
- ♦ Berikan kontrak-kontrak pembangunan gedung di sisi-sisi permukiman, akses jalan, dan lain sebagainya kepada aktor-aktor sektor swasta lokal. Buatlah sebagai syarat agar mereka mempekerjakan mantan gerilyawan dalam persentase tertentu.
- ♦ Lengkapi kalangan bisnis untuk memberikan pelatihan kepada mantan gerilyawan. Hal ini dapat mencakup praktik kerja, pelatihan di tempat kerja (*on the job training*) dan pelatihan kembali dan memberikan layanan bantuan usaha kepada pengusaha baru (mantan gerilyawan).
- ♦ Prakarsai proyek-proyek rehabilitasi infrastruktur berdasarkan kajian ekonomi lokal .

Kajian ulang mengenai kebijakan-kebijakan nasional dalam kaitannya dengan usaha dapat segera dilakukan.

Aktor-aktor sektor swasta dapat menjadi mitra kunci dalam proses DDR, yang berarti bahwa mereka akan dilibatkan sebelum DDR dimulai dalam rangka memberikan layanan-layanan yang diperlukan seperti pembangunan situs gedung tempat perlucutan senjata, akses jalan, produksi pangan untuk tempat-tempat penampungan, membuat perabot, dan lain-lain.

Segera setelah situasi keamanan memungkinkan, proyek-proyek berbasis tenaga kerja yang menitikberatkan manfaat ekonomi dapat dimulai. Proyek-proyek ini harus sepenuhnya berjalan sebelum mantan gerilyawan berdatangan pulang.

Membangun kemitraan swasta-publik

Kemitraan Publik-Swasta (*Public-Private Partnership/PPP*) melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan yang mewakili sektor publik dan swasta serta masyarakat sipil. PPP didasarkan pada pertimbangan pengumpulan sumber daya, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan akses dan kualitas informasi, infrastruktur, layanan dan produk. Bentuk kerja sama ini dapat sangat bermanfaat bagi reintegrasi mantan gerilyawan dan untuk kohesi sosial masyarakat pasca konflik pada umumnya.

Karena itu

- ♦ Bangunlah PPP di wilayah-wilayah yang paling sesuai untuk reintegrasi mantan gerilyawan, seperti infrastruktur dan layanan dasar, keterbukaan sosial dan ketenagakerjaan, serta meningkatkan usaha kecil.
- ♦ Libatkanlah mantan gerilyawan dalam kepemilikan usaha, mantan gerilyawan yang dipekerjakan oleh pengusaha atau mantan gerilyawan yang dikelola dalam sebuah organisasi berbasis komunitas.

Tindakan

- ♦ Bantulah pendirian PPP dengan keterwakilan utama sektor industrial, akademisi dan lembaga-lembaga regulasi dengan tujuan untuk membuat pendidikan dan pelatihan mantan gerilyawan menjadi lebih kondusif terhadap pasar kerja. Perusahaan-perusahaan domestik dan/atau internasional dapat membantu menyediakan pelatihan kejuruan bagi mantan gerilyawan.
- ♦ Doronglah pemerintah daerah untuk merasionalisasi manajemen pelayanan publik seperti pengumpulan sampah atau pasokan air dengan memprivatisasikannya dengan melibatkan perusahaan-perusahaan lokal dan organisasi-organisasi berbasis komunitas
- ♦ Jajakilah pilihan-pilihan untuk PPP dalam program-program DDR dan rekonstruksi nasional, melibatkan perusahaan luar negeri dan/atau domestik sebagai penyokong dana dan mitra pelaksana. Mereka dapat membawa investasi tambahan dan teknologi.
- ♦ Tetapkan tujuan-tujuan yang jelas dan terukur untuk PPP untuk memfasilitasi monitoring dan evaluasinya (misalnya, penciptaan 250 pekerjaan untuk mantan gerilyawan di sektor konstruksi).
- ♦ Latihlah staf layanan ketenagakerjaan dalam soal hubungannya dengan pemberi kerja dan mencari pekerjaan untuk membangun kerja sama dalam hubungan kerja. Staf Layanan Ketenagakerjaan dapat menggunakan informasi yang dihasilkan oleh kajian pasar kerja sebagai sebuah aset dalam membangun hubungan ini karena pengusaha tertarik pada informasi ini untuk kepentingan bisnis mereka, selain untuk mempekerjakan.

Mengaitkan kebijakan nasional dan pembangunan daerah

Kebijakan nasional dan pembangunan daerah memiliki kaitan yang erat. Idealnya, keduanya merupakan dinamika dua arah. Kebijakan nasional mengarahkan pembangunan daerah secara luas dan memberikan kerangka hukum dan perundang-undangan yang terkait. Sebaliknya, prakarsa-prakarsa pembangunan daerah merupakan sumber perumusan kebijakan nasional. Prakarsa-prakarsa tersebut mengindikasikan apa yang dapat dijalankan secara lokal dan apa yang tidak dapat dijalankan serta menentukan prioritas-prioritas pembangunan daerah. Pada praktiknya, banyak halangan yang harus diatasi untuk menghasilkan interaksi yang seimbang antara pemerintahan di tingkat nasional dan lokal. Terutama di negara-negara pasca konflik, lemahnya lingkup kelembagaan dan kebijakan, kurangnya kapasitas aktor-aktor nasional dan lokal serta terbatasnya cara-cara dan sumber daya menghambat interaksi yang sehat antara kedua level pemerintahan tersebut.

Tindakan

- ♦ Meningkatkan kesadaran di kalangan aktor nasional dan lokal mengenai pentingnya dinamika dua arah (nasional-lokal) dalam upaya integrasi mantan gerilyawan.
- ♦ Memfasilitasi dialog dan pertukaran antaraktor penyusun kebijakan nasional dan aktor-aktor pembangunan daerah.
- ♦ Membangun kapasitas aktor-aktor nasional dan lokal dalam perencanaan, dialog publik-swasta, pembangunan ekonomi lokal dan sebagainya.
- ♦ Memperkuat kapasitas pelaksanaan penyedia layanan lokal (organisasi keuangan mikro, lembaga pelatihan kejuruan, pemerintah daerah, penyedia layanan bisnis, dan lain-lain), dan membuat layanan dapat diakses oleh mantan gerilyawan.

Pembangunan kapasitas nasional dan provinsi

Setelah konflik bersenjata, lemahnya struktur nasional membuat aktor-aktor internasional memainkan fungsi-fungsi yang biasanya dijalankan oleh aktor-aktor atau komunitas nasional. Dalam kerangka kerja DDR, organisasi-organisasi internasional memberikan, misalnya, informasi mengenai pasar kerja, mengorganisasikan pelatihan kejuruan dan memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi. Meskipun demikian, intervensi-intervensi yang diperlukan ini dapat mengakibatkan ketergantungan yang akan melumpuhkan aktor-aktor dan lembaga-lembaga nasional jauh melebihi fase keadaan darurat. Oleh karena itu, sangat penting untuk membangun kapasitas nasional sedini mungkin untuk kepentingan mantan gerilyawan dan juga penduduk secara luas.

Untuk meningkatkan pusat-pusat pelatihan, ketenagakerjaan dan layanan-layanan sosial, fasilitas penitipan anak dan aspek-aspek program reintegrasi yang lain juga akhirnya akan bermanfaat bagi kelompok-kelompok penduduk yang lain. Karena itu, pendekatan yang sifatnya terbuka ini menghapuskan sentimen bahwa upaya-upaya internasional hanya menguntungkan mantan gerilyawan secara berlebihan. Secara keseluruhan, menghargai dan memperkuat kebijakan-kebijakan, hukum dan lembaga-lembaga nasional dapat membantu aktor-aktor lokal menyiapkan kelanjutan proses reintegrasi setelah aktor-aktor internasional meninggalkan proses tersebut.

Karena itu

- ♦ Pastikan bahwa bantuan internasional yang ditawarkan sejalan dengan strategi reintegrasi nasional.
- ♦ Perkuat kapasitas provinsi seperti lembaga-lembaga pelatihan, layanan ketenagakerjaan, kapasitas statistik, asosiasi-asosiasi bisnis, daerah/komunitas, layanan kesehatan, penyedia keuangan mikro dan masyarakat sipil.
- ♦ Perkuat kapasitas nasional
 - kementerian dan departemen yang terkait
 - organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha
 - Organisasi-organisasi yang mengoordinisasikan pelatihan kejuruan
 - Lembaga-lembaga pasar kerja seperti pelatihan, penyedia layanan kredit dan ketenagakerjaan.
 - Penyedia layanan sosial termasuk mereka yang terlibat dengan kesehatan, obat-obatan dan trauma.
 - Aktor-aktor masyarakat sipil seperti organisasi kaum muda dan perempuan, asosiasi veteran, penyandang cacat dan penderita HIV/AIDS
 - Lembaga-lembaga dan layanan-layanan perlindungan anak
- ♦ Tergantung pada situasi yang ada, sediakan layanan hukum dan reformasi, membantu reformasi sektor keamanan dan reformasi undang-undang perburuhan, mengadaptasi kebijakan-kebijakan ekonomi dan sosial.

Tindakan

- ♦ Bentuklah Komisi/Komite Nasional (atau provinsi) antar-kementerian untuk DDR (*National (or provincial) Commission/Committee for DDR /NCDDRs*) untuk mengkoordinasikan dan mengawasi proses DDR.
- ♦ Libatkan cukup banyak kementerian yang terkait dengan reintegrasi dalam komisi, khususnya kementerian yang menangani ketenagakerjaan dan pelatihan kejuruan, pendidikan, jender atau perempuan, infrastruktur, kepemudaan, kesehatan dan pembangunan pedesaan.
- ♦ Berdasarkan kajian terdahulu, bangunlah kapasitas dengan
 - melatih staf tentang isu-isu khusus mantan gerilyawan
 - menyediakan peralatan, termasuk teknologi informasi (IT), dan kendaraan
 - membangun, memperbaiki, memperbaharui gedung-gedung
 - mengadaptasi layanan-layanan seperti kurikulum
 - memprakarsai mekanisme koordinasi
 - melaksanakan analisis dan pelatihan jender
- ♦ Mengadvokasi tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) di kalangan perusahaan, menjelaskan kepada mereka mengenai bagaimana perusahaan dapat memperoleh manfaat dari reintegrasi mantan gerilyawan dan apa yang dapat mereka lakukan untuk membantu.
- ♦ Fasilitasi pertukaran informasi, pengalaman dan praktik-praktik terbaik dengan aktor-aktor nasional DDR di negara-negara lain.

Penyedia layanan harus mulai menerima sumber daya, bantuan teknis dan bantuan-bantuan lain yang dibutuhkan dalam fase pasca konflik yang paling awal, sehingga program itu dapat berjalan tepat pada waktunya. Banyak program DDR yang gagal karena aspek reintegrasi tidak siap untuk melayani mantan gerilyawan, sehingga mengakibatkan frustrasi di antara mereka. Persiapan awal akan membantu mengurangi “masa tunggu” yang berbahaya setelah demobilisasi. Pembangunan kapasitas penyedia layanan harus benar-benar direncanakan dan dimulai sebelum perlucutan senjata dimulai.

Mempersiapkan pelatihan kejuruan

Pelatihan kejuruan merupakan komponen utama bagi seluruh program DDR, karena mendorong kemampuan kerja mantan gerilyawan merupakan kunci keberhasilan mereka. Tantangan-tantangan untuk meningkatkan sistem pelatihan kejuruan sehingga dapat memberikan kuantitas dan kualitas kursus-kursus yang dibutuhkan oleh mantan gerilyawan sangat besar. Banyak yang bergantung pada kapasitas sistem pada masa pra-konflik, dan tingkat kehancuran yang diakibatkan oleh konflik. Tetapi, meskipun beragam, diperlukan waktu dan dana dalam jumlah yang besar. Selain itu, sistem pelatihan harus dibangun secara berkelanjutan, perlu memastikan agar kelompok-kelompok sasaran lain juga dapat memperoleh manfaat pelayanan tersebut.

Di Aceh, penting untuk meningkatkan kapasitas penanganan pelatihan secara kualitatif dan kuantitatif. Mulai sejak dini harus diupayakan untuk memastikan tersedianya jumlah tempat-tempat berkualitas yang memadai untuk DDR.

Karena itu

- ♦ Tentukan persiapan yang dibutuhkan untuk pelatihan kejuruan.
- ♦ Pastikan pendanaan untuk pembangunan kapasitas pelatihan.
- ♦ Berikan bantuan kepada penyedia pelatihan untuk membangun kembali tempat-tempat pelatihan dan mengganti peralatan mereka dengan yang lebih baru
- ♦ Bantulah para penyedia pelatihan untuk mengadaptasi kurikulum mereka dengan permintaan atas tenaga terampil yang ada pada saat ini.
- ♦ Fasilitasi struktur koordinasi pelatihan kejuruan agar dapat berjalan.
- ♦ Bangunlah kapasitas yang mencakup elemen-elemen kemampuan baca tulis dan keterampilan-keterampilan hidup dalam kursus-kursus pelatihan.
- ♦ Bantu kementerian yang bertanggung jawab atas pelatihan kejuruan untuk memprakarsai mekanisme sertifikasi dan pengendalian mutu.

Pembangunan ekonomi lokal pada komunitas penerima

Pembangunan Ekonomi Daerah (*Local Economic Development/LED*) merupakan pendekatan yang tepat untuk menargetkan komunitas penerima di Aceh. Proses tersebut dibangun atas dasar dialog dan kerja sama antar para pemangku kepentingan daerah seperti pemerintah daerah, lembaga-lembaga bantuan UKM, lembaga-lembaga pelatihan, ornop-ornop, asosiasi-asosiasi usaha kecil dan organisasi-organisasi yang mewakili mantan gerilyawan. Proses LED menawarkan kesempatan yang besar untuk mengkonsolidasi perdamaian dan mereintegrasi mantan gerilyawan dengan memperkenalkan dialog dan menciptakan kesempatan-kesempatan kerja sementara menanggapi kebutuhan-kebutuhan pemulihan komunitas yang lebih luas.

Karena itu

- ♦ Mulailah *Prakarsa Dampak Cepat (Quick Impact Initiatives)* (bagian dari strategi jangka pendek) untuk mengurangi ketegangan dalam komunitas dan meningkatkan kepercayaan dan komitmen.
- ♦ Mulailah melakukan *intervensi jangka pendek* untuk menyiapkan segmen-segmen sosial dan ekonomi komunitas untuk reintegrasi mantan gerilyawan dan upaya-upaya pembangunan yang memiliki jangka waktu yang lebih panjang dan untuk memprakarsai dialog antar pemangku kepentingan utama.
- ♦ Mulailah *prakarsa-prakarsa jangka menengah sampai jangka yang lebih panjang* untuk membuat prakarsa-prakarsa reintegrasi dan pembangunan ekonomi daerah menjadi upaya yang berkelanjutan.

Tindakan

Contoh Prakarsa Dampak Cepat:

- ♦ Mempromosikan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan melalui hibah dalam bentuk *in-kind* (misalnya peralatan, bibit), skema *in-kind* bergulir (misalnya ternak) atau skema kredit mikro.
- ♦ Merehabilitasi rumah dan infrastruktur umum, apabila dimungkinkan, bergantunglah pada pekerja lokal (mantan gerilyawan) dan bahan-bahan lokal.
- ♦ Mempromosikan jasa dan barang yang merupakan permintaan yang langsung dan jelas ada (misalnya roti, toko keperluan sehari-hari).

Contoh intervensi-intervensi jangka pendek:

- ♦ Mendukung penyelenggaraan konsultasi dan dialog di antara pemangku kepentingan kunci dalam Forum LED. Forum tersebut akan mengidentifikasi prioritas-prioritas pembangunan dan merumuskan strategi-strategi dan intervensi-intervensi yang mendukung reintegrasi mantan gerilyawan ke dalam perekonomian lokal.
- ♦ Menjadikan aktor-aktor lokal lebih sensitif dalam soal pentingnya mengintegrasikan mantan gerilyawan, dengan kesempatan kerja lokal dan pembangunan daerah dan penyebarluasan data teritorial.
- ♦ Mendukung pengaturan kembali produksi di bidang-bidang perekonomian utama melalui pendirian kembali koperasi atau asosiasi-asosiasi usaha kecil, apabila dimungkinkan, libatkanlah mantan gerilyawan
- ♦ Mendukung rekonstruksi infrastruktur sekunder yang berbasis tenaga kerja (termasuk mantan gerilyawan)

Contoh intervensi jangka menengah dan jangka yang lebih panjang:

- ♦ Memfasilitasi akses informasi teritorial, informasi keuangan dan layanan bisnis (BDS) untuk mantan gerilyawan dan kelompok-kelompok lain
- ♦ Melembagakan Forum LED dengan menyatukannya dalam struktur atau kerangka hukum yang ada
- ♦ Membangkitkan penyedia layanan yang ada (pemerintah daerah, lembaga-lembaga pelatihan, konsultan bisnis, Ornop-Ornop, lembaga-lembaga keuangan mikro) atau membuat struktur-struktur baru (misalnya Lembaga Pembangunan Ekonomi Daerah, pusat informasi pasar kerja)
- ♦ Melobi dan mengadvokasi prioritas-prioritas pembangunan daerah di tingkat nasional dan di tingkat organisasi internasional yang ada di negara tersebut

Seperti diperlihatkan di atas, intervensi-intervensi LED harus menanggapi kebutuhan-kebutuhan dan prioritas-prioritas lokal yang berubah seiring dengan berjalannya waktu. Untuk mencerminkan hal itu, strategi-strategi LED biasanya dibagi menjadi fase-fase intervensi dampak cepat, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Lamanya waktu untuk setiap fase tergantung pada situasi lokal.

Inisiatif yang didorong oleh komunitas

Bank Dunia semakin banyak menerapkan pendekatan Pembangunan yang Didorong oleh Komunitas (*Community-Driven Development/CDD*) di negara-negara yang terkena dampak konflik. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang memberikan kendali dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan dan sumber daya investasi kepada kelompok-kelompok masyarakat. Melalui bantuan kepada aksi bersama dan peningkatan akuntabilitas hubungan di antara komunitas, pemerintah, dan sektor swasta, pelaksanaan CDD bertujuan memperkuat pemerintahan daerah, pemberian layanan lokal dan modal sosial.

Pendekatan CDD dalam konteks program-program perlucutan senjata, edmobilisasi, dan reintegrasi (DDR) memberikan insentif bersama untuk membangun kembali keyakinan, kepercayaan dan hubungan yang telah hancur selama perang. Aksi bersama untuk kebaikan bersama bertujuan meningkatkan rasa saling ketergantungan, menyembuhkan yang terpecah-belah, memberikan harapan, dan oleh karenanya mendukung proses reintegrasi. Kepemilikan lokal yang terdapat dalam proses CDD lebih jauh akan dapat membantu mengembangkan praktik-praktik akuntabilitas dan transparansi.

Pendekatan CDD yang didorong oleh permintaan akan pemulihan komunitas mencakup landasan ganda (*dual platforms*) sebagai mekanisme yang efisien untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan komunitas dan sebuah instrumen untuk pemberdayaan. Landasan-landasan ini memberikan peluang kepada komunitas penerima di mana struktur-struktur fisik dan sosial yang mereka miliki telah hancur dan kapasitas kelembagaan sangat minim. Menggabungkan pembangunan ekonomi lokal dan CDD tampaknya akan menjadi metode yang tepat untuk diterapkan di Aceh.

Karena itu

- ♦ Usahakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesak, tawarkan dividen perdamaian yang nyata, berikan harapan, bangunlah landasan untuk pengambilan keputusan yang inklusif dan kembangkan kapasitas yang penting.
- ♦ Berikan jaminan kepada para mantan gerilyawan perlindungan dan inklusi
- ♦ Diskusikan proyek-proyek secara khusus yang memberikan manfaat ekonomi/ ketenagakerjaan seperti akses jalan melalui proyek-proyek pemerintah, khususnya pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang banyak menyerap tenaga kerja.
- ♦ Tekankan bantuan yang cepat dan hemat kepada komunitas sambil menyiapkan landasan untuk membangun struktur pemerintahan yang menekankan pada pilihan-pilihan dan akuntabilitas daerah.
- ♦ Tingkatkan perhatian kepada inklusifitas, termasuk kajian ulang mengenai keanggotaan komunitas dan kepemimpinan dewan, dan penguatan kemampuan secara bertahap seiring dengan peningkatan kapasitas penyerapan.

Tindakan

Meskipun potensi manfaat CDD dalam konteks konflik itu tinggi, bukti menunjukkan bahwa kualitas rancangan program CDD merupakan hal yang penting. Kegagalan program dalam konteks DDR yang rapuh dapat bersifat destruktif karena program tersebut dapat memupuskan harapan dan komitmen terhadap proses perdamaian. CDD menghadapi sejumlah tantangan yang unik di negara-negara yang terkena dampak konflik yang menandakan kebutuhan atas pendekatan-pendekatan yang spesifik terhadap konflik dan didorong oleh komunitas untuk menanggapi isu-isu tertentu yang terkait dengan lingkungan tersebut.

- ♦ Menetapkan metode dan tujuan yang realistis dan bersifat mendasar yang akan mendukung keberhasilan yang cepat bersamaan dengan pembangunan landasan untuk proses-proses yang lebih substantif. Misalnya, selama DDR komunitas terlibat dalam suatu proses perencanaan yang singkat, hanya mendapatkan pelatihan untuk elemen-elemen yang penting, dan merancang proyek-proyek kecil yang bermanfaat bagi seluruh anggotanya.
- ♦ Fokus pada upaya-upaya untuk memperbaharui kesempatan-kesempatan untuk menghasilkan pendapatan yang sah dengan mengaitkan pendekatan pembangunan ekonomi daerah dan pendekatan CDD.
- ♦ Tekankan bantuan yang cepat dan hemat kepada komunitas sambil menyiapkan landasan untuk membangun struktur pemerintahan yang menekankan pada pilihan dan akuntabilitas daerah.²⁹
- ♦ Laksanakan kajian, perancangan dan penerapan yang cepat untuk memastikan pencairan dana sub-proyek yang cepat pula.
- ♦ Bangunlah kapasitas dasar dan berikan penekanan pada pembangunan kapasitas komunitas
- ♦ Pertimbangkan isu-isu perlindungan, terutama bagi tentara-tentara muda termasuk ibu muda.
- ♦ Tetapkan target komunitas yang banyak menerima mantan gerilyawan.

Bantuan kepada para penyandang cacat

Konflik bersenjata dan bencana tsunami meninggalkan sejumlah besar orang-orang yang terluka, baik warga sipil maupun gerilyawan. Mantan anggota pasukan bersenjata yang cacat, baik pemberontak maupun pasukan pemerintah, semuanya merupakan korban konflik bersenjata. Mereka memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus dan mungkin membutuhkan perawatan khusus serta langkah-langkah untuk memastikan keberhasilan reintegrasi mereka. Mantan gerilyawan dan warga sipil penyandang cacat yang terkena dampak konflik biasanya menerima beberapa bentuk bantuan medis dan purnawirawan tentara pemerintah dapat menerima pensiun. Meskipun demikian, jarang sekali kita menemukan bantuan untuk mantan gerilyawan penyandang cacat yang menjadi bagian dari kelompok pemberontak. Meskipun ada beberapa bantuan medis yang dibutuhkan, banyak mantan gerilyawan penyandang cacat yang dapat dan harus menerima manfaat dari program-program reintegrasi ekonomi dan layanan-layanan yang sama seperti yang tersedia bagi mantan gerilyawan yang tidak menyandang cacat.

29 See Sarah Cliffe, Scott Guggenheim, Markus Kostner: *Community-driven reconstruction as an instrument in war-to-peace transitions*, CPR Working Paper No.7 (Washington, DC, The World Bank, August 2003).

Karena itu

- ♦ Berikanlah kepada mantan gerilyawan penyandang cacat akses pelatihan kejuruan utama dan program-program perolehan keterampilan yang lain, kesempatan dan sumber daya pengembangan usaha kecil, layanan ketenagakerjaan dan bagian yang adil dalam kesempatan kerja formal.
- ♦ Hilangkanlah hambatan terhadap partisipasi mantan gerilyawan penyandang cacat dalam program-program reintegrasi ekonomi; hambatan ini bisa berupa sikap, kebijakan dan hukum yang diskriminatif, tetapi juga kesulitan mengakses pelayanan dan tempat.
- ♦ Mengorganisasi layanan bantuan ketenagakerjaan khusus.
- ♦ Mendorong komunitas lokal untuk mempromosikan dan melindungi hak mantan gerilyawan penyandang cacat untuk bekerja.

Tindakan

Sebuah pendekatan yang inklusif terhadap sub-kelompok ini harus diadopsi dalam pelaksanaan program-program bantuan reintegrasi ekonomi mantan gerilyawan.

- ♦ Identifikasi kebutuhan-kebutuhan khusus mantan gerilyawan dan warga sipil yang menyandang berbagai jenis kecacatan, dalam rangka menyediakan bagi mereka rancangan dan pelaksanaan program. Misalnya, persyaratan untuk pengguna kursi roda dan mantan gerilyawan tuna netra sangat berbeda.
- ♦ Mempromosikan dan membantu integrasi ekonomi mantan gerilyawan dan warga sipil penyandang cacat melalui pengarusutamaan pelatihan dan program-program yang menghasilkan pendapatan. Gunakan pusat-pusat rehabilitasi khusus yang ada dan yang terbatas untuk digunakan mereka yang menyandang cacat yang parah.
- ♦ Memberikan layanan rehabilitasi dan bantuan di tingkat komunitas, termasuk sistem informasi dan rujukan, bimbingan dan dukungan rekan sebaya (*peer support*), pelatihan keterampilan, transportasi yang dapat diakses, dan lain-lain.
- ♦ Adaptasi kemampuan untuk mengakses alat-alat dan tempat kerja untuk mempermudah orang-orang yang menyandang cacat fisik agar dapat menjadi lebih produktif ketika bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan pertanian dan pekerjaan-pekerjaan manual lainnya. Sebuah buku pegangan mengenai adaptasi alat-alat yang dimaksud telah dikembangkan untuk tujuan ini³⁰, dan ILO mengadvokasikan rekrutmen pekerja penyandang cacat secara aktif.
- ♦ Memberikan “alat bantu teknis dan bantuan” seperti kruk, kursi roda, kaca mata, tongkat putih, alat bantu pendengaran, serta mengadaptasi peralatan atau metode komunikasi, termasuk mesin ketik Braille dan interpretasi bahasa isyarat.

Bantuan langsung reintegrasi ekonomi

Bantuan pertama

Dalam banyak program DDR, gerilyawan dikumpulkan di kamp-kamp penampungan demobilisasi, atau tempat berkumpul untuk didemobilisasi. Begitu mereka meninggalkan tempat tersebut, mereka telah menjadi warga sipil dan mereka pergi ke komunitas di mana mereka akan menetap. Paket bantuan pertama dibutuhkan untuk memastikan para gerilyawan yang telah didemobilisasi ini dapat bepergian ke wilayah-wilayah tersebut dan mampu bertahan hidup sampai bantuan reintegrasi diberikan di tingkat komunitas. Beberapa kalangan mulai menyebut gap antara proses demobilisasi dan reintegrasi ini sebagai “fase reinserti (*reinsertion*)”. Fase ini dianggap kritis karena untuk pertama kalinya para mantan gerilyawan dihadapkan kepada komunitas mereka pada saat kebanyakan dari mereka masih merasa dekat dengan masa lalu militer mereka dibandingkan dengan kehidupan mereka sekarang sebagai warga sipil.

Pada **periode transisi** inilah yang memberikan tantangan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan, menyesuaikan perilaku mereka dengan kehidupan komunitas, mengatasi trauma yang terkait dengan perang, dan memperoleh penghargaan dari masyarakat melalui cara-cara yang tidak mengandung kekerasan. Meskipun demikian, apabila DDR direncanakan dengan baik, “fase” yang agak bermasalah ini dapat dihindari dan dikurangi dengan memberikan paket-paket bantuan pertama, termasuk “kompensasi” seperti yang dinyatakan dalam MoU.

30 ILO Handbook. Accessibility and Tool Adaptations, op. cit.

*“Reinsersi adalah bantuan yang diberikan kepada mantan gerilyawan selama demobilisasi tetapi sebelum proses reintegrasi yang lebih panjang. Reinsersi merupakan suatu bentuk bantuan transisional untuk membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mantan gerilyawan dan keluarga mereka dan dapat mencakup tunjangan keselamatan transisional, makanan, pakaian, tempat berlindung, layanan medis, pendidikan jangka pendek, pelatihan, pekerjaan jangka pendek dan peralatan. Sementara reintegrasi merupakan proses jangka panjang, proses pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, reinsersi merupakan bantuan materi dan/atau keuangan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, dan dapat berlangsung sampai satu tahun “.*³¹

Penundaan dalam memberikan bantuan pertama dengan cepat akan menimbulkan frustrasi di kalangan gerilyawan, dan dalam beberapa kejadian hal itu mengakibatkan kekerasan dan bahkan kembali terjadinya konflik.

Karena itu

- ♦ Penuhilah janji-janji yang telah dibuat dalam Nota Kesepahaman dalam soal “kompensasi”.
- ♦ Penuhilah kebutuhan-kebutuhan dasar mantan gerilyawan dan keluarga mereka.
- ♦ Pastikan ada kesempatan kerja jangka pendek bagi para mantan gerilyawan melalui QUIP. Selain dari manfaat ekonomi, pekerjaan tersebut juga dapat membantu mantan gerilyawan berhubungan kembali dengan komunitas mereka.
- ♦ Upayakan memobilisasi dan memperkuat prakarsa-prakarsa swadaya yang dapat membantu mantan gerilyawan beradaptasi dengan situasi. Mantan gerilyawan dapat bergabung dalam prakarsa-prakarsa ini atau membuat prakarsa-prakarsa sendiri.

Tindakan

- ♦ Ikutsertakan pemberian tunjangan keselamatan transisional, makanan, pakaian, tempat berlindung, layanan medis dan peralatan.
 - Sesuaikan paket-paket bantuan dengan konteks yang spesifik.
 - Belilah barang-barang tersebut di daerah tersebut, sebagai salah satu cara untuk mendorong usaha dan memastikan bahwa barang-barang tersebut “sesuai” dengan budaya dan juga mudah dibeli untuk mereka yang bukan mantan gerilyawan.
- ♦ Pekerjakan mantan gerilyawan untuk membangun infrastruktur dasar seperti rumah sakit, sekolah, jalan, dan lain-lain, tetapi tidak untuk pengumpulan sampah, membuka pertambangan, kehutanan, dan lain sebagainya.
- ♦ Bagikan paket-paket untuk memulai hidup (*start-up packages*) dengan aset produksi seperti peralatan, ternak, dan lain-lain.
- ♦ Dirikan QUIP untuk pekerjaan-pekerjaan rehabilitasi infrastruktur ekonomi dan sosial (berdasarkan investasi yang banyak menyerap tenaga kerja).
- ♦ Advokasikan pembentukan kelompok-kelompok swadaya di dalam komunitas dan di antara mantan gerilyawan pada pertemuan-pertemuan komunitas dan sesi-sesi bimbingan dengan mantan gerilyawan.
- ♦ Berikan bantuan operasional kepada kelompok-kelompok ini untuk membuat mereka menjadi organisasi yang lebih profesional, misalnya pendidikan dasar untuk anggota-anggota kelompok, pelatihan untuk para pemimpin organisasi dalam keterampilan manajemen organisasi dan membuat dana bergulir.

Layanan ketenagakerjaan

Bahkan ketika mantan gerilyawan (dan warga sipil yang terkena dampak konflik) memiliki keterampilan-keterampilan yang sudah sesuai dengan permintaan yang ada, mencari pekerjaan tetap saja menjadi hambatan yang tidak mudah diatasi. Bukannya mereka direkrut karena memiliki seperangkat keterampilan (militer), tapi sekarang mereka malah harus aktif mencari pekerjaan di pasar kerja yang berubah cepat. Layanan ketenagakerjaan (*employment services/ES*) dapat menjadi jembatan yang penting antara pencari kerja yang tidak berpengalaman ini dengan kesempatan kerja yang ada.

Tetapi, program-program DDR tidak dapat mengharapkan ES dapat beroperasi sepenuhnya. Beberapa kondisi mungkin malah sama sekali tidak memungkinkan ES; dalam konteks lain ES mungkin ada tetapi tidak terorganisasi dengan baik atau tidak diadaptasi dengan baik dalam konteks pasca konflik, dalam hal ukuran atau pendekatan kerja. Sebagai hasil dari sebuah konflik bersenjata, banyak jasa layanan ketenagakerjaan yang kehilangan staf, peralatan, tempat, dan lain-lain. Mereka memerlukan cukup banyak bantuan dan sumber daya untuk dapat menjadi layanan yang berorientasi pada hasil yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mantan gerilyawan.

31 *Inter-agency Disarmament, Demobilization and Reintegration Working Group: Towards a UN Approach to Disarmament, Demobilization and Reintegration (Geneva, 2005).*

Karena itu

- ♦ Dorong sensitifitas para pejabat nasional dan internasional yang berwenang mengenai pentingnya ES bagi pekerjaan mereka, untuk memperoleh dukungan dan komitmen mereka bagi pengembangan ES untuk jangka waktu yang lebih panjang.
- ♦ Bangunlah, dan perkuatlah dan/atau adaptasi ES yang dikembangkan untuk proyek bantuan tsunami ke wilayah-wilayah yang terkena dampak konflik.
- ♦ Buat ES lebih sesuai untuk DDR melalui bimbingan khusus dan layanan rujukan.
- ♦ Dukung ES dalam memasarkan berbagai layanan mereka.

Tindakan

- ♦ Berikan penjelasan kepada para pejabat di tingkat nasional dan internasional untuk menginformasikan kepada mereka relevansi ES untuk rekonstruksi pasca konflik, termasuk DDR.
- ♦ Sediakan layanan ketenagakerjaan nasional kepada para mantan gerilyawan yang biasanya berada di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Di Aceh, di mana layanan seperti ini lemah atau tidak ada, upayakan membangun dan memperkuat layanan nasional.
- ♦ Untuk jangka pendek, bangunlah pusat-pusat ES sementara, di mana satu kelompok kecil staf dapat melaksanakan operasi untuk menyesuaikan jenis-jenis pekerjaan dasar dengan kondisi para mantan gerilyawan. Ubahlah pusat-pusat pelatihan tersebut secara bertahap menuju layanan ketenagakerjaan yang lebih solid dan permanen
- ♦ Berikan informasi dan keterampilan untuk disesuaikan dengan tugas-tugas bimbingan yang biasanya diberikan secara khusus kepada mantan gerilyawan dan konteks pasca konflik. Misalnya:
 - Selenggarakan sesi-sesi peningkatan kesadaran untuk staf mengenai isu-isu khusus yang dihadapi para mantan gerilyawan, termasuk kesetaraan kesempatan kerja, hak asasi manusia dan isu-isu jender.
 - Latihlah penyuluh-penyuluh ketenagakerjaan untuk mengidentifikasi perilaku yang disebabkan oleh trauma perang dan untuk memberikan referensi bagi klien-klien ini untuk bimbingan psikologis khusus.
 - Doronglah ES untuk menyelenggarakan pelatihan / lokakarya 'kehidupan sipil'
- ♦ Bangun hubungan antara program DDR, lembaga-lembaga pemberi referensi dan jejaring bantuan kesejahteraan.

Sistem referensi:

- ♦ Bangunlah sistem referensi untuk memberikan informasi mengenai:
 - kesempatan kerja
 - kursus-kursus pelatihan yang relevan yang mungkin baru dimulai
 - organisasi-organisasi/program-program yang menangani cara membuka usaha sendiri, pengembangan usaha kecil dan akses kredit
 - organisasi-organisasi/program-program yang memberikan layanan bantuan psikologis.
- ♦ Sertakan layanan pendaftaran dan layanan referensi bagi mantan gerilyawan penyandang cacat yang tidak bekerja.
- ♦ Berilah saran kepada mantan gerilyawan yang layak mengenai akses berbagai program yang menawarkan bantuan dana dan bantulah mereka menyusun proposal untuk memperoleh bantuan.
- ♦ Berikan informasi dan referensi mengenai program-program khusus untuk rehabilitasi, pelatihan keterampilan dan ketenagakerjaan untuk mantan gerilyawan penyandang cacat dan, dengan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lain, kembangkan langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan khusus mereka.
- ♦ Kembangkanlah dan pertahankan daftar penyedia layanan lokal di bidang pengembangan usaha kecil, pelatihan dan pendidikan keterampilan kejuruan.
- ♦ Kajiilah kemungkinan-kemungkinan pencairan kredit mikro dan identifikasi mitra-mitra yang potensial untuk mendukung prakarsa-prakarsa pengembangan usaha kecil.
- ♦ Berikan informasi mengenai pilihan-pilihan yang terkait dengan ketenagakerjaan, termasuk pelatihan keterampilan dan cara mempekerjakan diri sendiri.
- ♦ Kembangkan dan laksanakan prosedur-prosedur untuk monitoring dan pelaporan yang berjalan mengenai keluaran bagi mantan gerilyawan.
- ♦ Bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, kembangkan langkah-langkah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus tentara anak dalam kaitannya dengan pendidikan, pelatihan dan ketenagakerjaan.
- ♦ Sertakan layanan pendaftaran dan referensi bagi mantan gerilyawan penyandang cacat yang menganggur.
- ♦ Sponsori kampanye informasi ES dan brosur-brosur tentang kesempatan kerja dan pelatihan, harapan-harapan pengusaha, dan lain-lain.

Pekerjaan infrastruktur berbasis tenaga kerja

Pekerjaan infrastruktur berbasis tenaga kerja paling cocok bagi mantan gerilyawan, yang sebagian besar terdiri dari kaum muda yang potensi fisik mereka sedang berada di posisi puncak. Angkatan kerja muda ini dapat memberikan kontribusi besar terhadap tantangan-tantangan rekonstruksi yang besar dalam masyarakat pasca perang. Selain itu, proyek-proyek ini bermanfaat bagi komunitas secara keseluruhan melalui rekonstruksi pusat-pusat kesehatan, akses jalan, dan sebagainya, memberikan peran kemasyarakatan yang positif bagi mantan gerilyawan sebagai “pembangun kembali”, dan mendorong perekonomian lokal.

Investasi berbasis tenaga kerja di bidang konstruksi dan infrastruktur juga bersifat berkelanjutan dan kompetitif dalam perekonomian berbiaya rendah ketika mereka mendorong kombinasi penggunaan sumber daya dan buruh lokal dengan peralatan ringan. Investasi berbasis tenaga kerja adalah “proyek-proyek atau pendekatan-pendekatan di mana buruh merupakan sumber daya yang dominan yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut, dan di mana bagian terbesar dari biaya proyek tersebut digunakan untuk membayar para pekerja (biasanya 25-60%)”.³² Selama bertahun-tahun, banyak studi perbandingan ILO yang telah berulang kali menunjukkan bahwa, tanpa mengurangi kualitas infrastruktur yang dibangun, investasi berbasis tenaga kerja:

- sekitar 10-50% lebih murah dibandingkan opsi yang berbasis peralatan;
- mengurangi kebutuhan pertukaran mata uang 50-60 %; dan,
- menciptakan 2-4 kali lipat lebih banyak kesempatan kerja untuk investasi yang sama.

Pendekatan ini secara khusus direkomendasikan untuk perbaikan dan rehabilitasi yang bersifat mendesak untuk infrastruktur yang rusak dan untuk seluruh program rekonstruksi jangka panjang sebuah perekonomian yang baru keluar dari sebuah konflik bersenjata.

Karena itu

- ♦ Adopsi kebijakan nasional untuk investasi berbasis tenaga kerja.
- ♦ Koordinasikan dengan mitra-mitra internasional dalam program-program ketenagakerjaan, khususnya di lembaga-lembaga PBB, organisasi-organisasi dan organisasi non pemerintah internasional.
- ♦ Tentukan jenis dan cakupan infrastruktur yang akan ditingkatkan.
- ♦ Jajaki langkah-langkah untuk memastikan partisipasi mantan gerilyawan.
- ♦ Ciptakan pekerjaan-pekerjaan yang mampu bertahan lama dalam jumlah maksimum, terutama melalui pengembangan kontraktor kecil.
- ♦ Jajaki potensi pendanaan donor.
- ♦ Siapkan perjanjian mengenai tindakan penanganan khusus.
- ♦ Koordinasikan tindakan penanganan khusus.
- ♦ Sertakan “pelatihan di tempat kerja (*on the job training*)” sebagai bagian dari proyek-proyek tersebut.
- ♦ Bangun kapasitas di seluruh tingkatan: kapasitas lembaga nasional yang berwenang mengambil keputusan tingkat tinggi mengenai investasi, kapasitas perencanaan dan monitoring di tingkat pusat dan daerah, kapasitas dalam unit-unit pelaksana di tingkat lokal.

Tindakan

- ♦ Fokus pada bidang dan proyek-proyek di mana pekerjaan (dan pendapatan) dapat dihasilkan untuk para gerilyawan yang didemobilisasi dan juga kelompok-kelompok lain yang terkena dampak peperangan dan kelompok-kelompok rentan.
- ♦ Tentukan biaya per hari kerja dan jumlah hari kerja pekerjaan jangka pendek.
- ♦ Cari persetujuan kementerian-kementerian teknis dan pengadopsian oleh badan-badan pengambil keputusan tingkat tinggi mengenai teknologi berbasis tenaga kerja untuk rehabilitasi sebagai alat yang dipilih untuk rehabilitasi dan reintegrasi kelompok-kelompok yang terkena dampak konflik.
- ♦ Buat kalangan usaha lokal memberikan komitmen untuk mempekerjakan pekerja-pekerja lokal dan menggunakan sumber daya lokal yang tersedia untuk investasi.
- ♦ Desentralisasi tanggung jawab dalam implementasinya.
- ♦ Pastikan partisipasi komunitas pedesaan dan perkotaan dalam investasi dan pemeliharannya di masa depan.
- ♦ Dirikan sebuah badan yang bertanggungjawab atas keseluruhan perencanaan dan koordinasi pekerjaan-pekerjaan yang berbasis tenaga kerja.
- ♦ Gunakan program-program berbasis komunitas dan program-program yang didorong oleh komunitas ketika melibatkan mantan gerilyawan dalam pekerjaan-pekerjaan infrastruktur berbasis tenaga kerja.
- ♦ Berikan pelatihan keterampilan yang relevan kepada para pekerja.

32 ILO: *Employment-intensive infrastructure programmes: capacity building for contracting in the construction sector* (Geneva, 1999).

- ♦ Penuhi biaya pelatihan melalui kontraktor (penawaran mereka) dan organisasi non pemerintah.
- ♦ Biarkan organisasi-organisasi komunitas mengatur upaya-upaya pelatihan.
- ♦ Berikan pelatihan kepada supervisor generasi pertama dalam perencanaan teknis dan implementasi pekerjaan dan manajemen sumber daya manusia.
- ♦ Berikan pelatihan kepada manajer-manajer dalam soal manajemen usaha dan keterampilan-keterampilan administratif.

Berikan pemahaman konseptual kepada para pengambil kebijakan mengenai potensi kegunaan metode-metode berbasis tenaga kerja dan pentingnya suatu lingkungan yang memungkinkan; cara-cara untuk memadukan investasi ekonomi dengan kebijakan sosial/ketenagakerjaan.

Pelatihan kejuruan

Pendidikan dan pelatihan kejuruan memainkan peran penting dalam mensukseskan reintegrasi mantan gerilyawan ke dalam kehidupan normal, melalui peningkatan kemampuan kerja mereka dan meningkatkan kesempatan mereka berpartisipasi secara efektif di pasar kerja. Pelatihan dapat memberikan kontribusi dalam mendekonstruksi model-model dan perilaku militer serta mengembangkan nilai-nilai dan norma-norma berdasarkan pada perdamaian dan demokrasi. Akuisisi seperangkat “keterampilan-keterampilan untuk dapat dipekerjakan” dan kesediaan untuk bekerja merupakan hal yang penting dalam membangun rasa percaya diri mantan gerilyawan, dan penghargaan dan apresiasi dari komunitas. Baik rancangan program-program DDR dan kegiatan-kegiatan penggalangan dana harus menekankan dampak positif dari pelatihan mantan tentara mengenai sumbangan mereka terhadap pasar kerja dan pendapatan, serta manfaat-manfaat sosial yang diperoleh seperti dalam bentuk berkurangnya perilaku anti-sosial, kekerasan, dan kejahatan.

Pengalaman dalam program-program DDR telah menunjukkan bahwa pengembangan keterampilan sangat penting bagi para gerilyawan muda. Sering kali, tentara anak dan mantan gerilyawan muda tidak memiliki pengalaman profesional sebelumnya dan kehilangan apa yang disebut sebagai “keterampilan hidup” yang penting untuk keberhasilan kembalinya mereka ke dalam kehidupan sipil. Mantan gerilyawan penyandang cacat dan gerilyawan-gerilyawan lain sering kali harus dilatih kembali untuk mempelajari keterampilan-keterampilan baru, untuk beradaptasi dengan konteks perubahan ekonomi.

Program reintegrasi di Aceh akan dihadapkan pada beragam tantangan: kurangnya kapasitas koordinasi, kurangnya sertifikasi dan kendali mutu, kurangnya jumlah pelatih, hilangnya kesempatan di mana staf pelatihan tidak bisa aktif karena konflik, serta adanya pelatih-pelatih yang menggunakan metodologi yang kaku, didorong oleh faktor persediaan dan berorientasi pada instruktur. Jika hanya menggantungkan pada sumber daya manusia seperti itu untuk meningkatkan kemampuan kerja dan memfasilitasi reintegrasi sosial-ekonomi, justru dapat menghasilkan upaya penyelesaian cepat yang berdampak kecil atau bahkan kontraproduktif.

Kadang-kadang, program-program DDR bahkan menggunakan pelatihan sebagai sebuah cara untuk “membuat para peserta menjauhi jalanan”, memberikan mereka keterampilan-keterampilan yang tidak sesuai dengan permintaan. Hal ini mengakibatkan frustrasi dan memberikan kontribusi pada perekrutan kembali para mantan gerilyawan yang sebetulnya sudah terlatih tapi masih menganggur. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan pelatihan kejuruan harus berorientasi pada hasil. Kegiatan-kegiatan tersebut harus dikaitkan dengan kajian pasar kerja lokal, potensi ekonomi, identifikasi kesempatan-kesempatan usaha, serta kapasitas, potensi dan ambisi mantan gerilyawan.

Karena itu

- ♦ Kumpulkan data yang relevan seperti profil mantan gerilyawan, penyedia keterampilan dan layanan bimbingan kejuruan dan informasi.
- ♦ Laksanakan program-program pelatihan berbasis kompetensi yang luas yang memenuhi persyaratan kemampuan untuk beradaptasi dan fleksibilitas dalam kondisi yang berubah dengan cepat untuk meningkatkan kemampuan kerja para mantan gerilyawan.
- ♦ Pastikan bahwa program-program memberikan mekanisme bantuan teknis dan keuangan (kredit, pelatihan manajemen, seperangkat peralatan, layanan bantuan tindak lanjut, dan lain-lain) bagi mereka yang dilatih untuk dapat membuka usaha untuk mempekerjakan mereka sendiri.
- ♦ Buat pelatihan kejuruan berbasis pada tujuan, modul-modul dan arahkan pada kesempatan kerja langsung atau upaya untuk mempekerjakan diri sendiri.
- ♦ Gabungkan pelatihan keterampilan hidup dalam pelatihan kejuruan untuk merespon kesenjangan keterampilan yang akan menghambat (re)integrasi ekonomi mereka yang terkena dampak konflik. Bekali mantan gerilyawan dengan informasi dan keterampilan untuk bertahan hidup di pasar kerja dan untuk pulih dari dampak-dampak perang.
- ♦ Gunakan program-program pelatihan kejuruan sebagai jendela kesempatan untuk mempromosikan kesetaraan gender.

- ♦ Tawarkan kesempatan untuk menggabungkan pelatihan kejuruan paruh waktu dengan pendidikan untuk mengejar ketertinggalan. Hal ini memerlukan perencanaan dan fleksibilitas yang lebih besar tetapi akan memiliki manfaat jangka panjang yang besar bagi para peserta. Hal ini dapat menggandakan jumlah tempat pelatihan kejuruan (kelas pagi dan sore).

Tindakan

- ♦ Rancanglah pelatihan kejuruan berdasarkan profil mantan gerilyawan.
- ♦ Di tingkat komunitas, bukalah kursus pelatihan kejuruan bagi semua warga lokal dengan profil dan kebutuhan pelatihan yang sama. Dengan demikian, reintegrasi telah dimulai di ruang kelas.
- ♦ Program-program melatih pelatih (TOT) mengenai bagaimana merancang, menyampaikan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengembangan keterampilan serta pelatihan metodologi untuk mengembangkan dan mengimplementasi pelatihan modul yang berorientasi pada kesempatan kerja juga dapat diperlukan. Peran pelatih yang terlibat dalam program-program mantan gerilyawan harus menjadi seorang fasilitator yang mempromosikan pembelajaran aktif, mengembangkan dukungan dalam kerja kelompok dan menjadi panutan yang positif bagi para peserta, terutama yang masih muda.
- ♦ Gabungkan pelatihan berbasis lembaga dengan pelatihan di tempat kerja (*on-the-job training*).
- ♦ Bantu penyedia pelatihan untuk:
 - Mengadaptasi kurikulum mereka agar bisa menyediakan keterampilan-keterampilan kejuruan dan kemampuan kerja (hubungan antar pribadi, kerja kelompok, dan lain-lain), termasuk keterampilan baca tulis dan pendidikan dasar yang lain.
 - Masukkan keterampilan-keterampilan untuk mencari kerja, pelatihan untuk mempekerjakan diri sendiri dan bantuan dalam memulai bisnis dan bantuan lanjutan.
 - Rancanglah strategi pembelajaran yang menimbulkan ketertarikan, motivasi dan partisipasi yang aktif. Pendekatan yang berpusat pada akan memberdayakan individu-individu, prakarsa dan kontribusi mereka sebagai anggota tim dan warga yang aktif. Perkenankan peserta untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan gabungkan pemberian keterampilan berkomunikasi dan keterampilan-keterampilan kemampuan bekerja lainnya untuk melawan perilaku yang berkembang selama konflik dalam struktur yang berhirarki tinggi.³³
 - Berikan orientasi, pendidikan dasar, pesan kesehatan yang jelas, dan keterampilan-keterampilan sosial dan keterampilan manajemen dasar melalui keterampilan hidup untuk menguatkan kapasitas untuk bertahan hidup dengan damai. Gunakanlah pengalaman-pengalaman orang-orang yang dilatih.
- ♦ Tanggapi kekurangan-kekurangan sistem dan program pelatihan kejuruan berikut ini yang dapat menghambat partisipasi dan perolehan manfaat bagi seluruh mantan gerilyawan, terutama perempuan:
 - Waktu dan tempat pelatihan dapat membatasi partisipasi perempuan yang tidak dapat bepergian jauh (karena kewajiban keluarga, batasan budaya, biaya perjalanan).
 - Kurangnya fasilitas bagi mereka yang terabaikan (*creche*).
 - Kurangnya bantuan penempatan kerja dan pelatihan wawancara.
 - Kurangnya tindak lanjut dan kursus-kursus penyegaran.
 - Persyaratan pendidikan tinggi/asumsi tidak berketerampilan.
 - Periode pelatihan terlalu pendek untuk mencapai tingkat kompetensi tertentu.
 - Pelatihan di bidang-bidang yang tidak terkait dengan sektor-sektor ekonomi yang sedang tumbuh.
 - Kurangnya pelatih, kepala sekolah, perencana perempuan.

Magang

Praktik kerja atau magang dapat memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas kepada sejumlah besar kaum muda untuk kualifikasi yang diakui dan diminta oleh para pengusaha. Anak-anak dan mantan gerilyawan muda dilatih oleh mereka yang ada di bidang kerajinan dan pengusaha lokal. Keterampilan ditransfer melalui pengamatan dan replikasi tugas-tugas yang dikerjakan oleh pekerja yang berpengalaman dan pelatihan dibatasi pada keterampilan-keterampilan praktis di bidang perdagangan. Dalam beberapa kasus, peserta pelatihan yang masih muda menjadi anggota keluarga pengrajin selama periode pelatihan. Model pelatihan keterampilan non-formal ini terkadang dilaksanakan di dalam dan oleh keluarga untuk memungkinkan anak-anak mereka belajar keterampilan yang secara tradisional diasosiasikan dengan jaminan ekonomi keluarga.

Kebalikannya dari model pelatihan yang formal, praktik kerja biasanya tidak memerlukan latar belakang pendidikan sebelumnya, yang sering kali membatasi akses bagi mantan gerilyawan. Magang juga dapat menjadi kompensasi atas kurangnya tempat-tempat pelatihan formal yang tersedia dalam kebanyakan program DDR. Meskipun demikian, karena sektor swasta dalam kebanyakan konteks DDR tidak dapat memberikan cukup banyak kesempatan praktik kerja, sektor usaha kecil menengah harus didukung sebagai penyedia kesempatan praktik kerja yang utama.

Karena itu

- ♦ Kaji ulang kualitas dan hasil/pencapaian sistem kemitraan yang ada.
- ♦ Program-program DDR harus melobi dan (apabila dibutuhkan) mensubsidi praktik kerja.
- ♦ Kembangkan dan dorong praktik kerja di mana ada prospek kesempatan kerja.
- ♦ Pastikan bahwa program-program praktik kerja mencerminkan tradisi magang lokal yang ada di negara tersebut semaksimal mungkin untuk memastikan keberlanjutannya.
- ♦ Pastikan bahwa program magang sejalan dengan standar-standar perburuhan internasional; di banyak negara ada risiko bahwa praktik kerja menjadi ajang buruh murah dan eksploitasi.

Tindakan

- ♦ Mengakui keberadaan keterampilan-keterampilan yang diperoleh selama praktik kerja dengan memperkenalkan sistem sertifikasi nasional.
- ♦ Memberikan uang saku kepada peserta praktik kerja sehingga mereka dapat bertahan hidup dan menghidupi orang-orang yang bergantung pada mereka selama masa pelatihan mereka
- ♦ Sertakan indikator-indikator dalam sistem monitoring.
- ♦ Berikan insentif, seperti kontrak dalam program rekonstruksi kepada pengusaha swasta dengan prasyarat mereka harus bersedia melaksanakan praktik kerja.

Meskipun demikian, karena rendahnya aktivitas para pengusaha swastaini, tempat untuk praktik kerja pun sangat terbatas. Karena itu, selama periode perlucutan senjata dan demobilisasi, pengusaha swasta bisa mendapatkan kontrak yang mengandung persyaratan bahwa mereka akan memberikan kesempatan praktik kerja.

Pendidikan

Kesempatan untuk memperoleh pendidikan merupakan komponen penting dari keberhasilan reintegrasi sosial-ekonomi bagi mereka yang belum mampu bersekolah atau harus berhenti sekolah karena mereka terpaksa menghabiskan waktu di pasukan bersenjata. Pendidikan memungkinkan mereka memperoleh akses pekerjaan dengan lebih mudah, merencanakan jalur karir jangka panjang; tetapi juga meningkatkan perasaan berguna bagi diri sendiri, kapasitas untuk berpartisipasi dalam komunitas mereka menjadi semakin optimal, dan mengurangi stigmatisasi. Pendidikan mencegah stigmatisasi jangka panjang yang mungkin diberikan kepada mereka yang tidak dapat bersekolah karena menghabiskan waktu dalam pasukan bersenjata. Banyak kaum muda yang akan mengikuti program pelatihan kejuruan yang masih membutuhkan pendidikan untuk mengejar ketertinggalan secara menyeluruh.

Karena itu

- ♦ Berikan tawaran kepada mantan gerilyawan anak-anak dan kaum muda yang pendidikannya tertinggal untuk mengikuti program pembelajaran dipercepat (*Accelerated Learning Programmes/ALP*). Program ini seharusnya kompatibel dengan sistem pendidikan reguler. Program-program ini sangat penting khususnya di negara-negara yang terpengaruh oleh konflik di mana sekolah-sekolah ditutup untuk waktu yang panjang dan di mana anak-anak harus masuk ke kelas-kelas yang biasanya untuk anak-anak yang lebih muda.
- ♦ Selenggarakan pelatihan kejuruan dan pendidikan untuk mengejar ketertinggalan itu secara berbarengan, dalam sistem paruh waktu. Hal ini akan membuka jalur karir jangka panjang bagi kaum muda di luar dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang dimungkinkan oleh pelatihan kejuruan mereka yang bersifat jangka pendek.

Tindakan

- ♦ Selenggarakan pendidikan untuk mengejar ketertinggalan dengan sistem paruh waktu yang spesifik di sekolah-sekolah yang ada.
- ♦ Pastikan ada koordinasi dengan penyedia pelatihan kejuruan di tingkat lokal untuk menjamin bahwa murid-murid dapat menggabungkan keduanya.
- ♦ Fasilitas penitipan anak perlu didirikan di seluruh sekolah yang menargetkan kaum muda sehingga ibu-ibu muda dapat menghadirinya. Fasilitas ini harus bebas biaya, termasuk dalam hal memberi makan anak.

Pelatihan usaha

Kebanyakan mantan gerilyawan akan memulai usaha mereka sendiri, terkadang dalam suatu kelompok, atau awalnya akan bekerja di perusahaan kecil, tetapi memimpikan untuk memiliki usaha mereka sendiri suatu hari. Hal ini sebagian dipicu oleh fakta bahwa jarang ada pekerjaan yang ada di sekitar mereka, bahwa kondisi mantan gerilyawan tidak cukup kuat untuk mengakses pekerjaan yang ada, dan bahwa kebanyakan mantan gerilyawan memiliki jejaring

sosial yang terbatas atau tidak ada sama sekali sehingga tidak ada yang dapat membantu mereka menemukan pekerjaan. Para pengusaha enggan mempekerjakan mereka sehingga lebih sulit bagi mereka menemukan pekerjaan dengan gaji yang layak. Alasan yang lebih positif adalah bahwa banyak mantan gerilyawan yang suka mempekerjakan diri mereka sendiri dibandingkan dengan bekerja menjadi bawahan seorang atasan. Kebebasan dan tantangan yang dikaitkan dengan upaya untuk menjalankan usaha sendiri tampaknya cocok dengan ambisi dan karakter gerilyawan, dan mencerminkan kebebasan dan perasaan bahwa mereka masih bisa memberikan perintah dan masih menjadi bagian suatu masa ketika mereka masih menjadi gerilyawan.

Meskipun demikian, untuk dapat berhasil dan membangun bisnis yang berkelanjutan, sering kali mereka membutuhkan pelatihan yang ekstensif. Misalnya, mengenai bagaimana cara untuk menyusun sebuah rencana bisnis, memasarkan produk mereka dan mengelola waktu dan sumber daya yang mereka miliki.

Karena itu

- ♦ Kembangkan suatu program atau kursus yang memungkinkan mantan gerilyawan dan warga sipil yang terkena dampak konflik dapat membangun usaha mereka sendiri. Keterampilan-keterampilan bisnis utama termasuk: manajemen bisnis, matematisasi bisnis, komunikasi bisnis, layanan pelanggan, motivasi, negosiasi, manajemen proyek, manajemen waktu, presentasi, penulisan teknis, pemasaran, dan lain-lain.

Tindakan

- ♦ Dalam konteks Aceh, upayakan memperluas program Mulai dan Tingkatkan Bisnis Anda (*Start and Improve Your Business/SIYB*), sebuah metodologi pengembangan usaha bagi pengusaha yang baru memulai bisnisnya yang menciptakan kapasitas pelatih lokal dan metode hemat biaya dan berkelanjutan untuk mencapai jumlah wirausahawan kecil menengah yang signifikan dan menyediakan bagi mereka keterampilan manajemen praktis yang dibutuhkan dalam lingkungan yang kompetitif. SIYB sukses digunakan dalam situasi-situasi pasca krisis untuk demobilisasi pasukan bersenjata.
- ♦ Dalam kondisi-kondisi di mana tingkat kemampuan baca tulis di kalangan mantan gerilyawan sangat rendah, alat lain yang tersedia adalah Pelatihan Manajemen Akar Rumput (*Grassroots Management Training /GMT*).
- ♦ Menciptakan sekumpulan pelatih bersertifikat yang direkrut dari sektor swasta

Layanan Pengembangan Usaha

Pengusaha pemula (dan yang sudah ada lebih dulu) membutuhkan akses Layanan Pengembangan Usaha (*Business Development Services/BDS*) yang memadai untuk merespon hambatan-hambatan nonfinansial yang dihadapi oleh para pengusaha, seperti kurangnya pendidikan, keterampilan teknis yang tidak memadai, akses pasar yang lemah, kurangnya informasi dan infrastruktur yang tidak dapat diandalkan. Kombinasi-kombinasinya dengan – antara lain – pelatihan kejuruan dan skema-skema keuangan mikro akan memaksimalkan dampaknya di tingkat lokal.

Karena itu

- ♦ Ciptakan atau perbaiki layanan pengembangan usaha.³⁴
 - Tingkatkan akses pasar untuk usaha yang ada di sana (misalnya pemasaran, dan pengemasan).
 - Sediakan infrastruktur (misalnya tempat penyimpanan atau layanan komputer untuk bisnis).
 - Tawarkan pelatihan dalam advokasi kebijakan.
 - Sponsori konferensi mengenai isu-isu yang relevan untuk bisnis.
 - Hubungkan perusahaan-perusahaan kecil dengan pemasok input/bahan baku.
 - Fasilitasi pendirian kelompok-kelompok pembeli borongan.
 - Sediakan layanan bimbingan dan nasehat serta pelatihan manajemen.
 - Promosikan teknologi dan pengembangan produk (misalnya memudahkan pengadaan teknologi, layanan desain).
 - Ajukan mekanisme keuangan alternatif (misalnya perusahaan-perusahaan yang memberikan modal kerja untuk pesanan-pesanan yang pasti, mendapatkan kemudahan memperoleh kredit pemasok).
- ♦ Tingkatkan kesadaran mantan gerilyawan mengenai kebutuhan mereka akan layanan-layanan ini sebagai pengusaha pemula.
- ♦ Subsidi BDS yang diberikan dengan cara yang “arif” untuk mendorong fungsi pasar, mengaitkan klien dan pemasok.
- ♦ Bangun dan perkuatlah kapasitas penyedia layanan.

34 Mary McVay, Alexandra Overy Miehlbradt: *Background Reader Business Development Services. Developing commercial markets for BDS: can this give the scale and impact we need?* (Geneva, ILO, 2001), p.2.

Tindakan

- ♦ Selenggarakan lokakarya untuk meningkatkan sensitifitas mengenai keberadaan informasi dan layanan rujukan (“layanan apa yang anda butuhkan dan di mana anda dapat menemukannya”) untuk merangsang permintaan mantan gerilyawan atas BDS.
- ♦ Susunlah, misalnya, skema voucher yang menawarkan kemungkinan untuk “membeli” dan menguji layanan yang diberikan oleh penyedia yang terkait dengan DDR kepada para pengusaha pemula.
- ♦ Pertimbangkanlah untuk mensubsidi rehabilitasi tempat dan peralatan, bantuan dalam perumusan strategi dan pelatihan.
- ♦ Promosikan pemberian BDS sebagai kesempatan usaha yang nyata bagi para pengusaha pemula
- ♦ Perkuat layanan yang terdapat dalam Asosiasi Usaha Kecil (misalnya dalam membeli peralatan) dan membangun jejaring informal.

Keuangan mikro

Akses mantan gerilyawan terhadap keuangan mikro telah terbukti bermasalah, karena, antara lain, kurangnya jaminan. Beberapa penyedia jasa keuangan mikro bahkan mengecualikan mantan gerilyawan karena penyedia ini yakin mereka bahwa potensi yang dimiliki mantan gerilyawan untuk membayar kembali uang yang dipinjam rendah. Kredibilitas mereka sebagai pemilik usaha (keterampilan, dan lain-lain) juga mungkin menjadi masalah. Padahal, keuangan mikro sangat penting bagi mantan gerilyawan yang memilih untuk memulai usaha sendiri. Program reintegrasi harus menjawab permintaan ini, tetapi sembari memastikan bahwa orang-orang ini telah diperiksa dan dilatih dengan baik sebelum mereka menerima layanan keuangan.

Karena itu

- ♦ Sediakan layanan keuangan mikro hanya berdasarkan rencana bisnis yang valid.
- ♦ Periksa dan berikan pelatihan kepada mantan gerilyawan sebelum melibatkan mereka dalam program-program keuangan mikro.
- ♦ Pastikan bahwa mereka bukan pecandu narkoba.
- ♦ Periksa apakah praktik-praktik keuangan mikro informal tradisional (seperti arisan, tabungan dan pinjaman antarperempuan di pasar, dan lain-lain) dalam komunitas dapat memberikan dana satu kali agar mereka dapat memulai kembali usahanya.
- ♦ Mencocokkan kebutuhan dana dapat dijangkau sebagai pilihan bagi kelompok-kelompok penabung dan peminjam, tanpa mengkondisikan inklusifitas mantan gerilyawan.
- ♦ Perlu dilakukan penajakan pembentukan kelompok-kelompok mantan gerilyawan yang bersedia bekerja bersama-sama untuk menyediakan mekanisme pemberdayaan sosial, pelatihan dan akses keuangan dengan memperkenalkan skema-skema tabungan dan sesi-sesi pelatihan yang dapat mengarah pada upaya untuk mempekerjakan diri sendiri dan skema-skema pinjaman berbasis kelompok.

Tindakan

- ♦ Kuatkan kapasitas penyedia keuangan mikro.

Hak suara dan keterwakilan

Pandangan atas kurangnya hak suara dan keterwakilan yang diterima selama ini adalah salah satu faktor yang telah membuat banyak mantan gerilyawan kembali menjalankan tindak kekerasan. Khususnya mantan gerilyawan muda yang sering kali merasa tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan yang langsung terkait dengan mereka seperti pendidikan, kesempatan kerja, dan perlindungan sosial. Bertempur dalam pasukan bersenjata mungkin membuat mereka memiliki perasaan bahwa mereka diberdayakan yang mungkin sangat kontras dengan posisi mereka yang terpinggirkan pada masa sesudah konflik. Misalnya, beberapa mantan gerilyawan perempuan yang dihormati oleh rekan-rekan laki-laki mereka sebagai gerilyawan biasanya dihadapkan pada terbatasnya kesempatan pelatihan dan kesempatan kerja setelah konflik dan keterbatasan untuk berbicara dalam pengambilan keputusan di komunitas maupun di tingkat nasional. Hal ini dapat mengakibatkan krisis identitas, frustrasi dan bahkan mengarah pada kekerasan yang baru. Oleh karena itu, partisipasi yang sangat bermakna merupakan hal yang penting tidak hanya untuk menghindari kekerasan yang baru tetapi juga untuk membekali mantan gerilyawan dengan rasa kepemilikan untuk membangun (kembali) masyarakat mereka.

Karena itu

- ◆ Promosikan keterwakilan langsung dan tidak langsung GAM dalam proses DDR dan masyarakat pasca konflik.
- ◆ Doronglah dialog sosial yang melibatkan mantan gerilyawan.
- ◆ Berikan mantan komandan perempuan kesempatan untuk memperoleh posisi manajemen dalam jabatan sipil.
- ◆ Promosikan dialog sosial dan ikutsertakan soal reintegrasi mantan gerilyawan sebagai salah satu soal yang perlu didiskusikan.

Tindakan

- ◆ Pastikan bahwa seluruh kelompok mantan gerilyawan, termasuk kaum muda dan perempuan, terwakili.
- ◆ Didiklah aktor-aktor lokal dan nasional mengenai manfaat dapat diperoleh dengan melibatkan mantan gerilyawan dalam proses pengambilan keputusan dan bahaya yang dapat timbul apabila mereka tidak diikutsertakan atau dipinggirkan.
- ◆ Bentuklah, ikutsertakan, dan perkuat organisasi-organisasi yang terdiri dari atau yang mencakup sejumlah besar mantan gerilyawan, seperti organisasi-organisasi veteran atau organisasi pemuda. Organisasi-organisasi ini dapat menjadi penengah di antara mantan gerilyawan, masyarakat sipil, dan organisasi dan para pelaku politik. Selain itu, keterlibatan dalam organisasi-organisasi ini juga dapat membekali mantan gerilyawan dengan beberapa keterampilan profesional yang penting seperti manajemen atau komunikasi.
- ◆ Buatlah proses inklusi mantan gerilyawan ke dalam masyarakat sipil sebagai sebuah faktor untuk mengevaluasi tata pemerintahan yang baik dan akhirnya kelayakan untuk program-program pemberian kredit dan bantuan.
- ◆ Gunakan pendekatan partisipatif dalam pembangunan ekonomi lokal untuk mengikutsertakan mantan gerilyawan dan kelompok-kelompok komunitas yang lain dalam proses pengambilan keputusan. Forum-forum LED dapat memberikan hak suara dan membangun hubungan antarmantan gerilyawan dan komunitas-komunitas mereka, lembaga-lembaga lokal dan pejabat tingkat tinggi yang berwenang

7. Keberlanjutan

Mengembangkan kapasitas yang bertahan lama

Sebuah tantangan besar bagi Pemerintah Indonesia adalah untuk segera memberikan bantuan reintegrasi kepada mantan gerilyawan, sambil memastikan bahwa bantuan tersebut juga akan memiliki dampak positif yang permanen kepada masyarakat. Tetapi, karena proses perlucutan senjata, demobilisasi, dan reintegrasi (DDR) dimulai dalam kondisi darurat, pembangunan jangka panjang dan tujuan-tujuan pembangunan perdamaian cenderung dilupakan. Karena itu, kini diperlukan sejumlah upaya yang serius untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan pembangunan jangka panjang tercermin dalam pendekatan darurat jangka pendek dan pendekatan “reintegrasi transisional”.

Proses DDR harus dapat membantu membangun kapasitas aktor-aktor yang membantu mantan gerilyawan dan warga sipil yang terkena dampak konflik sekarang dan di masa depan. Selain itu, jika dimungkinkan, dana harus diinvestasikan untuk mengembangkan kapasitas dan layanan-layanan yang penting, yang di masa datang dapat bermanfaat bagi kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Misalnya, apabila kementerian-kementerian yang bertanggung jawab atas ketenagakerjaan dan kepemudaan diperkuat dengan baik di bawah program DDR, mereka akan mampu memberikan layanan kepada semua pencari kerja muda di masa depan. Harus diingat bahwa sumber daya keuangan hanya akan datang sekali dan oleh karena itu harus diinvestasikan dengan baik!

Di luar dari pendekatan yang dipilih, dana DDR harus digunakan sehingga dana tersebut memberikan kontribusi pada perdamaian, pemulihan ekonomi, dan pembangunan yang berkelanjutan. Program reintegrasi harus beranjak melampaui hanya sekedar “mengembalikan mantan gerilyawan ke tempat asal mereka” karena hal ini dapat membuat mereka menjadi mangsa yang mudah untuk direkrut kembali.

Program-program DDR harus berkelanjutan di beberapa tingkatan:

Proses perdamaian, menyangkut keamanan yang bertahan lama

Mantan gerilyawan, sehingga mereka menjadi dan tetap produktif sebagai warga sipil

Penduduk secara umum, sehingga dapat bergerak menuju pemulihan dan pembangunan.

Karena itu

- ♦ Gunakan pendekatan berbasis wilayah. Sebuah pendekatan reintegrasi yang terpadu dan komprehensif dapat meningkatkan keamanan daerah, menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan di wilayah-wilayah di mana mantan gerilyawan akan melanjutkan kehidupan sipil mereka (di wilayah penerima). Pendekatan berbasis wilayah, dengan perhatian khusus kepada kelompok mantan gerilyawan, sejalan dengan perhatian pada keberlanjutan.
- ♦ Hubungkan DDR kepada Reformasi Sektor Keamanan (*Security Sector Reform/SSR*)
- ♦ Atasi sebab-sebab tersedianya sejumlah besar orang yang akan direkrut menjadi gerilyawan
- ♦ Bangun kapasitas struktur-struktur nasional yang bertahan lama
- ♦ Bekali orang-orang dengan rasa memiliki proses reintegrasi

Tindakan

- ♦ Identifikasi alasan-alasan yang mendorong gerilyawan bergabung dengan pasukan/kelompok bersenjata.
- ♦ Pastikan perlunya diambil langkah-langkah untuk mengatasi alasan-alasan ini.
- ♦ Gunakan DDR untuk membangun kapasitas nasional yang menyediakan layanan kepada seluruh rakyat, selain kepada kelompok mantan gerilyawan. Kuatkan kementerian-kementerian yang bertanggungjawab atas ketenagakerjaan dan kepemudaan sehingga mereka akan dapat memberikan layanan kepada seluruh pencari kerja muda di masa depan.
- ♦ Promosikan dialog sosial dan dialog sipil antara pemerintah, aktor-aktor sektor keamanan dan masyarakat sipil, dan aktor-aktor kemanusiaan dan pembangunan internasional untuk meningkatkan sensitifitas mereka dalam peran dan tanggung jawab mereka terhadap proses reintegrasi dan keberlanjutannya dalam jangka panjang.

- ♦ Doronglah partisipasi aktif dan kuatkan kapasitas warga dan komunitas. Mereka harus menjadi agen-agen pembangunan yang bertanggungjawab atas perkembangan hidup mereka dan lingkungan kerja mereka.
- ♦ Libatkan sektor swasta secara aktif dalam implementasi program-program DDR.

Memperkuat pemerintah pusat, provinsi dan daerah

Kebutuhan langsung di Aceh adalah agar sebuah sistem baru dapat mengatur kegiatan ekonomi melalui diciptakannya hukum dan lembaga-lembaga yang baik. Wilayah-wilayah yang berbeda di Aceh menghadapi beragam kondisi ekonomi dan sosial dan tantangan-tantangan ketenagakerjaan yang saling berhubungan. Strategi reintegrasi ekonomi yang berkelanjutan harus mempertimbangkan kekhususan ekonomi dan sosial ini.

Struktur pemerintahan pusat dan provinsi bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia harus menjadi aktor utama, setidaknya pada tahap awal. Pemerintah Indonesia perlu mengkaji ulang dan mengadaptasi kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan makro ekonomi secepat mungkin. Meskipun demikian, karena kebutuhan-kebutuhan mendesak yang ditimbulkan oleh program DDR, tindakan cepat untuk mempromosikan ketenagakerjaan harus dikembangkan secara simultan. Kebutuhan-kebutuhan pasar kerja perlu diadopsi tanpa harus kehilangan waktu, karena DDR tidak dapat menunggu sampai kebijakan-kebijakan ekonomi utama mulai diberlakukan.

Hal ini membutuhkan baik penerimaan atas kewenangan yang dimilikinya maupun ketersediaan sumber daya yang memadai yang dapat segera digunakan. Di Aceh, kapasitas lembaga-lembaga pemerintah provinsi telah melemah sebaliknya berbagai tantangan untuk mengarahkan provinsi ini menuju perdamaian dan pembangunan sangat besar. Karena itu, pembangunan kapasitas yang baik dan luas diperlukan untuk memastikan bahwa struktur-struktur pemerintahan Aceh dapat merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi program-program penciptaan kesempatan kerja yang berkelanjutan secara efektif. Hal ini penting untuk keberhasilan integrasi sosial-ekonomi mantan gerilyawan dan pencari kerja yang lain.

Karena itu

- ♦ Fasilitasi pertukaran informasi dan koordinasi antara berbagai kementerian yang berbeda-beda dan pemangku kepentingan yang lain yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam proses DDR.
- ♦ Advokasi kebijakan-kebijakan nasional yang berguna bagi seluruh mantan gerilyawan yang mencari pekerjaan, terutama kelompok-kelompok mantan gerilyawan tertentu.
- ♦ Mengajukan permintaan untuk memperoleh sumber daya nasional (uang, staf, fasilitas) yang dapat membantu menciptakan lingkungan yang memungkinkan dilaksanakannya DDR dan meningkatkan kemampuan kerja mantan gerilyawan.
- ♦ Memastikan bahwa kementerian tenaga kerja dan organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha menjadi bagian dari komisi atau kelompok kerja DDR.

Tindakan

- ♦ Memfasilitasi pertemuan reguler antara pemerintah pusat dan berbagai organisasi pengusaha, pekerja, dan mantan gerilyawan di tingkat nasional dan regional untuk bertukar informasi dan pengalaman mengenai kebijakan-kebijakan dan program-program nasional yang berdampak pada mantan gerilyawan.
- ♦ Membentuk komite antar kementerian untuk DDR. Ikutsertakan kementerian-kementerian yang terkait dengan ketenagakerjaan seperti Kementerian tenaga kerja, perdagangan, keuangan, pelatihan, jender, dan lain-lain.
- ♦ Selenggarakan pengarahan kepada lembaga-lembaga pemerintah, untuk menginformasikan kepada mereka kemajuan program-program pelatihan dan ketenagakerjaan bagi mantan gerilyawan dan bagaimana mereka dapat memberikan kontribusi untuk membuatnya lebih efektif. Buat mereka sensitif terhadap kebutuhan khusus kelompok-kelompok mantan gerilyawan seperti tentara anak, perempuan muda dan mantan gerilyawan penyandang cacat.
- ♦ Kaji ulang peraturan perundang-undangan untuk memastikan agar peraturan perundang-undangan tersebut memberikan perlindungan dan bantuan yang memadai kepada tentara anak. Harus ada mekanisme penegakan yang berfungsi dan kewenangan di mana kaum muda dapat mencari perlindungan kepada mekanisme dan lembaga tersebut ketika hak-hak mereka disalahgunakan.
- ♦ Arusutamakan kesetaraan kesempatan bagi perempuan muda dan laki-laki muda dalam seluruh kebijakan publik, terutama di bidang pendidikan, pelatihan dan ketenagakerjaan. Pemerintah harus memerangi diskriminasi upah dan pelecehan seksual, membantu upaya-upaya perempuan muda berorganisasi dan memastikan perlindungan yang cukup terhadap eksploitasi.
- ♦ Undanglah kaum muda ke dalam proses pengambilan keputusan dan lebih penting lagi, dengarkan dan ambil tindakan sesuai dengan saran yang mereka berikan.

- ♦ Lobi untuk memperoleh sumber daya investasi publik untuk memperbaiki infrastruktur, sistem irigasi, sanitasi perkotaan, sekolah-sekolah atau pusat-pusat kesehatan dapat memberikan dampak yang penting terhadap integrasi mantan gerilyawan dan terciptanya pekerjaan yang layak bagi kaum muda serta perekonomian daerah dan komunitas lokal.
- ♦ Keluarkan investasi dalam pembangunan kapasitas struktur-struktur pemerintah provinsi dan daerah.

8. Pelajaran dari Dunia Internasional

IDDRS

Pendekatan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) (*IDDRS, module 02.10, The UN Approach to DDR*) untuk perlucutan senjata, demobilisasi, dan integrasi (DDR), menetapkan prinsip-prinsip yang terkait dengan seluruh aspek perencanaan dan implementasi DDR. Prinsip-prinsip ini harus menjadi referensi ketika merancang program-program reintegrasi. Ulasan di bawah ini merupakan prinsip-prinsip kunci yang penting khususnya untuk reintegrasi mantan gerilyawan. Panduan ini telah disusun berdasarkan pengalaman-pengalaman internasional yang dipelajari dalam program-program DDR di seluruh dunia.

Memperjelas tujuan dan hasil yang diharapkan kepada semua pihak

Tujuan dan hasil yang diharapkan dari program reintegrasi harus ditetapkan dengan jelas sejak awal, khususnya yang berkaitan dengan jumlah penerima keuntungan program, komposisinya, dan kriteria seleksi untuk mereka. Seluruh pihak yang terlibat dalam konflik harus memiliki komitmen terhadap kerangka yang telah disepakati, termasuk jadwal pelaksanaan kegiatan.

Mulai merencanakan reintegrasi secepat mungkin

Kerap kali perlucutan senjata dan demobilisasi dilaksanakan dengan efektif, tetapi reintegrasi gagal, sehingga menghancurkan program DDR dan situasi keamanan yang lebih luas. Beragam faktor telah memberikan kontribusi pada kegagalan ini, termasuk: kurangnya pengakuan dari pemangku utama atas pentingnya reintegrasi; kurangnya sumber daya; kurangnya keterlibatan komunitas, atau hilangnya keyakinan para mantan gerilyawan yang didemobilisasi terhadap proses reintegrasi lantaran ada penundaan yang lama dalam implementasinya. Kegagalan-kegagalan ini sering terjadi akibat kurangnya perencanaan dan penyusunan anggaran yang baik dan tepat waktu. Praktisi-praktisi PBB sudah menyiapkan reintegrasi *sejak awal* dalam berbagai pelaksanaan DDR di masa depan.

Memastikan kepemilikan nasional

Kepemilikan nasional merupakan landasan bagi keberhasilan dan keberlanjutan program DDR. Tanggung jawab utama untuk hasil-hasil program DDR terdapat pada aktor-aktor nasional dan lokal yang bertanggungjawab penuh atas perdamaian, keamanan dan pembangunan komunitas dan bangsa mereka sendiri. Kepemilikan nasional lebih luas dan lebih dalam dibandingkan dengan kepemimpinan pemerintah pusat: kepemilikan nasional mengacu pada *partisipasi aktor-aktor negara dan non-negara* di tingkat nasional, provinsi dan daerah. Penting untuk memastikan adanya partisipasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan secara tradisional dalam proses DDR dan rekonstruksi pasca konflik, terutama perwakilan dari kelompok perempuan, kaum muda, advokasi anak, para penyandang cacat dan orang-orang yang menderita sakit parah, serta kaum minoritas.

Memastikan partisipasi komunitas

Keberhasilan program-program reintegrasi tergantung pada upaya bersama para individu, keluarga, dan komunitas. Karena itu, sangat penting bahwa program-program reintegrasi dirancang melalui sebuah *proses partisipatif* yang melibatkan mantan gerilyawan dan komunitas, pejabat lokal, dan pemerintah pusat, serta aktor-aktor non-pemerintah lainnya dalam merencanakan dan mengambil keputusan sejak tahap yang paling awal.

Mengembangkan kapasitas nasional

Program-program reintegrasi harus mencoba *mengembangkan kapasitas* komunitas penerima, serta lembaga-lembaga lokal dan pemerintah pusat. Jika kondisi kapasitas nasional untuk melaksanakan DDR lemah, perlu kehati-hatian untuk memastikan bahwa PBB tidak bertindak sebagai pengganti pemerintah nasional dalam manajemen dan penerapan DDR, tetapi hanya mengisi kesenjangan kapasitas sementara, di bawah pengawasan kebijakan nasional yang kuat, dan secara bersamaan juga bekerja untuk memperkuat kapasitas nasional.

Mempertimbangkan implikasi regional

Keberhasilan pembangunan kapasitas nasional untuk reintegrasi gerilyawan lokal bisa menjadi semakin rumit ketika konflik tersebut mengandung dimensi regional. Penting untuk melakukan kajian yang seksama pada tahap perencanaan untuk menentukan apakah gerilyawan asing dan/atau tentara bayaran juga harus direpatriasi ke negara asal mereka, dan untuk mengembangkan mekanisme untuk melakukan hal itu apabila soal-soal ini tidak dinyatakan secara khusus dalam perjanjian perdamaian. Kerja sama antarlembaga merupakan soal yang penting dalam kasus-kasus repatriasi lintas batas.

Pelaksanaan merepatriasi gerilyawan bersama keluarganya harus dilakukan secara sangat berhati-hati, sampai istri, atau suami, dan anak-anak yang menyertai mereka didaftarkan dan diberikan formulir identifikasi resmi yang akan melindungi dan membantu mereka di negara tempat mereka direlokasi. Perempuan dalam perkawinan yang diakui berdasarkan hukum atau kebiasaan nasional yang membuat para isteri ingin tetap tinggal bersama suami mereka akan membutuhkan bantuan khusus untuk berintegrasi ke dalam negara asal mereka yang baru.

Melibatkan donor

Kurangnya sumber daya yang memadai dan tepat waktu telah menghambat kemampuan PBB melaksanakan program-program reintegrasi berkelanjutan di masa yang lalu. Manajer program DDR harus melibatkan donor dalam diskusi-diskusi yang membicarakan cakupan dan fokus program reintegrasi sedini mungkin.

Melibatkan orang-orang yang memiliki kemungkinan menjadi pengganggu

Mengelola kepentingan dan harapan *pangliman-panglima perang* dan *para pemimpin pasukan kunci* sering menjadi penentu proses dan perjanjian perdamaian yang berkelanjutan. Meskipun demikian, sejumlah pemimpin militer/raja perang, terutama komandan-komandan tingkat menengah, mungkin tertinggal dalam struktur insentif yang disepakati dalam perjanjian perdamaian. Karena itu, *melibatkan* para pemain kunci dalam proses tersebut harus menjadi salah satu pertimbangan perencanaan DDR dan perancangan program. Baik pemerintah nasional, yang dibantu oleh Komisi Nasional DDR, harus mengatasi soal itu secara langsung, yang sejauh ini merupakan pilihan yang terbaik,³⁵ atau program DDR harus merancang sistem dua tahap untuk memberikan bantuan reintegrasi. Tahap pertama diberikan kepada para komandan yang biasanya memiliki harapan-harapan yang tinggi, dan tahap berikutnya kepada sisanya. Kegagalan dalam mengatasi masalah ini dapat membuat para pemangku kepentingan kunci ini bertindak sebagai pengganggu (*spoiler*), dan bukan tidak mungkin akan menghancurkan keseluruhan program DDR dengan menimbulkan berbagai implikasi pada perdamaian dan keamanan yang lebih luas. Perhatian juga harus diberikan kepada gerilyawan asing atau tentara bayaran.

Menempatkan reintegrasi dalam strategi pemulihan yang lebih luas

Program perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi (DDR) terutama dilakukan sebagai tindakan untuk meningkatkan keamanan, agar proses pemulihan dan pembangunan pasca konflik bisa dilaksanakan. Kendati demikian, DDR sendiri tidak dapat diharapkan bisa mencegah konflik lanjutan maupun membangun stabilitas. Program perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi merupakan *pra-kondisi*, dan bukan *pengganti*, dalam pelaksanaan program pemulihan yang khusus ditujukan bagi kelompok-kelompok rentan seperti pengungsi lokal, orang-orang yang pulang kembali dan korban-korban konflik lain.

Pelaksanaan DDR harus dibarengi dengan reformasi ekonomi, politik, dan sosial yang lain, serta prakarsa-prakarsa pembangunan dan pemulihan yang lebih luas. Karena itu, program reintegrasi harus dikonsepsikan, dirancang, direncanakan dan dilaksanakan di dalam, atau setidaknya sesuai dengan, *strategi pemulihan yang lebih luas*, yang harus mencakup rehabilitasi pasca konflik, pemukiman kembali penduduk yang mengungsi, upaya-upaya rekonsiliasi, penghargaan terhadap hak asasi manusia, tertib hukum, dan tata pemerintahan yang lebih baik.

35 Akibat besarnya harapan terhadap para komandan dibandingkan dengan para prajurit lainnya, manfaat yang diberikan harus merata, yang tidak hanya menelan waktu namun juga sulit untuk diterapkan karena dapat dengan mudahnya menimbulkan kecemburuan di antara orang perorang atau kelompok.

Menyeimbangkan keadilan sosial dan keamanan

Perlakuan non-diskriminatif dan berkeadilan sosial merupakan prinsip-prinsip inti dalam rancangan program-program DDR yang didukung PBB. Prinsip keadilan sosial sering diterapkan ketika menyusun kriteria tentang siapa saja yang memenuhi syarat untuk bergabung dalam program DDR. Meskipun demikian, penting juga untuk menerapkan prinsip ini kepada semua penduduk yang terkena dampak perang. Pada kebanyakan konflik, jumlah pengungsi lokal dan pengungsi jauh lebih banyak dibanding jumlah mantan gerilyawan. Ketiga kelompok tersebut menghadapi tantangan-tantangan reintegrasi yang sama dan, *pada prinsipnya*, mereka harus sama-sama dibantu untuk mendapatkan akses pada peluang reintegrasi.

Menawarkan perlakuan khusus kepada mantan gerilyawan dapat memicu rasa tidak suka di kalangan kelompok lain yang mungkin memandang manfaat eksklusif bagi mantan gerilyawan sebagai penghargaan yang tidak layak diberikan kepada pelaku konflik. Walaupun demikian, jika kepatuhan terhadap prinsip keadilan sosial akan meningkatkan kemungkinan rekonsiliasi dan reintegrasi yang berkelanjutan, situasi keamanan sering menunjukkan bahwa *setidaknya dalam jangka pendek*, fokus khusus terhadap mantan gerilyawan diperlukan untuk memastikan membaiknya keamanan.

Isu kuncinya adalah memastikan komunitas penerima *diajak berbicara, memahami dan menerima* dengan baik bahwa bantuan yang ditargetkan untuk mantan gerilyawan akan meningkatkan keamanan mereka sendiri. Dalam hal ini, bantuan reintegrasi untuk mantan gerilyawan tidak dapat dianggap sebagai *keistimewaan hak* bagi mantan gerilyawan, melainkan sebagai *investasi* di bidang keamanan untuk penduduk yang lain.

Memastikan transisi yang tepat waktu, mulai dari tahap membantu individu sampai membantu komunitas

Di luar adanya kekhawatiran bahwa mantan gerilyawan menerima manfaat yang tidak proporsional selama rekonstruksi pasca konflik, diperoleh kesepakatan bahwa fokus terhadap mantan gerilyawan dalam program DDR merupakan soal yang penting dan dapat dibenarkan dalam upaya membangun *rasa percaya diri dan keamanan* di masyarakat yang hancur karena perang. Untuk mencapai *tujuan-tujuan keamanan* program DDR, bantuan secara penuh harus diberikan untuk reintegrasi awal mantan gerilyawan.

Meskipun demikian, dalam konteks reintegrasi *untuk jangka waktu yang lebih panjang*, harus ada keseimbangan antara membantu kebutuhan-kebutuhan mantan gerilyawan yang spesifik dan kebutuhan-kebutuhan komunitas yang lebih luas untuk mencegah rasa tidak suka dan berlanjutnya perbedaan antara warga sipil dan mantan militer. Berbagai fokus terhadap reintegrasi jangka panjang mantan gerilyawan harus disertai dengan penanganan tambahan yang terfokus pada keluarga mantan gerilyawan dan komunitas mereka, yang tanpa mereka sulit mencapai reintegrasi yang berkelanjutan.

Penekanan harus diberikan pada *gerak cepat* program-program khusus mantan gerilyawan menuju program-program berbasis komunitas dan program-program pembangunan nasional. Kegagalan untuk melakukan hal itu akan mengakibatkan mantan gerilyawan terus mengidentifikasi diri mereka sebagai anggota kelompok khusus di luar masyarakat, mengganggu reintegrasi mereka ke dalam komunitas lokal, dan merendahkan proses rekonsiliasi dan restitusi.³⁶

‘Terpusat pada individu’

Fokus utama strategi DDR yang didukung oleh PBB harus diletakkan pada individu dan komunitas. Pendekatan yang ‘terpusat pada individu’ harus mengenali adanya perbedaan jenis bantuan yang diperlukan oleh kedua jenis kelamin dan mereka yang berusia berbeda serta memiliki kemampuan fisik yang berbeda. Menentukan kegiatan-kegiatan reintegrasi yang baik dan relevan secara budaya untuk masing-masing kelompok, menawarkan layanan kesehatan dan psikologis yang disesuaikan, memberikan pelatihan dan dukungan bagi perusahaan mikro, akan merombak struktur sosial yang eksklusif dan penuh kekerasan, serta memastikan keberlanjutan program reintegrasi.

36 Laporan UNDP tentang Reintegrasi Tentara yang Dimobilisasi di Mozambik (1992-1996) merekomendasikan bahwa “dalam kurun waktu tiga tahun demobilisasi, tentara yang didemobilisasi tidak lagi menjadi kelompok sasaran, namun harus menjadi kelompok penting dalam program pembangunan berbasis komunitas.

Hal-hal yang diperbolehkan dan tidak dalam reintegrasi ekonomi

Pelatihan

BOLEH	TIDAK BOLEH
<p>Fleksibel dalam hal waktu dan lokasi pelatihan kejuruan, dan melakukan konsultasi dengan peserta, untuk mengatasi keterbatasan waktu dan mobilitas perempuan dan laki-laki. Beberapa di antaranya mungkin memiliki anak, atau sedang mengikuti pendidikan untuk mengejar ketertinggalan atau pekerjaan selain dari pelatihan tersebut.</p>	<p>Memaksa mantan pejuang memilih antara pendidikan dan pelatihan keterampilan. Meskipun mereka mungkin membutuhkan keterampilan untuk menghasilkan pendapatan dalam jangka pendek, mereka tidak boleh “dijebak dalam kemiskinan” karena kurang berpendidikan.</p>
<p>Memikirkan alat-alat dan metode-metode yang digunakan untuk pengajaran. Buatlah pelatihan keterampilan sepraktis mungkin dan adaptasikan dengan kebutuhan-kebutuhan individual dan situasi lokal.</p>	<p>Menggunakan mesin-mesin, pupuk, dan lain-lain yang canggih dan mahal yang tidak disesuaikan sehingga orang-orang dapat menggunakannya. Alat-alat harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus pekerja penyandang cacat.</p>
<p>Melatih perempuan di bidang-bidang non-tradisional. Kurangnya pekerja laki-laki dan kebutuhan untuk mengambil alih tugas-tugas laki-laki dapat memudahkan perempuan dalam memasuki bidang-bidang yang sebelumnya dibatasi berdasarkan gender.</p>	<p>Menyelenggarakan kursus-kursus dengan silabus formal yang diberikan kepada murid-murid yang pasif.</p>
<p>Menghindari melatih mantan pejuang di bidang-bidang yang mungkin mereka identifikasi sebagai pilihan mereka, tetapi tidak terkait dengan permintaan pasar. Perasaan frustrasi dan tidak berdaya yang telah membuat mereka mengangkat senjata pada masa-masa sebelumnya dapat bangkit kembali apabila mereka tidak dapat menemukan pekerjaan setelah mengikuti pelatihan, dan dengan demikian membuat mereka menjadi mangsa empuk untuk direkrut kembali.</p>	

Menargetkan mantan pejuang untuk reintegrasi

BOLEH	TIDAK BOLEH
<p>Merancang program-program bantuan berdasarkan kondisi mantan pejuang, tetapi tetap membuka layanan untuk anggota-anggota komunitas lain dengan kondisi serupa.</p>	<p>Melupakan bahwa layanan-layanan yang diberikan kepada mantan pejuang juga dapat berguna bagi para pengungsi, pengungsi lokal yang kembali dan kemudian oleh semua orang yang membutuhkannya.</p>
<p>Mengikutsertakan komunitas ketika mengambil keputusan mengenai jenis bantuan DDR apa yang harus ditawarkan kepada mantan pejuang.</p>	<p>Melupakan bahwa program-program bantuan khusus untuk mantan pejuang dapat menimbulkan rasa tidak percaya karena (adanya anggapan) bahwa mantan pejuang memperoleh status istimewa.</p>
<p>Mempertimbangkan pendekatan yang perlu diperluas biasanya lebih mahal.</p>	<p>Menekankan ketidaksetaraan yang ada dalam hal akses terhadap tanah/lahan atau sumber daya produktif.</p>

Mantan pejuang dan komunitas

BOLEH	TIDAK BOLEH
Merancang program-program bantuan berdasarkan kondisi mantan pejuang, tetapi tetap membuka layanan untuk anggota-anggota komunitas lain dengan kondisi serupa.	Melupakan bahwa layanan-layanan yang digunakan oleh mantan pejuang juga dapat berguna bagi para pengungsi, IDP yang kembali dan kemudian oleh semua orang yang membutuhkannya.
Mengikutsertakan komunitas ketika mengambil keputusan mengenai jenis bantuan DDR apa yang harus ditawarkan kepada mantan pejuang.	Melupakan bahwa program-program bantuan khusus bagi mantan pejuang dapat menimbulkan rasa tidak percaya karena (adanya anggapan) bahwa mantan pejuang memperoleh status istimewa.
Mempertimbangkan bahwa pendekatan yang perlu diperluas biasanya lebih mahal.	Menekankan ketidaksetaraan yang ada dalam hal akses terhadap tanah/lahan atau sumber daya produktif.

Jender

BOLEH	TIDAK BOLEH
Mempromosikan masyarakat yang berkeadilan sosial, adil dan inklusif.	Memaksakan anggapan mengenai bagaimana peran dan hubungan jender seharusnya tidak dikaitkan dengan konteks sosial-budaya yang spesifik
Beranjak dari cara-cara kebiasaan bekerja mengenai jender dan selalu mempertanyakan asumsi-asumsi yang anda miliki	Menghindari membuat pertukaran antara kepedulian jender dan kecepatan aksi
Merancang kebijakan dan program untuk reintegrasi sosial-ekonomi berdasarkan informasi demografi sosial-ekonomi	Menganggap perempuan atau laki-laki sebagai kelompok homogen; mereka juga merupakan bagian dari kelompok-kelompok lain (etnis, agama, politik)
Memahami keterampilan-keterampilan yang dimiliki perempuan.	

Profil mantan pejuang

BOLEH	TIDAK BOLEH
Memahami ambisi mantan pejuang.	Memiliki anggapan yang merendahkan bahwa harapan mereka tidak realistis.
Memiliki sensitifitas jender.	Menjebak mantan pejuang muda dalam kemiskinan dengan tidak memberikan akses pendidikan (untuk mengejar ketertinggalan) mereka.
Memiliki sensitifitas terhadap perbedaan regional yang terdapat dalam suatu negara.	Sikap merendahkan.
Mengakui keterampilan-keterampilan non-formal.	
Mengkaji dan mengakui keterampilan-keterampilan yang diperoleh sebagai mantan pejuang (misalnya, kepemimpinan, organisasi, perawatan/perbaikan mesin, keakuratan).	

